



SEMINAR SEJARAH LOKAL

KOMUNIKASI ANTAR DAERAH SUKUBANGSA DAN PEMBAURAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL

1983

**MILIK DEPKIBUD
TIDAK DIPERDAGANGKAN**



SEMINAR SEJARAH LOKAL

KOMUNIKASI ANTAR DAERAH SUKUBANGSA DAN PEMBAURAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH
NASIONAL
1983**

Penyunting :
Drs. Anhar Gonggong

DAFTAR ISI

	hal.
Sambutan DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL	i
PENGARAHAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN P & K	v
Sumbawa : Hubungan Antar Pulau dan Interaksi Antar Suku Bangsa (Sebuah Studi Sejarah longue duree Sumbawa) oleh : Helius Syamsuddin	1
Komunikasi Antar Daerah, Antar Suku Bangsa dan Pembauran Di Daerah Riau oleh : Suwardi MS.	13
Masalah Komunikasi Antar Budaya oleh : Nico S. Kalangie	25
Penduduk Bukittinggi sebelum Perang sebuah kerangka studi. oleh : J.R. Chaniago	39
Orang Manado; sebuah gambaran singkat. oleh : Fendy E.W Parengkuan	51
Sulawesi Selatan dan Komunikasi ; Dalam rangka proses integrasi Bangsa. Melangkah ke "Pemahaman Diri" melalui Sejarah Lokal oleh : Anhar Gonggong	65
Latar Belakang Sejarah dan Interaksi Sosial Perantau Mandailing dan Minangkabau dengan Suku Bangsa Melayu di Medan, oleh ; Nazief Chatib & Z. Pangaduan Lubis	85
KEPUTUSAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
DAFTAR PESERTA PEMBAWA MAKALAH	
DAFTAR PENINJAU SEMINAR SEJARAH LOKAL	
LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SEJARAH LOKAL DI DENPASAR.	

SAMBUTAN DIREKTUR DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI KEBUDAYAAN

ARTI PENTINGNYA SEJARAH LOKAL DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGANTAR

Seorang tokoh Antropologi yaitu A. Montagu menyatakan bahwa manusia sebagai salah satu bentuk kehidupan berbeda dengan makhluk hidup lainnya karena ia telah mampu meng-arungi **adaptive zone** atau arena adaptasi secara aktif. Kemampuan manusia mengarungi arena adaptasi itu merupakan perwujudan betapa keunggulan manusia dalam menanggapi lingkungannya dalam arti luas serta segala tantangan yang dihadapi itu telah mendorong untuk belajar, menciptakan dan menyampaikan diri dengan mengembangkan kebudayaan yang tidak hanya mempermudah kehidupan tetapi yang pada gilirannya sebagai lingkungan buatan yang baru menguasai tingkah laku manusia. Demikian manusia berhasil membina dirinya dengan menan-gapi lingkungannya secara aktif, mencoba memahaminya se-belum menentukan sikap dan berbuat.

Keberhasilan manusia mengarungi **adaptive zone** itu dimungkinkan karena kemampuannya untuk belajar dan meng-ajar atau menyampaikan pengalaman, pengetahuan dan idea-ideanya kepada sesamanya baik yang hidup segenerasi maupun yang hidup dalam generasi yang berlainan. Kemampuan manusia untuk belajar dan mengajar itu merupakan faktor yang amat penting dalam perwujudan kebudayaan. Oleh karena itu sejarah kehidupan manusia pada hakekatnya merupakan pelajaran yang harus difahami oleh setiap orang yang ingin hidup ber-masyarakat secara baik.

Di dalam proses belajar dan mengajar itu manusia tidak membatasi ruang maupun lingkup waktu, Di manapun manusia hidup ia akan mengejar pengetahuan, mencari pengalaman dan mengembangkan idea-ideanya sesuai dengan situasi dan kondisi setempat serta kemampuan perorangan maupun masya-rakat yang bersangkutan. Akan tetapi lingkup pengetahuan yang diserapnya tidak terbatas pada apa yang tersedia di tempat dan dialami sendiri di suatu-waktu. Manusia dengan kemam-puannya mengembangkan dan menggunakan lambang-lambang dapat memperoleh dan menyampaikan pengetahuan, pengalam-an dan gagasan mereka secara intra generasi maupun inter generasi. Karena itulah maka pengetahuan manusia bersipat

akumulatif semakin lama semakin bertimbun dan diperkaya oleh pengetahuan yang diwarisi dari generasi terdahulu maupun dengan apa yang mereka peroleh sendiri selama hidupnya.

SEJARAH

Berdasarkan kenyataan itu, dengan tepat pula A. Montagu menyatakan bahwa "Manusia telah menciptakan hari depannya melalui karya-karyanya hari ini atas dasar apa yang telah diperbuat di masa lampau". Berpegang pada pernyataan tersebut, maka segala peristiwa dan kejadian di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat manusia menjadi penting artinya sebagai pedoman di masa kini serta pengarahan di masa mendatang.

Sejarah sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan dalam arti luas (termasuk segala tantangan yang dihadapi) merupakan cermin yang tidak hanya memantulkan wajah kemanusiaan di masa lampau, melainkan mengandung kekuatan inperatif terhadap orang yang mau bercermin untuk berbuat atau tidak berbuat. Pada gilirannya sikap dan tindakan atas dasar pengalaman sejarah itu akan mempengaruhi hari depan manusia yang bersangkutan.

SEJARAH LOKAL

Berkaitan dengan kehidupan sosial bangsa Indoensia yang sedang membangun, kedudukan dan peranan sejarah amat penting. Pengetahuan sejarah amat diperlukan bukan sekedar sebagai sumber pengetahuan yang inspiratif, akan tetapi juga sebagai pedoman untuk berkarya di hari kini serta menciptakan hari depan sesuai dengan cita-cita serta nilai-nilai Pancasila yang telah sama-sama kita sepakati.

Arti pentingnya sejarah bagi masyarakat Indonesia itu menjadi lebih kuat kalau diingat bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk dengan latar belakang kebudayaan, kemasyarakatan, keagamaan dan sejarah yang beraneka ragam. Penggalangan persatuan dan kesatuan bangsa yang merupakan masyarakat mejemuk merupakan pekerjaan yang tidak ringan dan harus diselenggarakan dengan seksama. Ia memerlukan kesabaran, ketekunan dan penuh pengertian baik di antara penyelenggara pemerintahan maupun anggota masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan data dan informasi yang memadai tentang kebudayaan dan kemasyarakatan Indonesia baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya maupun untuk memperluas cakrawala masyarakat tentang negara dan bangsanya.

Mengingat kenyataan akan masyarakat Indonesia yang tersebar luas di kepulauan Nusantara dengan lingkungan fisik, sosial dan budaya yang beraneka ragam itu, maka pengetahuan sejarah yang diperlukan tidak terbatas pada apa yang terjadi secara nasional, melainkan juga apa yang terjadi secara lokal, yang justru selama ini kurang mendapat perhatian secara mendalam. Sejarah lokal yang benar-benar merupakan kejadian setempat maupun sejarah lokal sebagai kejadian setempat yang mempunyai kaitan secara nasional mempunyai kedudukan dan peranan informan, inspiratif, dan imitatif yang sama pentingnya dalam usaha memahami masa lampau, menghayati masa kini dan merencanakan masa depan bangsa karena pada hakikatnya masyarakat Indonesia itu bersifat Bhineka Tunggal Ika.

TUJUAN SEMINAR

Atas dasar pernyataan dan kenyataan itulah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Seminar Sejarah Lokal yang sebentar lagi akan dibuka secara resmi oleh Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan. Sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Panitia, tujuan seminar ini antara lain ialah hendak mengundang perhatian para cendekiawan, khususnya sejarawan, untuk memberikan perhatian pada peristiwa yang terjadi setempat (lokal) bukan untuk menonjolkan rasa kedaerahan yang sempit melainkan justru untuk mengungkapkan kesadaran sejarah sebagai satu bangsa yang teguh pendiriannya serta kuat berpegang pada cita-cita kemerdekaan sebagaimana tersimpul dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.

Akhirnya dengan segala hormat kita nantikan pengarahan Ibu Direktur Jenderal Kebudayaan agar seminar mencapai hasil yang memadai dan bermanfaat bagi negara dan bangsa sesuai dengan dana yang disediakan, menggunakan waktu dan pemusatan pemikiran para peserta yang telah dicurahkan untuk keperluan ini.

**Dirrektor Sejarah Dan Nilai Tradisional
Direktorat Jenderal Kebudayaan,**

Dr. S. Budhisantoso.

PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN P DAN K

Dalam kehidupan budaya nasional, sejarah bangsa wajar kita beri tempat berprioritas tinggi, Sejarah bangsa itulah, yang justru mempersatukan semua individu sebagai unsur bangsa kita, yang telah berjuang untuk mencapai kemerdekaannya dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sambil mempertahankan pula kepribadian sendiri, identitas budaya, sebagai ciri khas kebangsaannya.

Memang ciri khas kebangsaannya itu yang mampu mengangkat suatu bangsa menjadi subyek sejarah, karena justru kepribadiannya sendiri sanggup membuat sejarah bangsanya. Atas dasar ciri khas dan sejarah itu pun suatu bangsa dapat dinilai dalam tingkatan martabat yang sama dengan bangsa-bangsa merdeka lain.

Sebagai bangsa yang berhasil mencapai kemerdekaannya atas kekuatan sendiri, sewajarnya kita merasa berkewajiban untuk mempelajari sejarah nasional kita dengan seksama. Perang Kemerdekaan dan semua peristiwa yang menuju ke tercapainya kedaulatan bangsa kita banggakan dan perhatian sebagai unsur sejarah nasional yang paling menonjol. Seperti saya sebutkan tadi, hal itu wajar.

Namun demikian, riwayat serta keadaan kita sebagai bangsa, kita sadari pula sebagai bukan hanya meliputi saat kehidupan bangsa dalam jangkauan nasional. Sejarah bangsa secara nasional baru bisa diperhitungkan nilai, dan dalam kaitan, kemerdekaan bangsa sejak 1945. Akan tetapi, kita ketahui semua betapa jauh sebelumnya bangsa kita sudah hidup di wilayah ini, sekalipun, memang, belum dalam kaitan nasional sebagai satu bangsa yang berdaulat di seluruh wilayahnya, namun masih dalam batasan suku bangsa dan daerah masing-masing. Walaupun demikian, dalam batasan itu pun, kita ketahui bangsa kita telah mampu juga membuat sejarah. Hal ini cukup terbukti dari aneka macam berita kesejarahan, yang telah beredar, sejak awal sekali tentang wilayah kita, dan yang timbul baik di luar maupun di dalam daerah bersangkutan, meliputi, tidak jarang pula, kepentingan bagian besar, bahkan keseluruhan wilayah kita.

Maka dapat dikatakan, bahwa di bidang sejarahpun keadaan bangsa kita tepat sesuai dengan lambang negara yang telah kita pilih : Bhinneka Tunggal Ika. Jelas pula, bahwa dalam mempelajari dan meneliti sejarah bangsa kitapun berkepentingan dengan menelaah kedua aspek bangsa, ialah ke-bhinneka-an, maupun ke-tunggal-annya.

Di bidang sejarah hal itu dengan sendirinya berarti, bahwa di samping sejarah yang berjangkauan nasional dan meliputi bangsa Indonesia secara menyeluruh serta sebagai bangsa berdaulat, kitapun mempelajari dan meneliti sejarah yang terjadi pada masing-masing sukubangsa kita dan di masing-masing sukubangsa kita dan di masing-masing daerah. Sejarah jenis itulah yang kita sebut dengan istilah teknis sejarah lokal dan yang sekarang ini kita jadikan pokok seminar.

Ingin saya garisbawahi di sini, bahwa dalam sejarah lokal itupun tampak jelas kaitan dengan keadaan sosial-budaya bangsa kita seperti telah disebutkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Demikianlah dalam sejarah lokal itupun kita hadapi kedua aspek bangsa :

- 1; Aspek bhinneka, yaitu sejarah lokal yang meliputi peristiwa-peristiwa terbatas dalam hubungan kehidupan masing-masing sukubangsa atau daerah.
2. Aspek tunggal ika, yaitu sejarah lokal yang, sekalipun menyangkut peristiwa di daerah atau pada sukubangsa tertentu, namun memiliki kaitan dengan peristiwa sejarah yang berjangkauan nasional, atau yang kejadiannya telah didasari pemikiran yang berjangkauan nasional.

Kedua aspek sejarah lokal itu sama pentingnya apabila dinilai dari sudut ilmiah, Maka kedua aspek itu pula berhak dan perlu diperhatikan dan diteliti secara ilmiah.

Namun demikian, ingin saya tegaskan, bahwa ilmu beserta penelitiannya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia secara keseluruhan. Maksudnya, sebagai sarjana dan ilmiawan, dalam pekerjaan yang betapa ilmiahnyapun sifatnya, kita tidak mungkin melepaskan diri dari tanggung jawab kita sebagai manusia, termasuk tanggung jawab sebagai manusia Indonesia yang hidup di dalam perbatasan negara Indonesia dan dalam hubungan erat dengan bangsa Indonesia itu.

Hal ini saya anggap sangat penting dan hendaknya dijadikan pegangan dalam kehidupan ilmiah kita. Sejarah, lagi pula, termasuk bidang sosial budaya. Dan, sebagaimana kita ketahui, penelitian di bidang sosial-budaya di Indonesia tidak jarang

mengandung bahaya dapat menjerumuskan peneliti yang kurang berpengalaman dan waspada, dalam mempertajamkan unsur bhinneka bangsa, keaneka-ragaman dan perbedaan-perbedaannya, dengan melupakan kaitannya dengan keadaan tunggal bangsa, yaitu dasar budaya yang diketahui memang sama serta tujuan kita untuk membina kesatuan dan persatuan dalam kehidupan bernegara.

Dalam usaha kita meningkatkan kesadaran bersejarah secara umum dan dalam penelitian sejarah lokal secara khusus, kita tidak ingin membangkitkan justru rasa kedaerahan atau kesukuan yang sempit.

Perhatian kita untuk ke aneka-ragaman, ke-bhineka-an bangsa, bukan bertujuan memisah-misahkan dan memecah-belah. Unsur bhinneka bangsa kita perhatikan untuk dapat menyajikan pilihan guna memberi nuansa, variasi warna-warni yang menarik dalam pengembangan kebudayaan nasional, namun dengan tetap berpijak pada kesamaan dasar yang memang ada serta mengarah ke kesatuan dan persatuan bangsa, sesuai dengan prinsip Wawasan Nusantara.

Untuk bidang sejarah lokal secara khusus hal itu berarti, bahwa yang hendaknya ditekankan dalam perhatian kita ialah kesamaan dan kebersamaan dalam sejarah kita sebagai satu bangsa yang memiliki dasar budaya yang sama, memakai bahasa daerah yang semuanya termasuk rumpun bahasa yang sama dan yang hidup dalam wilayah yang sama serta telah sepakat membangun negara kesatuan dalam persatuan. Artinya, yang ditekankan bukan justru keaneka ragam pengalaman sejarah yang dapat merusak rasa kesatuan, memecah-belah bangsa dan mempengaruhi kita untuk berpikiran kedaerahan atau kesukuan secara sempit.

Di samping itu saya merasa perlu pula mengingatkan di sini; bahwa sejarah merupakan ilmu, sehingga berkembang terus seperti ilmu-ilmu lain. Dan sebagaimana layaknya suatu ilmu, setiap penemuan dalam penelitian tentu tidak pernah mungkin dapat dianggap sebagai tuntas secara mutlak, sekalipun peneliti bersangkutan sendiri, dalam antusiasme bekerja, kadang-kadang cenderung merasa telah mendapatkan sesuatu yang sefinal-finalnya. Hal ini memang sering menjadi masalah. Masyarakat awam acapkali kurang memahami sifat ilmu, yang dalam perkembangannya selamanya bisa berubah, mengikuti terungkapkannya data yang tersedia dan yang juga selalu bisa bertambah-tambah. Demikianlah setiap ilmu berkembang tanpa henti-hentinya, tidak ada data yang dapat dianggap memberi jawaban yang mutlak final.

Maka jelas kiranya, bahwa dalam pengungkapan hasil penelitian kita perlu bersikap hati-hati dan bijaksana. Tanggungjawab sebagai sarjana dan ilmiawan memang dengan sendirinya menuntut sikap berhati-hati dan bijaksana itu, karena justru sarjana dan ilmiawan selalu sadar akan relatif-nya setiap penemuan.

Selanjutnya, ingin saya tegaskan kembali, bahwa sejarawan sebagai sarjana dan ilmiawan pula, memikul tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia, anggota masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia, sehingga perlu tetap menyadari tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu membina kesatuan dan persatuan. Penyebarluasan penemuan dan hasil penelitian yang bagaimana juga tidak dapat dianggap tuntas secara mutlak, dan yang mungkin bisa menimbulkan salah tafsir, salah paham, hendaknya dibatasi pada para ahli saja, yang mampu mengevaluasi relativitasnya dan mengerti sangkut-paut ilmiahnya, bukan diedarkan untuk konsumsi masyarakat luas yang awam dan tidak terdidik dalam konvensi ilmiah secara umum dan ilmu sejarah secara khusus.

Dengan harapan, bahwa seminar ini akan berhasil meningkatkan kemampuan ilmiah, memperdalam kesadaran sejarah dan juga memperkuat tanggungjawab kita kepada negara dan bangsa, saya buka Seminar Sejarah Lokal secara resmi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi sekalian usaha baik kita.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Prof. Dr. Haryati Soebadio

SUMBAWA : HUBUNGAN ANTAR PULAU DAN INTERAKSI ANTAR SUKU BANGSA

(Sebuah studi sejarah *longue duree* Sumbawa)

Oleh :

Halius Syamsuddin

1. Pendahuluan

Pulau Sumbawa merupakan pulau ketiga sesudah Bali dan Lombok dalam urutan deretan kepulauan ke timur yang dahulu dikenal dengan Sunda Kecil.¹ Letaknya diapit oleh pulau Lombok di sebelah barat dan pulau Flores di sebelah timur, Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Laut Flores di sebelah utara.

Posisi ini secara mikro mempunyai arti penting dalam hubungan historis antara pulau Sumbawa bagian barat (Sumbawa) dengan pulau Lombok dan pulau Sumbawa bagian timur (Bima) dengan Flores (Manggarai). Hubungan ini mempunyai konsekuensi-konsekuensi sosio-politis dan sosio ekonomis, sebab pada abad-abad ke-17 dan ke-18 Sumbawa bagian barat mempunyai pengaruh di Selaparang (Lombok) sampai tiba saatnya kemudian didesak oleh Bali², dan pada abad ke-18 sampai akhir dekada ketiga abad ke-20, Sumbawa bagian timur secara nominal menguasai Manggarai³. Juga posisi ini secara makro dilihat dari sudut geo-politik pulau Sumbawa berada di antara dua pengaruh besar politik dan kultural Jawa dari barat dan Makasar dari utara pada masa pra dan pasca-Islam. Hinduisme dari Jawa masih meninggalkan bekas bekasnya di pulau Sumbawa⁴, begitu pula Agama Islam masuk ke Sumbawa dari Jawa via Lombok⁵, sedangkan Makasar juga sebagai pusat penyiaran Islam bagi Bima⁶. Selanjutnya secara politis Jawa memperkenalkan sistim kerajaan dan Makasar mengintroduksikan gelar serta pangkat-pangkat Hadat kerajaan di pulau Sumbawa. Semua ini menunjukkan bahwa dalam proses sejarah yang berlangsung berabad-abad (*longue duree*), pulau Sumbawa secara sosio-politis, sosio-kultural dan sosio-ekonomis, senantiasa berhubungan dan berinteraksi dengan dunia di luar batas-batas teritorialnya. Hal ini penting sehubungan dengan keterbukaan Sumbawa untuk menerima pengaruh-pengaruh dari luar, di samping dinamika masyarakat Sumbawa sendiri untuk menyaring pengaruh-pengaruh itu sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang berlaku setempat pada waktu itu.

2. Pembagian unit politik dan suku.

Sampai tahu 1815, di pulau Sumbawa terdapat enam unit

politik berupa kerajaan/kesultanan yaitu Bima, Dompu (Dompo), Sumbawa, Sanggar, Tambora dan Papekat. Tiga yang pertama adalah kesultanan yang besar yang termasuk "state government", sedangkan tigayang terakhir adalah kesultanan kecil yang termasuk "minimal government". Kriteria besar dan kecil ini adalah menurut luasnya wilayah pemerintahan, besarnya jumlah penduduk, kekuasaan dan kewenangan pemerintah, serta kuatnya sentralisasi, hierarki dan diferensiasi kekuasaan⁷. Keenam kesultanan itu masing-masing berdaulat dan berdiri sendiri. Tetapi dengan meletusnya gunung Tambora tahun 1815, maka kerajaan Tambora dan Papekat lenyap, sedangkan empat unit politik lainnya masih dapat terus bertahan.

Pembagian kerajaan-kerajaan ini tidak sama dengan pembagian bahasa-bahasa daerah yang dipakai, maka ada dua kelompok besar masyarakat pertama yang mempergunakan bahasa Bima (*basa Smawa*) yang didukung oleh orang Sumbawa (*tau Smawa*), dan yang kedua masyarakat yang mempergunakan bahasa Bima (*nggahi Mbojo*), Dompu (*dou Dompu*) dan Sanggar (*dou Sangga*). Jelasnya masyarakat yang mempergunakan bahasa Sumbawa terdapat di Sumbawa bagian barat yang bertepatan dengan kesultanan Sumbawa dan masyarakat yang mempergunakan bahasa Bima terdapat di Sumbawa bagian tengah dan timur pulau yang bertepatan dengan kesultanan-kesultanan Dompu, Sanggar dan Bima. Dalam lingkungan yang lebih besar menurut klasifikasi Esser mengenai bahasa-bahasa Austronesia maka bahasa Sumbawa termasuk dalam kelompok Bali-Sasak, sedangkan bahasa Bima termasuk dalam kelompok bahasa Bima - Sumba⁸. Kemudian sejalan dengan pembagian bahasa-bahasa ini, maka C van Vollenhoven membagi-bagi pula menurut lingkaran hukum adatnya (*rechtskring*). Sumbawa termasuk dalam kelompok "Bali en Lombok", sedangkan Bima dan selebihnya termasuk dalam "de Timorschokring"⁹. Jadi singkatnya, berdasarkan bahasa yang dipakai maka di pulau Sumbawa ada dua suku bangsa utama yaitu Sumbawa dan Bima. Benar bahwa di Bima ada yang disebut orang Donggo (*dou Donggo*) atau "orang gunung", akan tetapi pada dasarnya mereka adalah juga orang Bima yang menyingkir ke gunung-gunung karena mereka semula tidak mau memeluk agama Islam. Orang Donggo ini mengasingkan diri dari orang Bima Islam yang berdiam di dataran dan mereka tetap mempertahankan "keaslian". Hanya saja mereka tetap menggunakan bahasa Bima dengan sejumlah kata-kata asing bagi orang-orang Bima yang berdiam di dataran. Pada saat-saat tertentu, orang Bima dan orang Donggo dapat saling berhubungan, misalnya melalui perdagangan *in natura*.

3. Hubungan antar pulau dan interaksi antar suku

Sebelum ada pemberitaan-pemberitaan awal yang tertulis menurut legenda atau mitos-semula di pulau Sumbawa memerintahkan seorang raja yang berdiam di pedalaman pulau yaitu Dompu. Raja ini membagi kerajaannya atas tiga bagian menurut jumlah puteranya: putera tertua tetap memerintah di Dompu, putera kedua memerintah di Bima dan putera ketiga memerintah di Sumbawa¹⁰. Tokoh mitos Sang Bima ini dianggap sebagai pendiri kerajaan dan dinasti raja-raja Bima serta memperkenalkan sistim politik berupa kerajaan di pulau Sumbawa setelah menggantikan kedudukan pemimpin asli, **primus inter pares**, yang disebut **ncuhi**. Mitos ini menunjukkan telah adanya hubungan antara Jawa dan Sumbawa. Tidak diketahui kapan terjadinya pembagian kerajaan itu atas tiga bagian dan juga tidak diketahui kapan terbentuknya tiga kerajaan lain yaitu Tambora, Papekat dan Sanggar. Tiga yang terakhir ini jelas lebih muda. Ada anggapan bahwa pada masa-masa kemudian sesudah terbentuknya Dompu, Bima dan Sumbawa, maka orang-orang Sumbawa ada yang migrasi dan bermukim di Sanggar, orang-orang Manggarai datang dan menetap di Tambora serta orang-orang Bima dan Dompu ada yang tinggal di Papekat¹¹. Anggapan ini sulit untuk diterima mengingat komposisi peta bahasa daerah yang digunakan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas tadi.

Menurut N.J. Krem, gugusan kepulauan Sunda Kecil rupanya telah disebut-sebut oleh seorang ahli ilmu bumi, A. Claudius Ptolomeus, dalam tulisannya **Geographike Hypegesis** yang ditulis tahun 165. Di antaranya ada berita tentang Maniolai yang barangkali dimaksudnya adalah Tambora di pulau Sumbawa¹². Tentu saja keterangan Krem ini masih hipotetis-spekulatif. Akan tetapi jika ini memang benar, maka ini adalah berita tertua tentang sebuah tempat di pulau Sumbawa dan disini tersirat bahwa pulau Sumbawa telah berkomunikasi dengan dunia luar, atau setidaknya sudah dikenal. Adalah suatu kenyataan bahwa pulau Sumbawa merupakan salah satu mata rantai atau tumpuan berpijak bagi mereka yang bepergian dari barat ke timur atau sebaliknya dalam gugusan kepulauan Nusa Tenggara.

Kemudian jika kita berpegang pada **Carita Parahyangan**, maka pulau Sumbawa telah termasuk dalam pemberitaan tertulis yang relatif tua. Dalam **Carita Parahyangan** disebutkan tentang Sanjaya, putera Sena (atau Sanna dalam prasasti Canggal tahun 732) sebagai penakluk Bali, Bima, Malaya dan Kemir (Khmer)¹³. Ini berarti bahwa nama Bima sudah ada pada abad ke-8. Tetapi apakah benar sudah setua itu? Apakah epos **Bha-**

rathayudha yang menyebut nama tokoh terkemuka kedua dalam Pandawa Lima ini sudah tersebar sampai ke Indonesia bagian timur? Di Bima dan Dompu memang dikenal **Hikayat Sang Bima** yang menyebut tokoh utama Bima dan adik-adiknya Sang (Ar) Juna, Sang (Na) Kula dan Sang (Saha) Dewa. Nama-nama ini terdapat juga dalam deretan silsilah raja-raja Bima sejak masa-masa awal¹⁴. Hanya sebelum ada pembuktian baru ditemukan, maka pemberitaan Carita Parahyangan ini kita kesampingkan dulu.

Selanjutnya berita Cina tahun 1225 dari Chau-Ju-Kua yang menulis Chu-fan-chi. Disebutkan bahwa dalam daerah jajahan Cho-P'o atau Jawa (Kediri) antara lain terdapat nama Takang. Rouffaer melokalisasi nama ini dengan Sumbawa, atau Flores, atau Sumba¹⁵. Keterangan ini secara implicit menunjukkan adanya hubungan antara pulau-pulau itu.

Meskipun tidak diketahui tahun yang pasti, Gajah Mada telah pernah mengucapkan janji untuk menaklukkan pulau-pulau lain seperti Gurun, Seran, Tanjungpura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik¹⁶. Dompo (Dompu) bukanlah sebuah pulau melainkan nama sebuah tempat atau kerajaan di pulau Sumbawa bagian tengah.

Rupanya Dompu ketika itu merupakan *pars pro toto* pulau yang di anggap cukup penting peranannya untuk ditaklukkan. Ternyata tahun 1357 Majapahit mengirim ekspedisinya ke Dompo di bawah pimpinan Tumenggung Nala¹⁷. Demikianlah dalam syair (pupuh) ke-14 dari **Negarakerlagama** (1365) lalu disebut nama-nama penting di pulau Sumbawa yang telah menjadi bagian dari wilayah Majapahit seperti " Taliwang, Dompo (Dompu), Sapi (Sape) Sanghyang Api (Sangiang, Gunung Api), Bhima (Bima), Ceran (Serang, Setelok), Hutan (Utan)"¹⁸. Janji Gajah Mada yang kemudian diikuti ekspedisi Nala rupanya tidak memberikan kekuasaan nominal Majapahit atas pulau Sumbawa.

Memperkuat pemberitaan **Negarakerlagama**, maka **Hikayat Raja Raja Pasai** pun menyebut tentang perjalanan penaklukkan Majapahit semasa Gajah Mada itu. Setelah menaklukkan bagian timur dan daerah-daerah taklukan ini memberikan upeti kepada Ratu Majapahit, "maka kembalilah segala kelengkapan itu berlayar menyusun tanah Bima, Sumbawa dan Selaparang (Lombok) dan Bali, Blambangan sekaliannya itu pun habislah ta'lluq"¹⁹.

Beberapa berita lain lagi yang cukup menarik ialah dari **Kidung Ranggalawe** dan **Kidung Pamancangah**. Dalam **Kidung Ranggalawe** disebut tentang kuda-kuda yang bagus dari Kore di

Bima (Harfiah: Bhima—Kore)²⁰. Pulau Sumbawa memang telah terkenal dengan kuda-kudanya dan Kore adalah nama sebuah tempat di teluk Sanggar. Suatu persamaan yang menarik ialah bahwa Antenio Pigafetta pun ada menyebut nama "Bimacore"²¹ untuk yang sebenarnya adalah dua nama tempat yaitu Bima dan Kore.

Dalam Kidung Pamancangah disebut tentang seorang penguasa Bedahulu (Bedulu di Bali) yang bernama Pasung Righi atas perintah Jawa mengadakan ekspedisi ke **Cambhawa** (Sumbawa). Dalam pertempuran melawan raja Sumbawa yang bernama Dedela Natha, maka baik Pasung Righi maupun Dedela Natha keduanya sama-sama tewas. Kemudian pada bagian lain dari Kidung Pamancangah itu diceritakan tentang seorang Brahmana yang bernama Mpu Kapakistan dari Kediri (Jawa) mempunyai cucu bernama Sukanya yang kawin dengan seorang dari Cambhawa²².

Baik peristiwa pertama maupun peristiwa kedua tidak menyebut angka tahun sehingga kita tidak dapat mengetahui kapan terjadinya.

Dari pemberitaan-pemberitaan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa di pulau Sumbawa sebelum dan semasa Majapahit, bahkan segera sesudahnya, sudah ada masyarakat teratur yang hidup dalam unit-unit politik berupa kerajaan-kerajaan. Masyarakat-masyarakat ini tidak statis tetapi telah berhubungan dengan pulau-pulau lain meskipun harus dipertanyakan bagaimana sifat hubungan itu. Konsepsi kerajaan dan raja tentunya diperkenalkan ke pulau Sumbawa sebagai hasil pengaruh dominasi Jawa-Hindu. Hal ini terbukti dari sebutan sangaji (sang aji) untuk raja-raja di Bima, Dompu, Sanggar, Papekat dan Tambora, **aji** atau **dewa** di Sumbawa. Sebutan ini tetap digunakan rakyat masing-masing, bahkan setelah Islam masuk ke pulau Sumbawa dan raja-rajanya mendapat sebutan atau gelar Sultan-Sultan.

Hubungan antara pulau Sumbawa dengan pulau-pulau lain yang dengan sendirinya melibatkan interaksi antara suku-suku bangsa melanjut terus ketika Islam masuk dan menyebar ke pulau Sumbawa. Menurut Zollinger, agama Islam masuk ke pulau Sumbawa antara tahun 1450–1540 dan agama ini tersiar dari Jawa²³. Yang terakhir ini sejalan dengan **Babad Lombok yang mengatakan bahwa Islam dari Jawa masuk ke Sumbawa dari Jawa**²³. Yang terakhir ini sejalan dengan **Babad Lombok yang mengatakan bahwa Islam dari Jawa masuk ke Sumbawa Dompu dan Bima via Lombok**²⁴. Keterangan ini menunjukkan masih melanjutnya hubungan antara pulau Sumbawa dengan

Jawa dan Lombok. Tetapi menurut Bo Mbojo (Kronik Bima), agama Islam masuk ke Bima via Makasar. Yang menarik ialah bahwa penyiari-penyiarnya adalah orang-orang Melayu, antara lain Datu Dibandang dan Datu Ditiro. Penyiaran ini terjadi pada tahun 1018 H (1609 M). Kedua penyiari Islam itu adalah juga menjadi utusan Sultan Goa yang baru saja beberapa tahun sebelumnya telah memeluk Islam. Interaksi antara Goa dan Siang-dalah melalui perkawinan puteri Goa dengan raja Bima²⁵. Berkaitan dengan penyiaran Islam itu pula, maka di Bima (kota) kemudian terdapat pemukiman orang-orang Melayu. Atas jasa-jasa orang Melayu menyiarkan agama Islam, maka mereka mendapat hak-hak istimewa dari Sultan Bima, antara lain mereka dibebaskan dari bea-cukai dalam perdagangan²⁶. Semula orang-orang Melayu yang berdiam di kampung Malaju itu hidup secara eksklusif. Akan tetapi dengan diberinya peranan yang berarti di istana Bima, terutama sebagai juru bahasa, maka lambat laun terjadi pembauran antara orang Melayu dengan orang Bima. Terutama setelah kemerdekaan pembauran itu telah sempurna di mana orang-orang Melayu telah menjadi orang-orang Bima yang juga menggunakan monopoli orang-orang Melayu sebagai *lingua franca* dalam interaksi antara orang-orang Bima dengan suku-suku bangsa lainnya telah kehilangan peranannya. Bahasa Melayu telah digantikan oleh bahasa Indonesia yang orang-orang Bima sendiripun telah sanggup pula menggunakannya.

Dalam hubungan dengan Manggarai di Flores bagian barat, daerah ini menjadi obyek sengketa antara kesultanan Goa dengan kesultanan Bima. Semula daerah ini merupakan "hadiah kawin" yang diberikan Goa ketika seorang sultan Bima kawin dengan seorang puteri Goa. Sejak abad ke-18 Manggarai menjadi bagian dari kesultanan Bima²⁷. Sejauh mana pengaruh dominansi Bima di Manggarai ini memang masih harus memerlukan penelitian lebih lanjut. Hanya saja pada tahun 1864 disebutkan bahwa batas timur kesultanan Bima di Manggarai ialah daerah sebelah barat dari garis Peta di pantai utara dan Nanga Ramo di pantai selatan²⁸. Pada tahun 1886 daerah ini dibagi atas dua lanschap yaitu Reo dan Peta. Masing-masing diperintah oleh wakil-wakil sultan Bima yang disebut *Naib*. Kemudian daerah-daerah ini dibagi lagi atas distrik-distrik. Lanschap Reo terdiri atas tujuh distrik dan lanschap Peta atas enam distrik. Distrik Reo merupakan kesatuan dari kampung-kampung yang membentuk Reo sebagai ibu kota. Di sini bermukim orang-orang Bima yang bercampur dengan orang-orang Makasar, Bugis, Selayar dan Benerate. Distrik ini diperintah oleh *Galarang*. Akan tetapi distrik-distrik lain terbagi-bagi lagi atas kedaluan yang lebih kecil yang masing-masing diperintah oleh *Dalu-Dalu*. Dalu-

dalunya ini setingkat dengan Galarang dan mereka ini merupakan kepala-kepala daerah asli di Manggarai. Lalu kedaulatan ini dibagi-bagi lagi atas berbagai kampung.²⁹

Naib Reo dan Naib Pota diangkat oleh sultan Bima atas persetujuan Dewan Hadat. Pergantian Naib umumnya atas dasar turun temurun dari ayah ke anak. Setiap ada pergantian Naib, sultan memberikan pengesahan kewenangannya. Hanya pada gilirannya Naib itu harus memberikan laporan dan pertanggung jawabannya ke pada Sultan Bima³⁰. Ketika Bima dan Sumbawa sesudah tahun 1908 dimasukkan kedalam residensi **Timor en Onderoorigheden** oleh Belanda, Manggarai masih dikaitkan dengan Bima. Baru tahun 1929 Manggarai dilepaskan dari Bima³¹. Demikianlah Bima telah diputuskan orientasinya ke timur. Dengan terbentuknya Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur tahun 1950-an, maka keturunan-keturunan pemukim Bima di Manggarai telah masuk ke dalam administrasi Nusa Tenggara Timur.

Di Sumbawa bagian barat yaitu kesultanan Sumbawa, terjadi interaksi yang cukup menarik. Di luar pelapisan masyarakat Sumbawa asli, terdapat kelompok-kelompok etnis lain yang berdiam dan hidup di Sumbawa. Mereka termasuk "orang asing". Mereka datang dan pergi, tetapi ada pula yang telah menetap selama beberapa keturunan dengan tetap mempertahankan identitas kelompok etnisnya. Zollinger (1850) menyebutkan sejumlah besar orang-orang Bugis, Makasar dan Bajo yang berdiam di Sumbawa Besar dan di pantai antara Utan dan Alas³², Ligtoet (1876) yang juga datang ke Sumbawa kemudian seperti Zollinger pada masa pemerintahan Sultan Amrullah, selain menyebut orang-orang Bugis dan Makasar, juga menyebut orang Selayar, Mandar dan Arab³³.

Menurut Ligtoet, dari jumlah seluruh penduduk kesultanan Sumbawa ± 50.000 jiwa pada tahun 1876, maka jumlah "orang-orang asing" itu ± 10.000 jiwa³⁴, atau 20%, suatu jumlah yang relatif besar. Mereka berdiam selain di tempat-tempat yang disebutkan oleh Zollinger, juga sepanjang pantai utara ke arah timur sampai Ampang.

"Orang-orang asing" itu tidak terkena kerja paksa atau membayar belasting berupa uang atau benda sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang Sumbawa asli. Karena kebanyakan mereka itu menjadi pemilik perahu, maka praktis perdagangan laut mereka kuasai. Dari keterangan Ligtoet dapat diketahui bahwa sudah beberapa tahun di Labuhan (pelabuhan ibu kota Sumbawa Besar) seorang pangeran Mandar yang bernama

Mandasingi Daenna I Kattu (saudara raja Pemboang dan Cinrana) berdiam bersama pengiringnya dan ia sibuk melakukan perdagangan³⁵.

Meskipun orang-orang Bugis dan Makasar yang berdiam di Sumbawa tidak dapat diharapkan untuk melakukan kerja paksa atau membayar pajak, akan tetapi dalam hal-hal tertentu mereka dapat memberikan jasa-jasa baik mereka. Jika sultan Sumbawa dan pengiring-pengiringnya berangkat ke Makasar, atau jika mangkubumi mengirim surat-surat, pesan-pesan atau semacam itu ke tempat-tempat yang hanya mudah dicapai melalui jalan air di dalam wilayah kesultanan Sumbawa, maka mereka ini selalu menyediakan perahu-perahu mereka³⁶.

Lebih dari seperempat abad sebelum Ligtoet, Zollinger menyebut pula "orang-orang asing" lain di Sumbawa, misalnya dari Jawa, Bali, Sasak dan Manggarai. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang datang pada abad-abad sebelumnya³⁷.

Seperti halnya dengan kesultanan Bima, kesultanan Sumbawa juga semula berorientasi ke utara yaitu Sulawesi (Makasar). Raja-raja Sumbawa kawin dengan puteri-puteri Goa. Perkawinan politik ini adalah untuk mengimbangi apa yang juga dilakukan oleh Bima sebagai salah satu cara kompetisi di kalangan para penguasa di pulau Sumbawa sendiri. Sementara itu, berbeda dengan kesultanan Bima yang berorientasi pula ke timur (Manggarai), maka Sumbawa pun semula menunjukkan perhatiannya ke Selaparang (Lombok). Di pulau ini Sumbawa berkompetisi dengan Bali sehingga dalam konflik antara kedua kelompok etnis ini, maka akhirnya Sumbawa terdesak pada abad ke-18³⁸. Tetapi pada bagian kedua abad ke-20, setelah terbentuk Nusa Tenggara Barat di mana Lombok dan Sumbawa menjadi suatu propinsi dan ibu kota propinsi itu terdapat di Mataram (Lombok), maka orang-orang Sumbawa bahkan Dompu dan Bima berdatangan dan mereka membentuk pemukiman di ibu kota propinsi itu. Dengan demikian di Mataram terbentuklah suatu masyarakat majemuk.

4. Penutup

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah terjadi hubungan antara pulau Sumbawa dengan pulau-pulau lain selama berabad-abad. Hubungan itu tentu saja dilakukan oleh suku-suku bangsa yang berdiam di pulau-pulau itu. Dalam interaksi antar suku-suku bangsa ini, baik di pulau Sumbawa sendiri maupun antar pulau, maka berlangsunglah silih berganti antara kompetisi dan konflik, meskipun terjadi pula akomodasi

ataupun kooperasi. Cara-cara hidup yang masih eksklusif dari masing-masing kelompok etnis itu, disertai pula dominasi etnis yang satu atas etnis yang lain, semuanya mempersulit interaksi kooperatif sehingga sebelum kemerdekaan pembauran adalah suatu hal yang hampir mustahil. Kemerdekaan telah mematahkan eksklusifisme, dan interaksi antar kelompok etnis di kepulauan yang dulu bernama Sunda Kecil itu menuju kepada pembauran sempurna. Kemajuan yang pesat dalam komunikasi dan transportasi antar pulau-pulau sekarang semakin memperlancar proses hubungan antar nusa dan interaksi serta pembauran antar suku bangsa.

CATATAN BELAKANG

1. Sejak tahun 1950-an kepulauan Sunda Kecil dibagi menjadi tiga propinsi : Bali, Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa) dan Nusa Tenggara Timur (Flores, Sumba, Timor dan pulau-pulau di sekitarnya).
2. Periksa Alfons van der Kraan, **Lombok : Conquest, Colinzation and Underdevelopment, 1980-1940**, Singapore : Heineman Educational Books (Asia) Ltd., 1980, hlm. 4.
3. H. Zollinger, *Verslag van cene reis naar Bima en Soembawa, en naar eeniege plaatsen op Celebes, Salcijer en Flores, gedurende de maanden Mei tot Desember, 1847*", VBG, 1850, hlm. 13, 140.
4. Lihat N.N. Krom **Hindu Javansche Geschiedenis**, 's-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1931, hlm. 126. 387.
Bandingkan dengan F.H. Van Naerssen, "Hindoe javaansche Overblijfselen op Soembawa", TNAG, LV, 1938, hlm 90-92.
5. Alfons van der Kraan, *op cit.*, hlm. 2-3.
6. Zollinger, *op cit* hlm, 139.
7. Pendapat Lucy Mair sebagaimana yang dikutip dalam Georges Balandier, **Political Anthropology**, terjemahan dari bahasa Prancis oleh A.M. Sheridan Smith, New York : Vintage Books, 1970, hlm. 44.
Lucy Mair membedakan tiga tipe pemerintahan yaitu : "mini mal government", "diffused government" dan "state government", Menurut kami bentuk-bentuk pertama dan ketiga cukup relevan dengan bentuk-bentuk pemerintahan di kesultanan-kesultanan pulau Sumbawa.
8. E.M. Uhlenbeck, "Indonesia and Malaysia" dalam Thomas A. Sebeok, ed. **Current Trends in Linguistics**, Vol. 8, The Hague : Mouton, 1971, hlm. 83.
9. C. van Vollenhoven, **Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie, Eerste Deel**, Leiden : E.J. Brill, 1918, hlm. 431-455, hlm. 455-504.
10. A. Ligtvoet, H. 226.
11. *Ibid.*
12. F.H. van Naerssen, "Hindoejavaansche Overblijfselen op Soembawa", TNAG, LV, 1938, hlm. 90.
13. Krom, *op cit* hlm. 126.
14. D.F. van Braam-Morris, "Nota van toelichting behoorende bij het contract gesloten met het landschap Bima op den 20 sten October 1886 aan de regeering ingediend door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden" **Tijd.** Deel 34, 1890, hlm. 225.
15. Naerssen, *op cit.* hlm. 91.
16. Krom, *op cit.* hlm. 387.
17. *Ibid.*, hlm. 409.

18. **Ibid.** hlm. 416—417.
19. A.H. Hill, "Hikayat Raja-Raja Pasai" JRAS (Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society), Vol. 33 1960, hlm. 102.
20. Naerssen, **op cit.** hlm 91.
21. **Ibid.**
Bandingkan C.C.F.M. Le Roux, "De Elcano's tocht door den Timorarchipel met Magalhaes's schip 'Victoria' **Feestbundel**.Deel 2, 1929, hlm. 49.
22. Naerssen, **op cit.**, hlm. 92.
23. Zollinger, **op. cit.**, hlm. 139.
24. Can der Kraan, **op.cit.**, hlm 3.
25. Or. 506 a.
26. Helius Sjamsuddin, "The Coming of Islam and the Role of the Malays as Middlemen in Bima (Sumbawa)", **Historiography of Indonesia and the Middleman in Indonesia History**, Thirs Dutch Indonesia Historical Congress, The Netherlands, 1980, hlm. 5-9.
27. Zollinger, **op cit**, hlm. 713; 140.
28. Van Braam Morris, **op.cit.** hlm. 177.
29. **Ibid.** hlm. 178-181.
30. **Ibid.**, hlm. 219.
31. **Koloniaal Verslag 1929-1930**, hlm. 17-28.
32. Zollinger, **op.cit**, hlm. 161.
33. A. Ligtvoet, "Aanteekeningen betreffende dan economischen toestand en de ethnografie van het rijk van Soembawa", **Tijd.** 25, hlm 569.
34. **Ibid.**
35. **Ibid.** hlm. 570.
36. **Ibid.** hlm. 569.
37. Zollinger, **op.cit** hlm. 80.
39. Ligtvoet, **op.cit.** hlm. 555.

KOMUNIKASI ANTAR DAERAH ANTAR SUKU BANGSA DAN PEMBAURAN DI DAERAH RIAU

Oleh :
Drs. SUWARDI. MS
UNIV. RIAU *)

I

Letak daerah Riau di persimpangan jalan dari berbagai arah, baik antar pulau/daerah Indoensia maupun antar negara di berbagai penjuru mata angin di dunia, dari Barat ke Timur, Utara dan Selatan.

Keadaan ini memberi kemungkinan daerah Riau mendapat kunjungan oleh berbagai suku bangsa yang datang dari berbagai suku bangsa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia dan oleh suku bangsa asing (Cina, India, Arab) dan bangsa barat (Portugis, Belanda, Ingeris dan Jepang). Kedatangan berbagai suku Bangsa ini telah berlangsung sejak masa purbakala.

Dalam mengkaji adanya komunikasi antara Riau dengan daerah tetangganya, negara tetangga dan berlangsungnya interaksi antara suku bangsa yang terdapat di Riau serta berlangsungnya interaksi tersebut yang pada saatnya tumbuh dan berkembangnya Riau sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan dan dalam hal ini pengembangan Kebudayaan Melayu..

Untuk menghindari luasnya ruang lingkup, baik dalam priodisasi, maupun dalam wilayah geografis serta aspek sosial budaya sebagai indikator kajian, maka dipokuskan pada tumbuh dan berkembangnya Imperium Melayu (Abad 18 sampai abad 20), yaitu tumbuhnya kekuasaan Kolonial Belanda di wilayah imperium Lelayu itu. Singkatnya kajian dipusatkan pada tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Riau Lingga di Penyengat dan sekitarnya sampai jatuhnya wilayah ini ke tangan penjajah Belanda (1911).

Bagaimana terjadinya komunikasi antara Riau dengan daerah tetangga, negara tetangga dan interaksi antara suku bangsa itu terhadap pertumbuhan Budaya Melayu akan terlihat dari adanya hubungan antara Melayu dan Bugis di wilayah ini, terutama dalam aspek pengembangan bahasa, agama dan adat istiadat Melayu dengan berbagai implikasinya.

*) Makalah disampaikan pada Seminar Sejarah Lokal, Bali 1 - 4 September 1982

II

Komunikasi antara Riau dengan daerah-daerah di Daratan Sumatera dan daerah di kepulauan dan Semenanjung Malaya telah terjalin sejak lama. Komunikasi di sini dimaksudkan dalam pengertian luas, komunikasi sosial, komunikasi massa dan komunikasi politik (Astrid's, Susanto 1980). Keadaan itu berpangkal pada kedudukan Riau sebagai pusat Kemaharajaan Melayu (Abad 18 – 1911).

Sebagai pusat Pemerintahan Kemaharajaan Melayu, telah terjadi komunikasi antar daerah-daerah yang bernaung di bawah kekuasaannya. Diantaranya komunikasi antara daerah-daerah di kepulauan, daerah-daerah di pantai Timur Sumatra seperti Indragiri, Bengkalis dan daerah di Semenanjung Malaya termasuk Singapura (komunikasi politik).

Kejatuhan pusat kekuasaan Kemaharajaan Melayu Riau-Johor ke tangan Belanda pada 1641, maka Sultan terpaksa memindahkan pusat pemerintahan Riau – Johor ke Bintan (Riau) yaitu di Ulu Sungai Riau, kemudian kota Piring, Daik-Lingga dan Penyengat.

Dalam rangka penyatuan daerah-daerah kemaharajaan Melayu itu, Raja Kecil (Sultan Siak I) selama 1717 – 1722, melakukan perlawanan terhadap Belanda di perairan pulau-pulau Riau dan perairan Selat Malaka. Usaha Raja Kecil ini mendapat rintangan dari pihak Belanda dan pada 1722 Raja Kecil menyusun kekuatan di Siak yaitu di Buntan (pusat kesultanan Siak pertama).

Sejak masa itu kemaharajaan Melayu terpecah menjadi berbagai kerajaan yaitu kemaharajaan Melayu berpusat di Daik – Lingga yang mengauasai kepulauan Riau dan Indragiri, Siak dengan wilayahnya meliputi daerah-daerah Siak, Bengkalis, Rokan dsb berada di bawah kekuasaan kesultanan Siak Sri Indrapura.

Kemaharajaan Melayu Riau dengan pusatnya di Daik – Lingga – lebih terkenal dengan Kerajaan Riau – Lingga. Antara Kemaharajaan Riau – Lingga ini dnngan Johor tetap dalam komunikasi sosial politik. Sebagai suatu kekuasaan pemerintahan kemaharajaan Melayu disebut juga sebagai kerajaan Riau – Johor.

Keadaan ini berlangsung sampai ditanda tanganinya Traktat London 1824, sebab sesudah tahun tersebut Semenanjung Malaya dan Singapura jatuh ketangan Inggeris dan Riau–Lingga menjadi wilayah jajahan Belanda. Sebagai suatu daerah jajahan, Riau–Lingga harus tunduk kepada pusat pemerintahan jajahan di Batavia. Kedudukan Riau–Lingga makin terdesak terutama sejak dipatahkannya perlawanan Raja Haji (1784) di Malaka oleh Belanda (Suwardi MS dkk 1982). Status Riau–Lingga, termasuk Indragiri adalah Residentie Riouw en onderhoorigheden dan sejak 1911, berpusat di Tanjung Pinang. Kedudukan pemerintahan Sultan Riau–Lingga sejak Sultan Abdurrachman Muazam Syah (1812–1832) berada di pulau Penyengat (Mughtar Lutfi dkk 1977).

Kekuasaan Sultan sudah terbatas sekali karena Belanda memberi kuasa lebih besar kepada Yam Tuan Muda Riau. Kedudukan Yam Tuan Muda sejak awalnya adalah di Pulau Penyengat. Penjajahan Belanda pada masa itu telah memecah belah wilayah kemaharajaan Melayu Riau dengan status Residentie Riouw en Onderhoorigheden dan wilayahnya hanya meliputi Riau kepulauan dan Indragiri. Daerah kesultanan Siak menjadi bagian Residentie Sumatra's Ooskust, Kampar dan Bangkinang menjadi bagian Residentie Sumatra's Westkust yaitu onderafdeeling Lima Puluh Koto. Daerah Rantau Kuantan merupakan daerah otonom dengan status Land Schaap Rantau Kuantan (Kuantan onder district).

Pada masa permulaan Proklamasi Kemerdekaan, status Residentie Riouw onder hoorigheden tetap di kuasai Belanda, kecuali Indragiri dan daerah-daerah lainnya langsung berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia dan keadaan ini berlangsung sampai 1950 (KMB).

Sejak 1950 status wilayah Residentie Riau kembali meliputi wilayah propinsi Riau sekarang dengan pusat kresiden di Tanjung Pinang, yaitu meliputi : Kabupaten Indragiri, Kepulauan Riau, Bengkalis, Kampar dan Kotapraja Pekanbaru dalam wilayah Propinsi Sumatera Tengah. Riau sebagai suatu Propinsi adalah sejak 5 Maret 1958.

Tanjung Pinang selain sebagai ibu kota Residensi Riau merupakan kota pelabuhan yang menampung hasil-hasil dari daerah Hinterlanddi daratan Sumatera dan daerah kepulauan untuk kemudian di eksport ke kota Pelabuhan Singapura. Letak Tanjung Pinang dan kepulauan Riau umumnya berbatasan langsung dengan luar negeri. Keadaan ini merupakan ciri yang unik dari wilayah ini, status daerah ini adalah pelabuhan bebas bea.

Selama puluhan tahun sejak kemerdekaan masih menggunakan mata uang asing (dollar Malaya), dan sejak 1963 berlaku mata uang rupiah, mata uang daerah Kepulauan Riau mula-mula disebut Kepulauan Riau Rupiah (KRP) dengan nilai tukar terhadap rupiah masih sama dengan dollar, dan setelah tahun 1964 mempunyai nilai yang sama dengan rupiah di wilayah Indonesia lainnya.

Pada masa kepulauan Riau merupakan pelabuhan bebas bea ini, hubungan dengan daerah Indonesia lainnya mempunyai ketentuan khusus. Diantaranya keluar-masuk kepulauan Riau memerlukan izin tersendiri (harus ada jaminan). Hanya saja tidak perlu mempergunakan passport. Ketentuan-ketentuan khusus itu menimbulkan terbatasnya komunikasi antara Kepulauan Riau dengan daerah-daerah lain di Indonesia, termasuk dengan wilayah Kresidenan Riau lainnya di pantai Timur Sumatra dan di daratan Sumatra. Sosial ekonomi dan sosial budaya lebih lancar hubungan wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya dengan Semenanjung Melaya dan Singapura dari pada dengan wilayah Indonesia lainnya.

Dalam Pemerintah Kresidenan Kepulauan Riau lebih banyak berhubungan langsung ke Jakarta dari apad ke pusat Propinsi di Sumatera Barat (Bukit Tinggi). Apabila kembali dikaji komunikasi antar daerah pada masa Kemaharajaan Melayu Riau terutama dalam komunikasi dalam arti komunikasi medianya, maka Kemaharajaan Melayu telah berhasil mengembangkan bahasa Melayu Riau dari Lingga Franca menjadi bahasa resmi pemerintahan dan bahasa ilmu pengetahuan serta agama Islam. Keberhasilan bahasa Melayu Riau sebagai media komunikasi antar suku bangsa dan antara pribumi dengan Belanda, dan orang asing lainnya diawali oleh sastrawan melayu, Abdullah bin Abdul Kadir Munsyi dan diteruskan oleh Raja Ali Haji dan sastrawan lainnya (Mughtar Lutfi dkk 1977).

Dalam sosial budaya pusat pemerintahan kerajaan Riau—Lingga tetap menjadi ikutan dari kerajaan-kerajaan melayu lainnya seperti Indragiri, dan kerajaan di Semenanjung Melaya. Secara khusus adat resam melayu berakar dari kerajaan Riau—Lingga ini. Oleh karena itu ikatan bathin dan kekeluargaan antara Riau—Lingga dengan daerah-daerah kerajaan lainnya senantiasa terjalin terus, bahkan dengan dikukuhkannya bahasa Melayu Riau menjadi bahasa Nasional Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928, terbukti salah satu aspek melayu telah menjadi milik seluruh suku bangsa di nusantara ini dan sekaligus merupakan identitas Nasional Indonesia.

Dalam kaitan ini komunikasi sosial yang ditimbulkan oleh bahasa Melayu Riau telah menimbulkan integrasi nasional antar suku bangsa di Indonesia. Dr. Astrid's Susanto mengatakan bahwa "Bahasa mencerminkan diri dan derajat integrasi diri dalam lingkungan sosial budayanya, hal mana merupakan realita bagi setiap manusia". Selain itu melalui bahasa memperlihatkan bagaimana persediaan pengetahuan (=stock of knowledge) yang dimiliki oleh suatu lingkungan sosial (Astrid's Susanto, 1980).

Komunikasi dalam jalur perhubungan antar daerah di Riau dan dengan luar daerah telah berkembang dari sejak tumbuhnya kekuasaan pemerintahan di Riau. Sejak awal abad pertama Masehi, perairan Selat Melaka (Selat Sumatera) telah ramai dikunjungi pelajar-pelajar barat dan timur Daerah Riau telah menjadi pusat perdagangan dan pusat pengembangan Islam. Kunjungan orang barat dan timur ke Riau dan daerah sekitarnya menimbulkan Kemaharajaan Melayu sebagai pelabuhan perdagangan rempah-rempah.

Pelabuhan-pelabuhan itu bermula di Bintan, Malaka, Johor, sungai Riau (di Kopak) dan Kampar, Siak dan sebagainya. Berkembangnya pelabuhan-pelabuhan itu menumbuhkan jalur perhubungan antara pusat pelabuhan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Terjadi jalur komunikasi antara Aceh di utara - Minangkabau di barat, Palembang di selatan dan Melaka kemudian Johor - Singapura di timur. Dengan demikian Riau merupakan daerah tempat bertemunya pedagang dan pelajar dari berbagai suku bangsa dan sekaligus posisi silang Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran antar bangsa adalah melalui Riau.

III

Komunikasi antar suku bangsa di Riau telah berlangsung akibat letak daerah ini sebagai daerah tumpuan perdagangan antar bangsa dan antar daerah. Sebagaimana diketahui bahwa daerah Riau didiami oleh mayoritas suku bangsa Melayu (70%), menurut Raja Ali Haji pada masa kerajaan Riau-Lingga, penduduk yang mendiami wilayah ini berjumlah 40.000 - 50.000 jiwa. Dan menurut sensus 1930 telah berjumlah 565.665 jiwa (Volk Steeling, 1930) Berbagai sumber telah menyebutkan bahwa hubungan berbagai suku bangsa di Riau berlangsung sangat serasi. Perjanjian antar suku bangsa Melayu dengan suku bangsa Bugis telah diawali pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1722-1761).

Sultan Sulaiman berusaha mengikat persahabatan dengan lima bersaudara putera Daeng Rilaka (Upu Tanderi Burung)

yaitu Daeng Marewah, Daeng Parani, Daeng Menambun, Daeng Celak, Daeng Kamasi. Perjanjian itu adalah untuk menghadapi tantangan dari luar, suku bangsa Melayu dan suku bangsa Bugis bersama-sama berjuang untuk menghadapi segala serangan dari luar. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa suku Melayu sebagai Sultan dan suku Bugis sebagai Yam Tuan Muda Riau (Joginder Singh Yessy, 1979).

Perjanjian itu diperkuat dengan politik perkawinan antara saudara-saudara Sultan Sulaiman dengan keturunan Daeng Rilaka tersebut. Diantaranya Daeng Celak kawin dengan Tengku Mandal dan Daeng Celak menjadi Yam Tuan Muda Riau II (Armawati, 1973).

Peranan hubungan suku bangsa Melayu Riau dengan suku bangsa lainnya tetap terjalin dengan serasi. Hal ini dapat pula dilihat dari adanya berbagai suku bangsa yang berdomisili di kerajaan-kerajaan Riau. Suku bangsa Minang Kabau telah membantu Raja Kecil (Sultan Siak I) untuk mengembalikan kedaulatan Melayu di Johor.

Raja Kecil dengan bantuan lebih kurang 40 orang pengikut Datuk-datuk Minang Kabau (Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Pesisir) kembali merebut kedaulatan ayahnya Sultan Abdul Jalil di Johor pada 1717 (Muchtar Lutfi dkk, 1973).

Peranan keturunan datuk-datuk ini masih terlihat dalam struktur pemerintahan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Datuk-datuk mendampingi pemerintahan Sultan yang dikenal Datuk Empat suku. Suku bangsa lainnya seperti suku Boyan (Bawean), Flores, Jawa, dan suku bangsa Cina telah mendapat kesempatan untuk berdiam di wilayah Kesultanan Melayu Riau.

Sultan Melayu Riau memanfaatkan suku-suku ini untuk memperkuat kerajaan. Pada masa Sultan Abdurrachman yang berkedudukan di Penyengat segala jenis suku bangsa itu telah dimanfaatkan dengan pembahagian kerja tertentu terutama suku bangsa Cina, suku Boyan diberi kesempatan mendiami pulau Penyengat dan Tanjung Pinang dengan tugas sebagai nelayan dan pedagang. Walaupun pada mula kedatangan suku Cina ke Riau diawali dengan pembukaan perkebunan gambir dan karet. Bilamana pastinya orang Cina datang di Kepulauan Riau belum dapat dikemukakan tahun yang kongkrit. Menurut informasi orang Cina telah datang sebelum Belanda membuat Tanjung Pinang sebagai Pusat Kresidenan Riau (abad 18).

IV

Dalam melihat pembauran kajian ditekankan pada berlangsungnya pembauran antar suku bangsa pribumi dan sepintas dengan suku bangsa Cina. Seperti telah disebutkan terdahulu berkat usaha Sultan, semua suku bangsa yang ada di Riau diberi kesempatan yang sama dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Antara suku bangsa Melayu dan suku bangsa Bugis telah diadakan pembahagian kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan.

Suku bangsa Melayu sebagai Sultan dan keturunannya bergelar Sultan atau Tengku bagi yang tidak memegang pemerintahan.

Suku bangsa Bugis bergelar Yam Tuan Muda dan keturunannya bergelar Raja. Berdasarkan silsilah Melayu dan Bugis telah berlangsung hubungan kekeluargaan antara kedua suku itu dalam puluhan keturunan, dan wajar telah terjadi pembauran antara suku-suku itu. Dalam hubungan ini dapat dijelaskan bahwa tidak dapat lagi diketahui dengan pasti siapa keturunan Bugis dan Melayu diantara penduduk di bekas kerajaan Riau itu (Kepulauan Riau).

Walaupun menurut gelar kebangsawannya masih dipergunakan Tengku dan Raja. Penggunaan bahasa Melayu diantara suku-suku itu lebih menunjukkan dengan jelas telah terwujudnya pembauran itu. Pembauran ini sesuai dengan pendapat Newman dimana adanya kelompok sosial yang dominan $A + B = A'$. Percampuran Melayu dan Bugis mewujudkan tetap suku Melayu dengan budayanya semula. (Hadidjojo, 1981).

Pembauran suku-suku Melayu dengan suku lainnya belum sama tingkatnya dengan pembauran suku Melayu dan Bugis itu. Suku-suku lain masih menunjukkan ciri khas dari sukunya itu. Pembauran itu mungkin baru pada tingkat integrasi dan belum asimilasi murni.

Bagaimana tingkat pembauran suku-suku bangsa Melayu (Pribumi) dengan suku bangsa Cina masih menunjukkan tingkat yang rendah. Interaksi sosial diantara suku-suku bangsa itu masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan suku Cina yang relatif berjumlah besar (74.145 orang) dan mereka berkomunikasi sesama mereka saja.

Tradisi sosial-budaya tanah leluhurnya telah mewaris dari generasi ke generasi demikian pula keadaan sosial ekonominya

jauh lebih baik dari penduduk pribumi. Apabila dihubungkan pembauran di Riau dengan teori Newman tersebut diatas, maka suku Melayu sebagai kelompok sosial dominan dapat berbaur dengan suku-suku pribumi lainnya, tetapi dalam kategori yang berbeda-beda. Tingkat asimilasi suku Melayu dan Bugis berada pada tingkat lebih tinggi dan yang lainnya masih rendah.

Hambatan utama belum berjalannya asimilasi antara pribumi dengan Cina di Tanjung Pinang adalah perbedaan dalam latar belakang sosial-budaya dan perbedaan agama. Sebab mayoritas penduduk Tanjung Pinang adalah penganut Islam. Agama suku Cina lebih dekat dengan agama Budha (wawancara dengan bekas kapiten Cina Tanjung Pinang).

Tambahan pula pada masa penjajahan Belanda diberi kesempatan tersendiri untuk urusan orang Cina tingkat residensi, letnan untuk urusan *districthoop* van *onderdistricthoop*, Taolo dalam urusan di kepenghuluan atau kampung. Keadaan itu memberi peluang kepada orang Cina untuk berada sebagai kelas menengah atau kelas perantara dari Belanda ke Pribumi dan sebaliknya. Namun tidak dipungkiri bahwa ada orang Cina yang mempunyai kesadaran yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan Nasional Indonesia dan mereka telah dapat berbaur dengan masyarakat dan pemerintah. Jumlah mereka itu hanya sekitar puluhan orang saja.

V

Komunikasi di daerah Riau, antara daerah, luar daerah dan antara suku bangsa telah berjalan sejak lama. Sesuai dengan keadaan wilayah ini terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan (ribuan pulau) dan wilayah ini cukup luas, maka usaha yang ditempuh Kesultanan Riau untuk mewujudkan Pemerintahan yang satu merupakan usaha yang sangat besar.

Keadaan ini dapat ditunjukkan dari peranan Riau dalam menumbuhkan budaya dan terutama dalam menumbuhkan bahasa Melayu Riau yang pada masanya dapat menjadi bahasa resmi dalam pemerintahan, dan akhirnya menjadi bahasa Nasional Indonesia.

Berbagai suku bangsa telah menetap di Riau dan ini tentu berkat adanya kondisi yang baik yang telah dibina oleh pemerintah dan masyarakat yang diawali masa pemerintahan Sultan-sultan di Riau. Hanya saja pemerintahan kolonial

Belanda dan Inggris berusaha memecah belah wilayah ini menjadi bagian-bagian sehingga pada saat Riau masuk bagian daerah dan negara lain.

Kesatuan sosial-budaya telah mengikat wilayah dan suku bangsa di Riau dan pada saatnya dalam rangka kesatuan wilayah Republik Indonesia kembali menjadi satu Propinsi yaitu Propinsi Riau (1958).

Tingkat pembauran antara suku bangsa Pribumi telah berjalan terutama suku Melayu dan Bugis. (tingkat asimilasi dan yang lain pada tingkat integrasi sosial saja). Pembauran suku-suku bangsa Pribumi dengan Cina lebih rendah tingkatnya. Usaha lebih lanjut untuk pembinaan dan pengembangan sosial-budaya Melayu memerlukan penanganan yang lebih serius.

Mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang akan datang hal ini akan mendapat perhatian dari semua pihak dan lebih jauh diharapkan agar tulisan ini akan dapat bermanfaat hendaknya.

DAFTAR — BACAAN

- Ali, Raja Alhaj almarhum, 1965 **Tuhfat Al Nafis**, Sejarah Melayu dan Bugis, dirumi oleh Inche Munir bin Ali, dari naskah jawi penerbitan journal of the Malayan (Sekarang Malaysia) Branch, Royal Asiatic jilid X, bahagian II, 1932 Malaysia Publication LTD, Singapura.
- Ali, Raja Alhaj, 1973 **Silsilah Melayu dan Bugis** disusun dan dikaji oleh Armawati penerbit pustaka antara, Kuala Lumpur.
- Arta'yah Saleh, **Menyelusuri Jejak Peranan Riau dalam sejarah Melayu**.
- Arsip Nasional Republik Indonesia, 1970, **Surat-surat Perjanjian Pemerintah VOC dan Hindia Belanda 1904—1909** Jakarta.
- Astrid's Susanto. Dr. Phil, 1980, **Komunikasi Sosial di Indonesia**, penerbit Bina Cipta Jakarta.
- Buyong bin Adil, Haji, 1971, **Sejarah Johor seri Sejarah Nusantara**, Dewan bahasa dan pustaka Kementerian Pelajar Malaysia, Kuala Lumpur.
- Buyong bin Adil, Haji, 1973, **Sejarah Malaka**, Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pusataka Kementerian Pelajar Malaysia.
- Darus Ahmad, 1960, **Raja Haji Pahlawan Terbilang**, Semaran, Bros Limited, Bukit Mertajam PW.
- Ghalib, Wan, 1980, **Sejarah Kotamadya Pekanbaru**, Pemda Kotamadya Pekanbaru.
- Harrison, Brian, 1954, **South East Asia, A Short History** Millan & Co. Ltd.
- Hamka, 1974, **Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao**, Jakarta bulan bintang.
- Hadidjojo, 1981, **Analisa Variabel Berganda**, UI, Jakarta.
- Joginder Singh Yessy, BA. Hons, Dip Ed. Disunting Haji Ahmad bin Haji Saleh, BA, Hons, Cert. In Ed, 1979, **Sejarah Tanah Melayu (1400 — 1959)**, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajar Malaysia Kuala Lumpur.

Kolonial Verslag, 1917, 1919.

Maxwell, W.E. 1891, Raja Haji Imbras, Selangor.

Muhammad Saad, Haj, **Mengenang Raja Haji Sutawijaya. Pahlawan Malaysia atau Pahlawan siapa-siapa**, Waspada 9 Februari 1978.

Muchtar Lutfi, et, al (ed) 1977, **Sejarah Riau**, Percetakan Riau Pekanbaru.

Muhidin Said, **Rokan, Tuanku Tambusai Berjuang**, Bukittinggi Sri Dharma.

M.A. Efendi BA. dkk, 1979, **Sejarah Riau Lingga**, Pekanbaru, Proyek Pengembangan Permusiuman Riau.

--- 1978 **Peninggalan Sejarah dan Purbakala-Daerah Riau**, Pekanbaru Kanwil Dept. P dan K Propinsi Riau.

Muhammad Raja, 1964, **Perang Padri di Sumatra Barat 1821 - 1831** Jakarta, PN Balai Pusataka.

Mans Oer MD, Drs. Cs, 1970 **Sejarah Minang Kabau**, Jakarta.

Nurbahri Yusuf, 1980, **Sejarah Perlawanan Pisik di Riau**, Pekanbaru, Pekanbaru (Nasuah).

Nahar Effendi BA, Haji Cs, 1980 **Riau Selayang Pandang**, Pemda Tk. I Riau.

Suwardi Ms dkk, 1981 **Raja Haji Marhum Telok Ketapang Melaka Calon Pahlawan Nasional**, draft, Proyek IDSN Dept. P dan K Pekanbaru.

Suwardi Ms dkk, 1982, **Pemetaan Suku Bangsa dan Deskripsi Kebudayaan Propinsi Riau**, draft, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Dept. P dan K.

Suwardi Ms dkk, 1982, **Sejarah Perlawanan Terhadap Inperealisme dan Kolonialisme di Riau**, Dept. P dan K Direktorat Sejarah dan nilai Tradisional, Proyek IDSN 1981/1982, Jakarta.

Volk Steeling, 1930..

MASAALAH KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA

Oleh :

Dr. Nico S Kalangie

I. PENDAHULUAN

Makalah ini membicarakan mengenai masalah komunikasi antar budaya. Namun uraian terbatas pada gambaran umum tentang ruang lingkupnya, beberapa konsep, dan suatu pendekatan analisis yang mungkin dapat dikembangkan untuk diterapkan dalam penelitian di negara kita.

Dalam kegiatan penelitian yang dijalankan di Indonesia masalah ini belum mendapat perhatian secara tersendiri dan mendalam oleh ahli-ahli ilmu sosial. Namun demikian, bukanlah berarti bahwa kita telah ketinggalan waktu untuk mulai secara mendalam meneliti masalah ini yang hasilnya tidak dapat disangkal akan sangat berguna bagi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kesatuan bangsa, peningkatan kebudayaan nasional, maupun bagi program-program inovasi dalam rangka pembangunan di segala bidang.

Sesuai dengan tujuan seminar ini dapatlah diharapkan bahwa aspek sejarah dari masalah komunikasi antar budaya mulai mendapatkan perhatian sebagai lapangan penelitian yang tersendiri. Pernyataan ini didasarkan pada suatu pendirian bahwa berbagai segi dari masalah ini bersumber pada peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan historis yang dialami dalam suku bangsa, daerah, hubungan antar suku bangsa, serta dalam proses perkembangan negara kita sendiri.

Arti komunikasi. Terlepas dari berbagai definisi yang ada, di sini komunikasi diartikan sebagai proses penerimaan suatu orientasi berhubungan dengan seperangkat tanda-tanda informasi. Di sini pengertian informasi tidak hanya terbatas pada berita atau fakta-fakta atau pelajaran seperti yang diajarkan di sekolah atau isi dari suatu buku yang dibaca, tetapi juga mencakup setiap pesan yang mengurangi ketidak-tentuan atau yang berisi sejumlah kemungkinan alternatif dalam suatu situasi. Olehnya dalam pengertian ini dapat pula digolongkan ke dalam nya hal-hal seperti emosi, pendapat, bimbingan, dan persuasi. Informasi tidak usah dalam bentuk kata-kata yang diucapkan tetapi juga dalam bentuk makna-makna latent atau bahasa tak diucapkan. Makna informasi tidak harus mutlak identik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Kenyataannya adalah bahwa setiap individu atau kelompok dalam menghadapi suatu

informasi menanggapinya sesuai dengan kebutuhan dan tujuan sebagai hasil proses persepsinya serta mengartikannya dan menggunakannya dengan cara-cara tersendiri (Scramm 1972: 13).

Komunikasi didasarkan pada hubungannya yang dapat terjadi antara dua pihak, tidak usah dalam bentuk tatap muka. Seperti yang dikemukakan oleh Cooley bahwa banyak cara dan saluran untuk membawakan simbol-simbol, baik dalam arti ruang maupun waktu (Dikutip oleh Schramm 1972:14). Namun ada perbedaan yang jelas dalam kualitas antara hubungan komunikasi langsung dan dekat, dan tidak langsung dan berjarak jauh, atau antara seseorang yang hidup pada masa kini dengan suatu karya budaya bernilai tinggi yang berasal dari suatu masa lampau.

Apakah komunikasi itu berbentuk tatap muka atau tidak langsung atau dalam jarak waktu dan ruang yang besar, hubungan komunikasi mencakup tiga elemen, yaitu komunikator, pesan, dan penerima. Pesan dapat berupa suatu tanda atau sekumpulan tanda yang bagi pihak penerima dapat tidak mengandung arti apa-apa atau dapat disalahtafsirkan kalau pesan itu berada di luar kerangka pengetahuan budayanya. Dengan demikian persepsi dan respons yang diharapkan dapat terjadi kalau makna pesan dan pengetahuan budaya penerima tidak bertentangan, atau makna pesan sesuai dalam struktur budaya penerima. Tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa sekalipun proses ini tidak menghasilkan penolakan dari pihak penerima, tidak jarang makna pesan yang dipersepsikan oleh komunikator. Memang masalah perbedaan persepsi sebagai suatu faktor psikologis dalam proses komunikasi dapat lahir sebagai konsekuensi dari perbedaan kebudayaan masing-masing pihak.

Saya tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih jauh tentang arti komunikasi, selain untuk menunjukkan akan adanya kenyataan perbedaan-perbedaan kebudayaan yang merupakan salah satu faktor utama yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran proses interaksi komunikasi. Dengan demikian kita dapat mengerti bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok sosial berhubungan satu dengan lainnya. Secara khusus, perbedaan-perbedaan kebudayaan akan saya coba uraikan dalam masalah komunikasi antar budaya di bawah ini.

2. MASALAH KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

Komunikasi antarbudaya adalah komunikasi antara orang-

orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Tingkat perbedaan kebudayaan dapat berbeda-beda dari yang paling kecil sampai pada yang paling besar. Komunikasi antarbudaya merupakan proses interaksi yang kompleks akibat perbedaan komunikator sedang pada saat berikutnya langsung sebagai penerima, karena tindakan memberi pengertian makna pesan langsung diikuti oleh penerimaan respons sebagai umpan balik dari pihak penerima. Proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama dan/atau berulang-ulang.

Komunikasi antarbudaya sebagai suatu lapangan penelitian dapat dipelajari sebagai proses yang mencakup tiga komponen: pikiran, pengertian (pemahaman), dan media (Sitaram 1972-22). Pikiran komunikator dan penerima, sedikit atau banyak, adalah produk dari kebudayaan mereka. Demikian pula, hampir seluruh dari kemampuan pemahaman dan media mereka adalah pula produk kebudayaan mereka. Simbol-simbol komunikasi yang dipergunakan baik untuk menyampaikan maupun mengartikan pesan dan umpan balik secara esensial adalah juga berdasarkan pada kebudayaan mereka. Dalam situasi komunikasi intrabudaya, tindakan memberi dan diberi pengertian makna pesan adalah kurang rumit dari pada dalam situasi komunikasi antarbudaya. Jelasnya, dalam komunikasi antarbudaya pihak-pihak yang berinteraksi adalah sebagai anggota-anggota dari sistem-sistem sosial budaya yang satu dengan lainnya berbeda. Setiap pihak dipengaruhi oleh pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan norma atau adat, yang menentukan peranan-peranan dalam proses interaksi.

Sebenarnya dalam membicarakan komunikasi antarbudaya tidaklah seharusnya dipisahkan dari komunikasi intrabudaya. Komunikasi intrabudaya merupakan kenyataan interaksi yang terjadi antara anggota-anggota dari suatu sistem sosial budaya yang sama, baik dalam konteks komunitas kecil dan desa maupun dalam konteks yang lebih luas, seperti kota, subsukubangsa, dan suku bangsa umumnya. Kita juga dapat menemukan masalah-masalah komunikasi intrabudaya, seperti antar sub-suku bangsa dan antar kelompok sosial yang bertentangan (*factionalism*), namun hal ini lebih menonjol terlihat di kalangan pihak-pihak yang berbeda kebudayaan dan lebih jelas lagi antara sukubangsa-sukubangsa pribumi dan kalangan minoritas keturunan asing, terutama golongan Cina. Komunikasi antar-etnik dapat merupakan pula komunikasi antarbudaya, namun pengertian komunikasi antarbudaya lebih luas karena mencakup juga pihak-pihak atau sistem-sistem sosial budaya nonetnik,

seperti kebudayaan birokrasi pemerintahan, program pembangunan, organisasi formal, kelompok pendatang asing (seperti para turis dan pegawai asing pada berbagai perusahaan), dan lain-lainnya.

Ada banyak variabel yang dapat diidentifikasi dalam proses komunikasi yang nilainya ditentukan, paling kurang sebagian, oleh kebudayaan dari masing-masing pihak. Variabel-variabel ini mampu mempengaruhi persepsi dan makna yang dimaksudkan yang dibawakan dalam tindakan-tindakan komunikatif. Untuk ini Porter (1927:6) mengemukakan 8 variabel : 1) sikap, 2) organisasi sosial, 3) pola berpikir, 4) persepsi peranan, 5) bahasa, 6) penggunaan dan organisasi ruang, 7) konseptualisasi waktu, dan 8) ekspresi nonverbal. Perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataan variabel-variabel ini saling bertumpang tindih dan satu dengan lainnya berinteraksi. Demikian pula satu dengan lainnya dapat bekerja sama atau sebaliknya saling berlawanan dalam mempengaruhi perilaku komunikasi masing-masing pihak. Isolasi dari variabel-variabel ini semata-mata hanya diperlukan untuk menganalisis masalah komunikasi.

Sikap. Sikap adalah keadaan psikologis yang memberi kecenderungan atau mempengaruhi cara-cara bertindak dalam berbagai peristiwa sosial atau dalam berhadapan dengan suatu kenyataan dalam lingkungan. Sikap tidak hanya mempengaruhi perilaku aktual, tetapi juga dapat mengakibatkan perubahan persepsi, dalam arti menginterpretasi kejadian sedemikian rupa sehingga cocok dengan predisposisi seseorang. Oleh Porter, sikap yang mempengaruhi komunikasi antarbudaya dikategorikan ke dalam: etnosentrisme, pandangan dunia, nilai absolut, stereotip, dan prasangka.

Organisasi sosial. Setiap organisasi sosial, merupakan konteks dimana sistem budaya atau subbudaya mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Kualitas pengaruh ini berbeda-beda dari satu organisasi sosial dengan lainnya; olehnya, perilaku komunikasi antara anggota-anggota suatu organisasi sosial dengan lainnya menunjukkan perbedaan. Dalam kenyataan setiap orang berperan dalam berbagai organisasi sosial. Kenyataan ini pula menunjukkan bahwa perilaku komunikasi seseorang pada suatu saat ditentukan oleh konteks organisasi sosial tertentu di saat mana ia sedang menjalankan peranannya.

Pola berpikir. Bentuk pemikiran yang umum dalam suatu masyarakat adalah aspek lainnya dari kebudayaan yang mempengaruhi persepsi. Olehnya, perbedaan pola berpikir merupakan faktor lain yang mempersulit komunikasi antarbudaya.

Persepsi peranan. Pengertian peranan adalah penting dalam komunikasi antarbudaya karena perananan-perananan apa yang diharapkan dan ditentukan untuk suatu kegiatan dalam suatu masyarakat berbeda dari masyarakat lainnya secara budaya.

Bahasa. Dalam hal ini pengertian bahasa tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masing-masing pihak yang berinteraksi. Masalah utama dari perbedaan bahasa adalah terjadinya perbedaan persepsi makna dari pesan dalam proses komunikasi.

Penggunaan dan organisasi ruang. Kebudayaan-kebudayaan seringkali memberi makna-makna yang tidak sama terhadap jarak antardiri yang sama. Secara disadari atau tidak ruangan diatur sebagai suatu fungsi dari kebudayaan yang bersangkutan dan sering kali merupakan suatu cara komunikasi nonverbal.

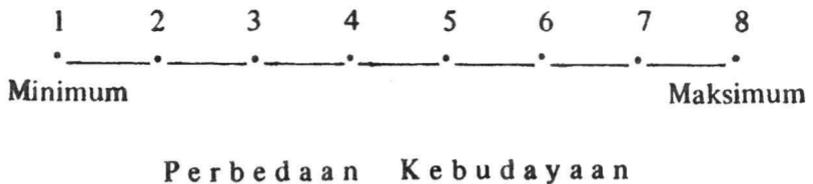
Konseptualisasi waktu. Umumnya setiap kebudayaan mempunyai cara tersendiri dalam mengkonseptualisasikan waktu. Ada masyarakat atau kelompok yang menggunakan waktu sekarang sebaik mungkin untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Ada yang hanya memementingkan saat sekarang sedangkan masa depan tidak perlu diperhatikan, dan sebagainya. Contoh lainnya yang mempengaruhi komunikasi antarbudaya adalah aturan kecepatan berbicara. Apa yang lebih dapat diterima oleh suatu masyarakat, berbicara secara cepat atautkah secara lambat? Apakah berbicara dengan suara nyaring dapat diterima dalam masyarakat ini? Apa reaksi dalam masyarakat kalau seseorang menjawab suatu pertanyaan secara cepat atau spontan? Dan bagaimana pula kalau ia menyampaikannya secara lambat sekali?

Ekspresi nonverbal. Ekspresi nonverbal merupakan suatu variabel budaya yang juga mempengaruhi proses persepsi dalam komunikasi antarbudaya. Kebudayaan menentukan bentuk pesan-pesan nonverbal apa yang dapat dilakukan serta keadaan yang sesuai untuk melahirkan ekspresi beserta batas-batasnya.

3. SKALA PERBEDAAN KEBUDAYAAN MINIMUM - MAKSIMUM

Untuk menentukan perbedaan-perbedaan kebudayaan dari kesatuan-kesatuan sosial yang ada dalam suatu wilayah tertentu mungkin ada baiknya menggunakan kerangka yang dikemukakan oleh Porter (1972:4), yaitu kerangka Skala Dimensi Minimal Maksimal (Gambar 1). Kelompok-kelompok yang sudah di pelajari perbedaan-perbedaan kebudayaan mereka ditempatkan pada titik-titik skala dari yang minimal di sebelah kiri sampai

pada yang maksimal di sebelah kanan. Skala ini dapat menguji tindakan-tindakan atau perilaku komunikasi antarbudaya dan olehnya dapat dipahami pula akibat-akibat dari perbedaan kebudayaan dari kelompok-kelompok sosial dalam wilayah tertentu. Setiap titik skala menunjukkan dikotomi perbedaan kebudayaan antara satu kelompok sosial dengan lain-lainnya. Jenis-jenis kelompok sosial apa yang digolong-golongkan dalam skala tergantung pada banyaknya kelompok sosial yang menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan kebudayaan yang menonjol atau yang ada pengaruhnya terhadap komunikasi antarkelompok. Kelompok-kelompok ini disusun satu terhadap lainnya berdasarkan pada banyaknya variabel-variabel perbedaan dan intensitas perbedaan. Dengan demikian kita akan mendapati bahwa dikotomi perbedaan pada titik paling ujung di sebelah kanan (8) adalah yang paling banyak memiliki faktor-faktor perbedaan kebudayaan. Makin jauh suatu titik lainnya dari titik maksimum ini makin kurang jumlah faktor-faktor perbedaan kebudayaan dan olehnya makin kurang hambatan-hambatan dialami dalam komunikasi mereka. Titik yang paling akhir di sebelah kiri (1) menunjukkan bahwa perbedaan kebudayaan antara kelompok-kelompok sosial yang digolongkan ke dalam titik ini adalah yang paling kurang (minimum). Dengan kata lain, mereka paling banyak memiliki faktor-faktor persamaan kebudayaan.



Gambar 1

4. SUATU PENDEKATAN DALAM MEMPELAJARI KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

Dalam mempelajari masalah komunikasi antarbudaya dalam suatu wilayah secara lebih teliti sebaiknya kita menggunakan suatu pendekatan analitik untuk dapat menjelaskan, terutama, pola-pola hubungan antarkelompok dan antardiri dalam komunikasi antarbudaya. Kecuali itu kita dapat juga menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pola-pola komunikasi antarbudaya. Tentu ada banyak pendekatan yang dapat dipergunakan untuk mempelajari masalah ini. Di sini saya

mengajukan pendekatan yang dikembangkan oleh Rich dan Ogawa (1972) dengan modifikasi yang saya adakan. Pendekatan ini dapat dipakai untuk menganalisis lebih lanjut penjelasan perbedaan kebudayaan dalam skala tersebut di atas, tetapi dengan mempersempit ruang lingkup masalah, atau dapat dipakai secara tersendiri.

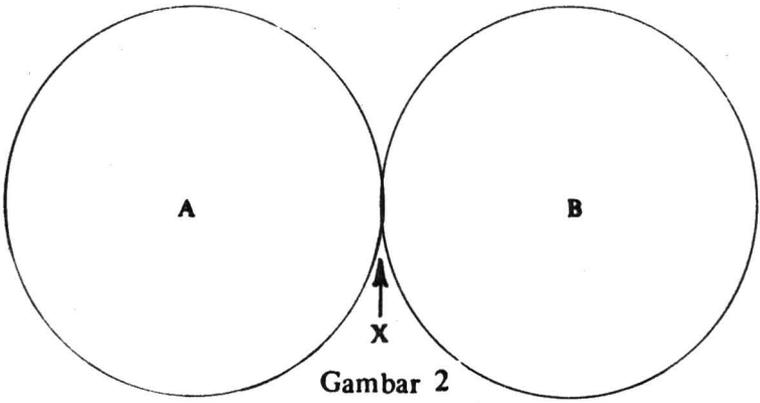
Dasar dari pendekatan ini adalah mempelajari dan menjelaskan dua pertanyaan utama : 1) Pola-pola dan hubungan antarkelompok dan antardiri apakah yang tidak memperlancar komunikasi antar budaya? Sebaliknya, apakah yang tidak menghambat komunikasi antarbudaya; 2) Faktor-faktor utama apakah yang dapat mempengaruhi pola-pola komunikasi antarbudaya? Kami tidak bermaksud untuk menguraikan secara mendalam metodologi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat menjadi dadasar perencanaan penelitian, dalam kesempatan ini. Saya menganggap cukup dalam kesempatan ini untuk mengemukakan asumsi-asumsi sehubungan dengan pertanyaan tersebut, tanpa keinginan untuk mencari jawabannya tanpa suatu penelitian yang baik.

1. Pola-pola dan hubungan antarkelompok dan antardiri.

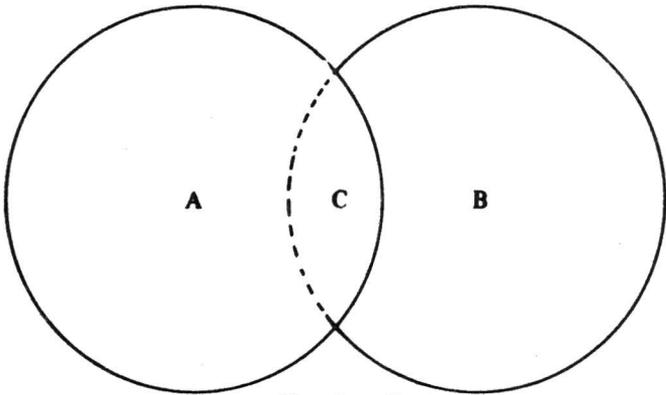
Sekurang-kurangnya kita dapat menjumpai 4 bentuk interaksi kelompok yang dapat menjelaskan masalah hubungan antarbudaya di negara kita.

1.1 Bentuk komunikasi dari beberapa sukubangsa atau kelompok sosial budaya lain dengan perbedaan kebudayaan yang jelas dan dengan kedudukan yang sama atau tidak ada daripadanya yang memiliki kebudayaan yang mampu mendominasi/mempengaruhi sebagian warga kelompok lain. Pihak-pihak yang berkomunikasi dapat atau tidak memiliki sistem simbolik dalam komunikasi antarbudaya. (Lihat Gambar 2). Kalau memiliki sistem simbolik ini maka tanda X dalam diagram berfungsi.

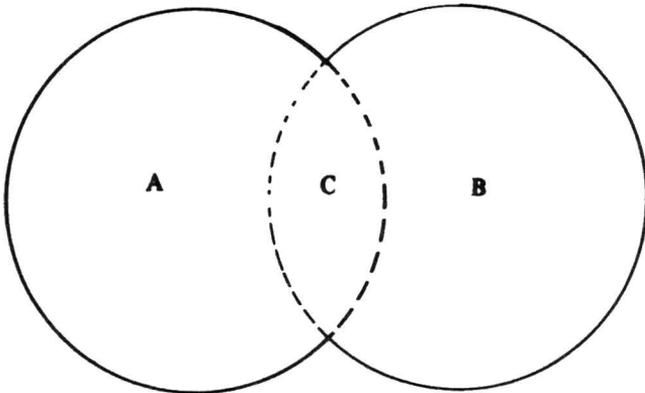
1.2. Salah satu dari kebudayaan kelompok-kelompok tersebut pada butir 1.1 di atas adalah dominan. Dalam situasi seperti ini ada sebagian dari anggota-anggota kelompok lain (tidak dominan) yang berkedudukan golongan minoritas di tengah-tengah masyarakat yang berkebudayaan dominan itu (Gambar 3). A dominan, B tidak dominan, dan C minoritas.



Gambar 2



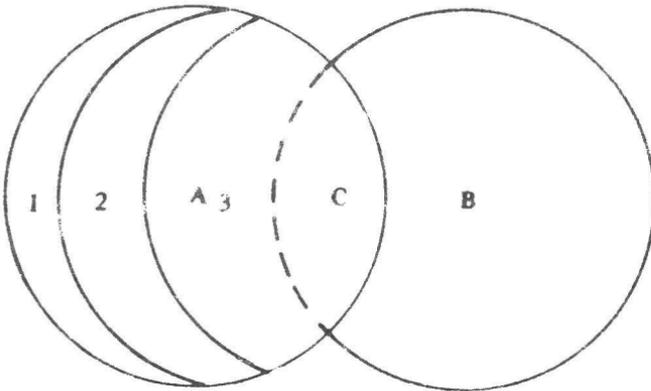
Gambar 3



Gambar 4

1.3 Bentuk ini menunjukkan bahwa kedudukan dari kedua kebudayaan (A dan B) sama-sama tidak dominan. Sebagian dari warga kedua kelompok ini sama-sama mendiami suatu daerah tertentu, terutama seperti yang dapat dijumpai di kota-kota. Kota yang sama-sama mereka tinggali bukan merupakan daerah kelompok sosialnya. Dengan demikian tidak ada warga daripadanya yang merasa sebagai golongan minoritas dalam lingkungan hidup mereka ini. (Gambar 4).

1.4 Sehubungan dengan butir 1.2 di atas (Gambar 3), anggota-anggota dari masyarakat yang memiliki kebudayaan yang dominan dalam lingkungan itu sebenarnya dapat terdiri dari berbagai subetnik atau kelompok sosial lain, dimana satu dengan lainnya menunjukkan perbedaan kebudayaan secara khusus (subbudaya-subbudaya). Pada Gambar 5, kebudayaan dominan ini terlihat terbagi ke dalam bagian-bagian subbudaya.

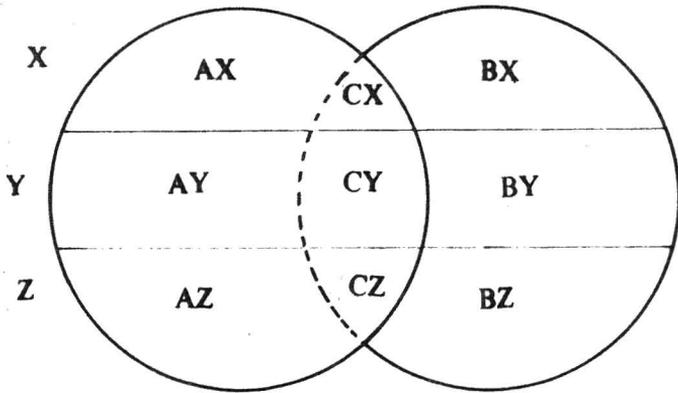


Gambar 5

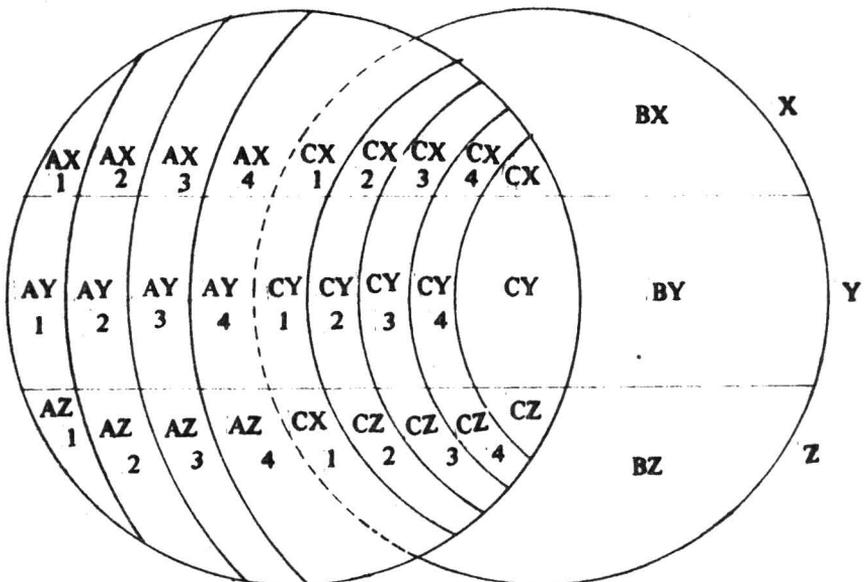
2. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pola-pola komunikasi antarbudaya.

Untuk menguji perbedaan-perbedaan kebudayaan yang mempengaruhi komunikasi antara individu-individu kita dapat menyusun suatu hipotesa mengenai akibat-akibat dari perkembangan ekonomi dan kenyataan-kenyataan pelapisan sosial terhadap komunikasi antarbudaya. Kita mengetahui bahwa kedudukan seseorang dalam suatu lapisan sosial tidak semata-mata ditentukan oleh posisi ekonomis yang ia miliki tetapi juga oleh alasan-alasan lain, seperti pendidikan, ke-

tokohan keagamaan dan kegiatan-kegiatan sesoai lain, senioritas, keturunan, dll. Sekedar untuk mempermudah penguraian dalam makalah ini kedua faktor ini saya gabungkan, dan pula pelapisan sosial disederhanakan dengan hanya menentukan 3 lapisan sosial yang tentunya sifatnya menjadi sangat umum. Pada Gambar 6 di bawah ini tanda X adalah lapisan atas, Y lapisan tengah, dan Z lapisan bawah.



Gambar 6



Gambar 7

AX, CX dan BX adalah orang-orang yang menduduki lapisan atas; AY, CY, dan BY orang-orang yang menduduki lapisan tengah; dan AZ, CZ, dan BZ orang yang menduduki lapisan bawah.

Dari struktur ini ada beberapa pertanyaan yang dapat timbul yang dapat diterjemahkan ke dalam hipotesa-hipotesa yang dapat diuji dalam penelitian lapangan. Misalnya, apakah seorang Jawa di Semarang yang tergolong kelas AX akan merasa lebih senang dan berhasil memperoleh respons yang diinginkan (dalam rangka usaha dagang) dari seorang Batak CX di kota yang sama? Kalau tidak, apakah alasannya karena perbedaan sukubangsa, atau karena bukan anggota kerabat, atau bukan kawan, atau karena alasan lain-lain lagi. Untuk tujuan yang sama atau lainnya, apakah ia juga mau berhubungan dengan seorang AY (dari lapisan tengah, seperti seorang pegawai negeri golongan pangkat menengah) atau dari seorang AZ (lapisan bawah, seperti seorang buruh tani). Kalau ia mau, mengapa dan apa tujuannya; dan kalau ia tidak mau apa pula alasannya. Apakah seorang pedagang kaya asal Bali di Denpasar (AX) mengalami keuntungan yang lebih besar karena ia bekerja sama dengan seorang pedagang besar asal Jawa yang bermukim di Surabaya (BX) daripada dengan pedagang besar lainnya yang juga berasal dari Jawa tetapi yang telah menetap di Denpasar (CX)? Apapun jawabannya, alasan-alasan dari jawaban merupakan data yang penting untuk dipelajari.

Pertanyaan lainnya adalah, seperti: apakah ketegangan dalam komunikasi antarbudaya yang disebabkan oleh kenyataan situasi dalam daerah C akan berkurang pada saat seseorang dari daerah C berhasil naik pada lapisan yang lebih tinggi? Apakah mobilitas seseorang dari daerah C ke daerah A dapat terjadi dengan mudah, atau tidak mungkin, atau sulit sekali?

Berpangkal pada Gambar 5 dan 6, Gambar 7 merupakan gabungan variasi-variasi etnik, ekonomis, dan sosial, yang mempengaruhi sikap dalam mana individu-individu dalam suatu masyarakat kompleks dapat berinteraksi. Parameter-parameter ABC menunjukkan kelompok-kelompok etnik, sedangkan parameter-parameter XYZ menunjukkan sistem lapisan sosial. Angka-angka 1234 dalam lingkaran A menunjukkan kelompok-kelompok sub etnik atau lainnya. Makin besar angka tersebut makin kecil posisinya dalam lingkaran A, atau kelompok ini makin dapat dianggap kurang memiliki ciri-ciri sosial budaya dari masyarakat A. Angka-

angka 1234 dalam lingkaran C hanya menunjukkan berbagai kelompok dari masyarakat yang nondominan.

5. PERANAN PENELITIAN SEJARAH LOKAL

Dalam rangka penelitian sejarah lokal kita perlu pula memperhatikan aspek masalah komunikasi antarbudaya dari sukubangsa-sukubangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang terdapat pada setiap daerah atau wilayah. Peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan apa saja yang terdapat dalam lingkungan masyarakat ini yang memberi keterangan mengenai sebab-akibat dari terganggunya komunikasi intra sukubangsa atau komunikasi antara sukubangsa yang satu dengan lainnya; atau sebaliknya, yang memberi keterangan mengenai adanya komunikasi atau hubungan yang baik di kalangan mereka.

Peristiwa-peristiwa dan kenyataan-kenyataan tersebut dapat berbentuk perlawanan terhadap penguasa-penguasa penjajahan, berbagai gerakan dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa, pengaruh-pengaruh dari satu atau beberapa agama dunia, akibat-akibat dari pelaksanaan sistem penjajahan yang intensif, perkembangan pendidikan formal, penerapan sistem ekonomi penjajahan dan perkembangan perekonomian modern, pertentangan-pertentangan intrasukubangsa, dsb.

6. KESIMPULAN

Penelitian mengenai berbagai masalah komunikasi antarbudaya tidak dapat dipisahkan dari masalah-masalah intrabudaya. Karena dalam kenyataan, suatu masyarakat apakah itu suatu sukubangsa atau suatu komunitas pedesaan yang kecil tidak hanya memiliki ciri-ciri atau unsur-unsur sosial budaya yang sama atau umum, tetapi juga menunjukkan adanya variasi-variasi intrabudaya menurut apa yang diperlihatkan sebagai perilaku warga masyarakat itu sendiri.

Komunikasi antarbudaya mencakup adanya pihak komunikator dan pihak penerima pesan dimana perbedaan kebudayaan mereka bervariasi dari yang paling besar sampai ke paling kecil. Prinsip-prinsip komunikasi antarbudaya dapat diterapkan pada berbagai situasi, termasuk komunikasi inovasi dari berbagai program pembangunan. Adalah variabel-variabel situasional yang mempengaruhi proses interaksi, bukan hanya ketrampilan komunikator dan kemampuan teknologi yang menyertainya.

Bahwa hambatan-hambatan utama dalam komunikasi antarbudaya bersumber pada perbedaan-perbedaan persepsi sosial, disebabkan oleh variasi-variasi kebudayaan dari pihak dalam proses interaksi komunikasi.

Membicarakan masalah komunikasi antarbudaya dengan suatu pendekatan konseptual mempermudah kita untuk melihat kenyataan-kenyataan multidimensional. Cara demikian akan menghasilkan pengertian yang lebih baik mengenai interaksi antara berbagai faktor.

Akhirnya, komunikasi antarbudaya merupakan suatu lapangan studi yang bukan hanya menyangkut segi seni dan proses komunikasi antara kebudayaan-kebudayaan, tetapi juga mencakup berbagai faktor kebudayaan yang turut membentuk seni itu dan yang mempengaruhi proses itu sendiri (Sitaram 1972 : 23).

DAFTAR KEPUSTAKAAN YANG DIKUTIP

Porter, Richard E.

- 1972 An Overview of Intercultural Communication. **Dalam** Larry A. Samovar dan Richard E. Poter (eds), Intercultural Communication : A Reader. Belmont : Wadsworth Publishing.

Rich, Andrea dan Dennis M. Ogawa

- 1972 Intercultural and Interracial Communication : An Analytical Approach. **Dalam** Larry A. Samovar dan Richard E. Porter (ed.), Intercultural Communication : A Reader. Belmont : Wadsworth Publishing.

Schramm, Wilbur

- 1972 The Nature of Communication between Humans. **Dalam** Wibur Schramm dan Donald R. Roberts (eds.), The Process and Effects of Mass Communication. Urbana : University of Illinois.

Sitaram, K.S.

- 1972 What is Intercultural Communication? **Dalam** Larry A. Samovar dan Richard E. Poter (eds.), Intercultural Communication : A Reader. Belmont : Wadsworth Publishing.

PENDUDUK BUKITTINGGI SEBELUM PERANG

Sebuah Kerangka Studi *

Oleh :
JR. Chaniago
Arsip Nasional RI.

1. GAMBARAN UMUM.

a. Lokasi dan Pemerintahan.

Bukittinggi terletak pada koordinat $0^{\circ} 2'S - 0^{\circ} 29'S$ Lintang Selatan dan $99^{\circ} 52' - 100^{\circ} 33'$ Bujur Timur. Kota ini terletak pada 927 M di atas permukaan laut, beriklim sejuk dan merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan luas 5,2 Km² (Tahun 1930). Saat ini merupakan Daerah Tingkat II dengan status Kotamadya dalam Propinsi Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi merupakan simpang tiga yang menghubungkan Padangpanjang, Solok dan Padang di sebelah Barat daya, Payakumbuh di Timur laut, dan jurusan ke Bonjol, Lubuksikaping, Padangsidempuan di utara. Pada kota ini pula terdapat jalan Kereta Api yang menghubungkan Payakumbuh dengan Padangpanjang ke Solok atau ke Padang. Karena letaknya yang cukup tinggi dari laut maka kereta api di sekitar ini memakai rel gigi, dan kota Bukittinggi sendiri seolah-olah bertingkat dua, yakni Pasar di Atas dan Pasar di bawah.

Sesuai dengan struktur pemerintahan Hindia Belanda, maka Sumatera mempunyai seorang Gubernur yang berkedudukan di Medan. Kota-kota besar seperti Medan, Padang, dan Palembang di kepalai oleh seorang Walikota (Burgemeester). Khusus untuk Pematang Siantar dan Bukittinggi (Fort de Kock diperintah oleh seorang **Fungerand Burgemeester** (pejabat Walikota), yang untuk Fort de Kock dirangkap oleh Asisten Residen Agam, yang bertanggungjawab kepada Residen Sumatera Barat di Padang. Di bawah Asisten Residen terdapat controleur yang mengepalai onder afdeling. Setelah itu terdapat tiga tingkatan lagi yang Districtshoofd (demang), onder districtshoofd (asisten demang), dan yang paling bawah adalah Nagarihoofd (kepala Nagari). Controleur ke atas dipegang langsung oleh orang Belanda, sedangkan Demang, asisten Demang, dan Kepala Nagari diserahkan kepada Bumi Putra.

Di bawah **afdeling** Agam terdapat lima **onderafdeling**, salah satu di antaranya adalah **onderafdeling Oud Agam** (Agam Tua) yang diperintah oleh seorang **controleur**. **Onderafdeling Oud Agam** mempunyai dua **district**, yakni **district Bukittinggi** dan **Distrcet Tilatang - IV Angkat**.

District Bukittinggi dibagi lagi atas dua **onder-district** yakni **Sarik - Bukittinggi** dan **onderdistrict IV Koto**. **District Bukittinggi** dipegang oleh seorang **Demang**, dan **onderdistrict** oleh **asisten Demang**.

Dibawah **onderdistrict Sarik - Bukittinggi** terdapat dua **Nagari** yakni **Banuhampu/Sungai Puar** dan **Nagari Bukittinggi**. **Nagari Banuhampu/Sungai Puar** mempunyai 11 **Jorong** yakni : **Sarik, Sungai Puar, Batu Palano, Ladang Lawas, Batagak, Padang Luar, Pakan Sinayan, Cingkaring, Taluk, Padang Lawas, dan Kubang Putih**. Sedangkan **Nagari Bukittinggi** mempunyai lima **jorong** yakni : **Guguk Panjang, Tigo Baleh, Koto Selatan, Mandiangin, dan Aur Birugo**.

Di bawah **Onderdistrict IV Koto** terdapat **Nagari IV Koto** dengan 8 **Jorong** yakni: **Koto Tuo, Koto Panjang, Sungai Landir, Balingka, Malalak, Guguk Tabek-tabek Rajo-rajo, Kota Gadang, dan Sianok**.¹⁾

Dengan susunan tersebut terlihat bahwa **Bukittinggi** merupakan sebuah **District** yang diperintah oleh seorang **Demang**, tetapi juga sekaligus diperintah oleh **Walikota** yang langsung dijabat oleh **Asisten Residen**. Susunan ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Kalau sebelum dikeluarkan **Nagari Ordonantie** tahun 1915 no. 356 **Bukittinggi** berada di bawah **Luhak Agam**. Karena menurut pemerintahan adat **Minangkabau** terdapat **Tiga Luhak** dan dua **Laras**. Selain **Luhak Agam**, dua **luhak** lainnya adalah **Tanah Datar** dan **Lima Puluh**.²⁾ Menurut **Staatsblad 1918 No. 310** **Bukittinggi** menjadi **Kotapraja** yang diperintah seorang **Pejabat Walikota** dan mempunyai **Gemeenteraad** yang berjumlah 9 orang, yakni 5 orang **Eropa**, 3 orang **Indonesia**, dan 1 orang yang mewakili **Timur Asing**.³⁾

b. Lingkungan Sosial.

Lingkungan sosial masyarakat **Bukittinggi** antara lain ditentukan oleh komposisi penduduknya ketika itu. Lingkungan sosial itu merupakan keadaan di mana hubungan-hubungan antara manusia diwujudkan untuk me-

menuhi berbagai kebutuhan mereka seperti psikologis, ekonomis dan sebagainya. Menurut sensus penduduk yang diadakan pada tahun 1930 tercatat bahwa penduduk Sumatera Barat berjumlah 1.919.109 orang, dengan perincian sebanyak 1.896.710 bumi putra, 14.885 Cina, 5.172 orang-orang Eropah, dan 2.342 timur asing lainnya. Dari jumlah tersebut sebanyak 434.208 orang berdiam di afdeling Agam di mana penduduk Bukittinggi berada di dalamnya. 4)

Kalau dilihat dari enam kota-kota penting di Sumatera Barat, seperti Padang, Bukittinggi, Solok, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Sawah Lunto, maka gambaran persebaran penduduk saat itu adalah : 5)

- a. Penduduk bumi putera berdiam di kota Padang sebanyak 40.696 orang, Sawah Lunto 13.967 orang, Bukittinggi 13.015 orang, Padang 8.944 orang, Solok 5.894 orang, dan Payakumbuh 4.959 orang.
- b. Orang-orang Eropa berdiam di Padang sebanyak 2.622 orang, Bukittinggi 547 orang, Sawah lunto 517 orang, Padang Panjang 293 orang, Solok 50 orang dan Payakumbuh 29 orang.
- c. Orang Cina di Padang berjumlah 7.204 orang, Payakumbuh 870 orang, Bukittinggi 812 orang, Sawah Lunto 638 orang, Padang Panjang 376 orang, dan Solok 215 orang.
- d. Timur Asing lainnya terdapat di Padang sebanyak 1.456 orang, Bukittinggi 283 orang, Payakumbuh 58 orang, Solok 55 orang, Padang Panjang dan Sawah Linto masing-masing 25 orang.

Memperhatikan data-data penduduk ke enam kota tersebut kelihatan bahwa Padang merupakan kota terpadat dibanding dengan lima kota lainnya. Dan Bukittinggi kecuali untuk penduduk Cina, menduduki ranking kedua dari kepadatan penduduk di enam kota di Residensi Sumatera Barat.

Khusus untuk Bukittinggi maka gambaran penduduk adalah sebagai berikut : 6)

Tabel

Tahun	Bumi Putera		Eropa		Cina		Timur Asing Lainnya		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	L	
1920	2.423	1.476	225	174	319	214	90	83	5.004
1930	7.218	5.797	266	281	473	339	147	136	14.657
1934	7.220	5.792	310	310	461	328	147	136	14.704

Pencatatan kenaikan jumlah penduduk tidak teratur dibuat oleh petugas Hindia Belanda. Data statistik yang dimuat *Indische Verslag* tahun 1934 sama dengan data tahun 1932, dan 1933. Begitu juga data *indisch Verslag* tahun 1934 sama dengan tahun 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, dan 1941. Namun demikian dari data yang sedikit itu akan kelihatan bahwa penduduk Bumi Putera menduduki 88,80% dari keseluruhan penduduk Bukittinggi. Menyusul Cina 5,54%, Eropa 3,73% dan Timur Asing lainnya 1,93%. Dari jumlah keseluruhan penduduk Bukittinggi terdapat 4.587 remaja dan 6.457 dewasa atau sekitar 84,89% dari keseluruhan penduduk. Dengan demikian pada tahun 1930 anak-anak di bawah umur hanya berjumlah 15,11 % saja, suatu perbandingan yang sangat menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Untuk setiap 100 orang penduduk laki-laki yang dewasa terdapat 30,9% yang masih bujangan, 63% sudah kawin, 1,8% duda, dan 4,2% bercerai. Sebaliknya untuk setiap 100 orang wanita dewasa terdapat 5,5% yang gadis, 70,7% sudah kawin, 13,2% janda, dan 10,6% bercerai dari suaminya. 7) Dari gambaran itu kelihatan bahwa jumlah pria yang belum kawin lebih banyak dari pada wanita. Sebaliknya jumlah duda atau laki-laki yang bercerai jauh lebih sedikit dibandingkan banyaknya janda dan wanita yang diceraikan suaminya. Jawaban dari ini sebagian terdapat dalam prinsip-prinsip adat dan sebagian dalam hukum agama, khususnya agama Islam. Sebagai contoh seorang muslim menurut hukum Islam boleh menikah dengan empat orang wanita, dan beberapa kebiasaan setempat malah memungkinkan kawin cerai, sehingga jumlah wanita muda akan lebih sedikit dari jumlah pria muda. Sebaliknya jumlah janda akan berlipat ganda dibanding dengan jumlah duda.

Seperti juga di tempat-tempat lain, di Bukittinggi juga sudah berkembang sekolah-sekolah. Sekolah pemerintah yang pertama didirikan adalah Kweek School (sekolah raja). Di samping itu juga terdapat sekolah swasta yang diurus baik oleh tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, dan sekolah Cina. Walaupun sekolah-sekolah sudah berkembang namun menurut catatan tahun 1920 baru terdapat sebanyak 863 orang laki dan 396 wanita yang bisa baca tulis. Dan pada periode 1930-an jumlah tersebut meningkat menjadi 2.478 laki-laki dan 488 wanita. Tentu saja yang dimaksud bisa baca tulis tidak dihitung mereka yang bisa membaca dan menulis huruf Arab⁸⁾ Dari jumlah tersebut pada periode tahun 1920-an terdapat 239 laki-laki dan 112 wanita yang bisa berbahasa Belanda. Jumlah ini berubah pada periode 1930-an menjadi 475 laki-laki dan 110 wanita yang bisa berbahasa Belanda. Hal itu berarti dari setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 7,19% yang bisa berbahasa Belanda.⁹⁾

Sebagian besar penduduk memeluk agama Islam. Namun demikian juga terdapat penduduk (khususnya Eropa dan sedikit Cina) yang memeluk agama lain. Menurut catatan tahun 1935 terdapat sebanyak 400 orang penduduk memeluk agama Katolik, dan 732 orang Protestan.¹⁰⁾ Sayangnya tidak ditemukan data mengenai mereka yang menganut agama Kong Fhu-Chu, Hindu-Budha dan sebagainya.

Mengenai tempat tinggal penduduk dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut. Penduduk desa pada umumnya tinggal di satu rumah gadang (rumah adat) sebagai induk dari beberapa rumah-rumah kecil lainnya di sekitarnya. Kecuali penduduk keturunan Cina yang relatif terkonsentrasi di dalam Jorong Koto Selayan (sekitar Jalan Ahmad Yani sekarang) dan penduduk Eropa di sekitar kantor-kantor pemerintahan, sebagian besar penduduk bumi putera bertebaran di pinggiran kota, dan relatif sedikit di dalam kota, kecuali karena profesinya yang memungkinkan harus tinggal dalam kota. Menurut catatan pada tahun 1930 terdapat sebanyak 368 rumah pusaka dan 626 rumah yang dibangun oleh satu keluarga batih atau keluarga luas yang tidak bersangkutan dengan rumah pusaka. Dalam istilah Minangkabau rumah seperti ini sering disebut sebagai rumah "pencarian". Di samping jumlah tersebut masih terdapat sebanyak 901 rumah yang dihuni oleh orang asing (Eropa, Cina,

dan Timur asing lainnya), serta 94 buah lainnya yang tidak diketahui. Semuanya berjumlah 1.989 buah rumah. 11)

Mata pencaharian penduduk, dimulai dari : bertani, berdagang, buruh (termasuk di dalamnya buruh tani, tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang emas, kusir bendi, penarik pedati, buruh pasar di toko dan penarik gerobak), pegawai negeri dan swasta, guru, usaha kincir padi dan sebagainya. Menurut sensus 1980 sawah penduduk dalam district Bukittinggi berjumlah 6650 bau. Hasil pertanian dibawa ke pusat perdagangan di pasar Bukittinggi, dan beberapa pasar-pasar kecil lainnya yang terdapat dalam District Bukittinggi. Pada dekade kedua abad ke 20 hampir setiap Nagari dan onderafdeling sudah ada pasar. Waktu itu pasar Bukittinggi sudah dikunjungi sekitar 40.000 orang pada setiap hari Rabu dan Sabtu. 12)

2. INTERAKSI DAN PEMBAURAN

Interaksi merupakan proses perubahan yang teratur, sebagai akibat dari proses pengaruh mempengaruhi. Interaksi sosial sering didahului oleh suatu kontak sosial. Dalam kegiatan interaksi diperlukan komunikasi, atau dengan kata lain komunikasi adalah alat dari interaksi, bahkan bisa terjadi interaksi merupakan akibat dari proses komunikasi, dalam hal ini suatu proses saling mempengaruhi dalam masyarakat yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat itu. 13)

Proses saling mempengaruhi antar berbagai ras dalam masyarakat Bukittinggi mempunyai sejarah tersendiri. Dengan orang Belanda misalnya lebih formal dan efektif setelah terjadinya Plakat Panjang pada tahun 1825 yang memungkinkan Belanda mendirikan benteng dengan nama Fort de Kock. 14) Sedangkan dengan orang Cina terkait panjang dengan proses penyebaran perantaraan Cina ke Sumatera sebagai akibat proses perkembangan ekonomi. 15) Hal yang sama juga berlaku antara Bumi Putera dengan penduduk Timur Asing lainnya.

Sampai dekade ketiga tahun 1900-an hubungan sosial antar bangsa itu telah berlangsung dalam berbagai aspek. Setidaknya lima aspek hubungan sosial telah terjadi: 16)

- a. dalam aspek kehidupan ekonomi;
- b. dalam aspek kehidupan sosial;
- c. dalam aspek kehidupan kekerabatan;
- d. dalam aspek kehidupan agama;

e. dan dalam aspek kehidupan bahasa.

Hubungan sosial dalam aspek kehidupan ekonomi memerlukan data-data kependudukan secara ekonomis. Tinggi rendahnya kehidupan ekonomi antara bangsa yang sedang mengalami proses interaksi menentukan pula hubungan sosial dalam bidang-bidang lain. Hubungan sosial dalam aspek kehidupan ekonomi antara orang-orang Belanda di Bukittinggi dengan masyarakat Bumi Putera pada periode 1930 – 1942 misalnya masih merupakan kelanjutan dari hubungan-hubungan yang telah berlangsung sebelumnya, antara lain hubungan antara si penerima pajak blasting, rodi dan sebagainya dengan si wajib pajak dan rodi. Beberapa pengecualian mungkin terjadi, umpamanya dengan berlakunya Nagari Ordonantie pada tahun 1915 di mana setiap Nagari diharuskan mendirikan Kerapatan Nagari yang terdiri dari sejumlah penghulu-penghulu terkemuka. Penghulu-penghulu yang terpilih ini kemudian dibebaskan dari pembayaran blasting, rodi dan sebagainya. ¹⁷⁾ Tetapi secara keseluruhan hubungan sosial dari aspek kehidupan ekonomi antara Bumi Putera dan orang Belanda adalah antara lain berupa hubungan antara si penerima dan si pembayar pajak blasting dan rodi. ¹⁸⁾ Sehingga dengan itu akan dapat dilihat perbedaan status dan tingkat kekayaan antara keduanya.

Mata pencarian penduduk Bumi Putera dan orang Cina di Bukittinggi relatif masih beragam pada periode ini. Di samping sebagai pedagang, pengusaha, dan usaha wiraswasta lainnya, pada sekitar tahun 1920-an sebagian orang Cina ada yang mengerjakan jenis-jenis pekerjaan yang relatif sama dengan bumi putera, seperti sebagai : mandor perkebunan, buruh perkebunan, buruh kereta api, tukang batu, tukang kayu, pandai besi dan sebagainya. Namun berbagai fasilitas dan kemudahan oleh pemerintah lebih banyak diberikan kepada orang Cina dari pada kepada Bumi Putera. Seorang buruh bumi putera pada satu usaha perkebunan milik orang Eropa dibayar antara 0,30 gulden – 0,40 gulden. Sebaliknya

pada jenis pekerjaan yang sama seorang buruh Cina dibayar antara 0,40 gulden sampai 0,50 gulden. Begitu juga seorang tukang batu/tukang kayu Bumi Putera dibayar 0,75 gulden sampai 1 gulden, sedangkan orang Cina dibayar antara 1 gulden sampai 1,50 gulden. ¹⁹⁾ Belum dapat diketahui kenapa perbedaan-perbedaan itu mesti terjadi.

Hubungan sosial antara orang Cina Timur Asing lainnya sebagai pedagang dan pengusaha di satu pihak, dan Bumi

Putera di pihak lain, lebih banyak merupakan hubungan buruh dengan majikan. Hal itu terlihat umpamanya dalam situasi di mana kaum Bumi Putera menjadi buruh atau pegawai pada toko-toko atau pengusaha-pengusaha orang Cina. Dengan hubungan Sosial pada aspek kehidupan ekonomi antara ketiga/empat golongan bangsa ini berada dalam situasi yang tidak sederajat. Dalam banyak hal Bumi Putera selalu berada pada lapisan yang terbawah. Begitu juga antara penduduk Bumi Putera dengan orang-orang Cina dan Timur Asing lainnya. Hal itu ditambah dengan kebijaksanaan Pemerintah kolonial yang menjadikan golongan Cina sebagai penghubung antara mereka dengan Bumi Putera. 20) Hal ini memungkinkan kemampuan keuangan golongan Cina jauh lebih baik dari Bumi Putera, yang pada gilirannya memunculkan rasa iri dan sebagainya. Pada masyarakat Bukittinggi satu kejadian kecil berikut ini dapat dijadikan contoh bagaimana perasaan Bumi Putera saat itu kepada orang-orang Cina. Satu ketika beras naik sampai 25 gulden per pikul. Demang Bukittinggi menyuruh setiap orang antri beras di kantor District. Dalam antri beras itu tidak terkecuali terdapat juga orang-orang Cina. Apa yang kejadian,; setiap orang Cina ini maju sesuai dengan gerak antrian, kira-kira ia hampir sampai di depan kemudian disikut orah orang-orang Bumi Putera yang ada di depannya dan ditendang kembali ke belakang. Tindakan seperti itu terus berulang berkali-kali. Kenapa hal itu muncul? Karena kaum Bumi Putera menganggap bahwa orang Cina itu tidak pantas ikut antri, sebab dengan kekuatan uangnya mereka akan sanggup membeli beras 25 gulden per-pikulnya. 21)

Data-data statistik antara tahun 1920-1942 tidak banyak membantu kita untuk mengetahui sejauh mana hubungan kekerabatan antar bangsa-bangsa di kota ini telah terjadi, umpamanya dalam bentuk kawin campur, adopsi, dan lain sebagainya. Dari semua penduduk keturunan asing di Bukittinggi dalam periode ini, yang sangat mungkin lebih lancar terjadi hubungan sosial dalam aspek kekerabatan adalah dari penduduk keturunan Arab dengan Bumi Putera. Faktor agama, khususnya Islam memungkinkan terjadinya ikatan kekerabatan ini.

Memperhatikan komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut terlihat bahwa mayoritas penduduk menganut agama Islam, dan sangat sedikit yang menganut agama Protestan, dan Katolik. Dengan komposisi itu sulit diharapkan akan terjadi pergaulan sosial di tempat-tempat ibadah antara pendu-

duk yang berlainan bangsa itu. Kecuali mungkin antara penduduk golongan Eropa dengan Cina atau Timur Asing lainnya serta beberapa Bumi Putera yang telah menganut agama Protestan atau Katolik. Namun demikian data yang diperoleh tidak menerangkan beberapa jumlah penganut Protestan dan Katolik yang bukan berasal dari orang-orang Eropa. Sehingga dengan demikian akan dapat diukur seberapa jauh sumbangan aspek kehidupan beragama ini dalam menunjang terjadinya interaksi sosial antara golongan Eropa dengan Timur Asing.

Akhirnya sumbangan aspek bahasa juga nampaknya tidak banyak mempengaruhi hubungan sosial antara penduduk dari berbagai bangsa di Bukittinggi. Penduduk pribumi pada umumnya memakai bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk Cina totok sebagian masih memakai bahasa leluhurnya, dan Cina peranakan campur-campur antara bahasa leluhur dengan bahasa daerah, Melayu atau Bahasa Belanda. Memperhatikan jumlah penduduk yang bisa berbahasa Belanda, maka hubungan sosial dari segi aspek bahasa ini lebih banyak atau hanya bisa terjadi pada lapisan kaum terpelajar saja. Hal itu dimungkinkan dengan makin berkembangnya sekolah-sekolah di kota ini sejak akhir abad ke 19.

Kesimpulan sementara yang bisa ditarik dari pengamatan pendahuluan ini adalah bahwa interaksi sebagai proses perubahan yang teratur sebagai akibat proses saling mempengaruhi pada penduduk Bukittinggi pada dekade kedua abad ke 20 sampai sebelum mendaratnya Jepang di Indonesia tidak berjalan semestinya. Komunikasi yang terjadi antara komunikator (pengirim) dan komunikan (penerima) tidak berjalan pada tingkatan yang sederajat. Dalam situasi seperti itu sedikit kemungkinan terjadinya pembauran. Dan memang nampaknya ketika itu belum banyak diperhatikan. Jumlah kawin campur antar bangsa sulit terlaksana, antara lain karena faktor adat. Sesama Bumi Putra yang berlainan nagari saja relatif masih sedikit, apalagi antar Bumi Putera dengan golongan Eropa atau Timur Asing. Telaah yang mendalam tentang faktor-faktor kultural akan sanggup menjawab problema ini.

DAFTAR SUMBER

I. ARSIP DAN PUBLIKASI RESMI

1. **Indisch Verslag**, Tahun 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941. Batavia : Departement van Economische Zaken.
2. **Koloniaal Tijdschrift (KT)**, II (1913).
3. **Koloniaal Verslag**, Tahun 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923.
4. "Memorie van overgave" J. Ballot 12 Agustus 1915.
5. **Mededelingen van het Bureau voor de Bestuurs Zaken der Buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau (MEB)**, XVII, 1918.
6. **Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur (TBB)**, VI, (1892), LII (1917), dan 1916.
7. **Volkstelling**, Tahun 1930, IV. Batavia : Department van Economische Zaken.

II. KORAN DAN MAJALAH.

1. **Berita**, 16 Maret dan 22 April 1933.
2. **Dagblad Radio**, 30 September 1935 dan 5 Juni 1936.
3. **Kompas**, 6 Agustus 1982.
4. **Neratja**, 26 Pebruari 1918.
5. **Oetoesan Melajoe**, 7 Pebruari 1920 dan 31 Juli 1923.
6. **Pewart**, 22 September 1933, 7 dan 20 April 1934.
7. **Prisma**, Juni 1974, Nov. 1918, Maret 1982.
8. **Seng-po**, 12 Nov. 1927.

III. BUKU.

1. Abdullah, Taufik, "Minangkabau 1900 - 1927, Preliminary studies in social development" (Tesis MA pada Coernell University, 1967, tidak diterbitkan).
2. **Almanak Sumatera**, Medan : Panitia Almanak Nasional Sumatera, 1969.
3. Amran, Rusli. **Sumatera Barat Hingga Plakat Panjang**. Jakarta : Sinar Harapan, 1981.
4. Koentjaraningrat. **Pengantar Ilmu Antropologi**. Jakarta : Aksara Baru, 1979.
5. **Laporan Penelitian Hubungan Sosial di Kelurahan Taman Sari Jakarta**. Jakarta : Badan Pembina Kesatuan Bangsa, 1975.

6. **Laporan Penelitian Hubungan Sosial di Kelurahan Jembatan Lima Jakarta.** Jakarta : Badan Pembina Kesatuan Bangsa, 1976.
7. **Mackie, J.A.C. (ed). The Chinese in Indonesia.** Melbourne : The Australian Institute of International affairs, 1979.
8. **Mansoer, MD (dkk), Sedjarah Minangkabau.** Jakarta, Bhratara, 1970.
9. **Republik Indonesia; Propinsi Sumatera Tengah.** Jakarta: Kementerian Penerangan, Tt.
10. **Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau 1945 – 1950.** Jilid I dan II. Jakarta : BPSIM, 1978 – 1981.
11. **Susanto, Astrid S. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.** Bandung : Binacipta, 1977.

ORANG MANADO : SEBUAH GAMBARAN SINGKAT *)

oleh :

Drs. Fendy E.W. Parengkuan
(Universitas Sam Ratulangi)

I

Orang Manado mempunyai posisi yang unik sepanjang perjalanan sejarahnya, baik jika ditinjau dari sudut ilmu antropologi maupun sosiologi. Yang manakah yang dimaksud dengan orang Manado? Apakah semua mereka yang dalam pergaulan sehari-hari aktif ataupun kurang menguasai bahasa Melayu Manado? Apakah mereka yang sejak berabad-abad bermukim di kota/sekitar Manado, maupun mereka yang baru saja jadi penghuni kota dapat menganggap atau disebut sebagai orang Manado?. Kalau orang Manado dianggap sebagai salah satu suku bangsa, manakah ciri-ciri yang membedakannya dengan suku bangsa lain yang menjadi tetangganya? Apakah bahasa Melayu Manado dapat dianggap sebagai ciri pengenal dan pembeda utama untuk mengidentifikasi adanya orang Manado di tengah-tengah kita?.

Dengan memandangnya dari berbagai sudut lain, kita masih dapat mengembangkan berbagai pertanyaan mendasar mengenai ada tidaknya orang Manado sebagai suatu bangsa di Sulawesi Utara khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Anggapan yang berkembang di kalangan orang Manado sendiri kurang menunjang pendapat bahwa mereka adalah satu suku bangsa yang dengan jelas dapat dibedakan ataupun dibicarakan tersendiri dari sejumlah suku bangsa yang ada di Sulawesi Utara. Walaupun oleh suku bangsa lain, mereka yang berasal dari Sulawesi Utara sering di anggap sebagai orang Manado (terutama apabila tinggal di Jakarta), tetapi setidaknya-tidaknya terdapat keengganan di kalangan mereka sendiri untuk menganggap dirinya demikian. Orang asal Sulawesi Utara pada hakekatnya tidaklah identik dengan orang Manado karena di Sulawesi Utara terdapat beberapa suku bangsa, masing-masing mendukung unsur-unsur kebudayaan tertentu dalam beberapa hal, dapat dibedakan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain disana.

*) Makalah disampaikan dalam seminar Sejarah Lokal di Denpasar - Bali, 1 4 September 1982, Yang diselenggarakan oleh Proyek IDSN, Departemen P dan K.

Hal di atas dapat dibenarkan apabila kita mau mempertimbangkan kenyataan bahwa di Sulawesi Utara terdapat sejumlah suku bangsa tertentu. Di daerah Sangir Talaud terdapat dua suku bangsa yaitu suku bangsa Talaud dan suku bangsa Sangir. Selain mereka di daerah lainnya terdapat suku bangsa Minahasa, suku bangsa Mongondow dan suku bangsa Gorontalo. Kalau ada yang menganggap bahwa ciri pengenal khusus adanya suatu suku bangsa adalah bahasanya, maka akan terdapat lebih dari lima suku bangsa di Sulawesi Utara menurut perkembangannya yang terakhir. Jika di tinjau dari agama yang dianut mereka, maka mayoritas suku bangsa Talaud, Sangir dan Minahasa menganut agama Kristen. Sedangkan suku bangsa Mongondow dan Gorontalo, mayoritas memeluk agama Islam. Disamping itu, terdapat pula sejumlah suku bangsa pendatang bahkan ada yang telah berabad-abad lamanya bermukim di Sulawesi Utara seperti orang Ternate dari Maluku Utara. Sejalan dengan mulai masuknya bangsa-bangsa Barat maka datanglah orang Cina, Arab dan India. Dapat pula ditambahkan adanya orang Borgo yang didatangkan oleh bangsa Barat ke Sulawesi Utara khususnya di Manado dan Minahasa. Mereka ini mungkin dahulunya adalah orang **Mardijkers** yang menggunakan bahasa Melayu. Masih dapat ditambahkan lagi adanya keturunan bangsa Barat yang lazimnya disebut Indo yang juga ada di Sulawesi Utara.

Karena banyaknya diantara suku bangsa pendatang telah mengadakan percampuran darah dengan orang Sulawesi Utara maka pantaslah sekarang kita menganggap bahwa merekapun bagian yang tak terpisahkan dari orang Manado. Benarkah bahwa kehadiran mereka justru semakin mengaburkan konsepsi kita tentang orang Manado?

Dan yang lebih penting, apakah mereka juga menganggap dirinya sebagai orang Manado? Bagaimanakah pendapat orang Manado sendiri terhadap mereka?, maukah mereka menerima para pendatang tersebut dan serta merta menganggap mereka sebagai bagian dari pergaulan orang Manado sendiri? Hal-hal di ataslah yang menggugah penulis untuk mencoba menggambarkan sekilas tentang profil orang Manado serta peranan mereka dalam kerangka usaha menunjang pembauran demi persatuan dan kesatuan bangsa. Suatu hal lagi yang perlu diperhitungkan disini mengenai banyaknya orang Manado yang sejak lama bermukim di tempat-tempat lain di Indonesia. Dapatkah diterima apabila walaupun telah beberapa generasi di luar Sulawesi Utara, masih tetap dianggap atau menganggap dirinya sebagai orang Manado? Memang sungguh luas jangkauan masalah yang dike-

mukakan dalam makalah ini. Oleh karena itu penulis merasa perlu membatasi diri untuk hanya membicarakan tentang perjalanan sejarah dari orang Manado termasuk mencoba menggambarkan yang manakah yang "boleh" disebut sebagai orang Manado dan manakah peranan mereka dalam rangka pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa.

II

Siapa yang merupakan pemukim pertama di kota Manado sampai sekarang masih menjadi bahan perdebatan dari berbagai pihak. Orang Sangir dan Minahasa masing-masing mengatakan merekalah yang menamakan kota ini dan tentu saja telah merintis pendiriannya di masa lampau. Orang Ternate mengatakan bahwa tempat itu selama berabad-abad dijadikan tempat penukaran barang-barang mereka dengan orang Minahasa.

Orang Bantik masih keturunan dengan orang Minahasa beranggapan bahwa sejak dahulu, kota ini termasuk wilayah pemukiman nenek moyang mereka. Orang Minahasa sendiri menunjuk salah seorang pemimpin mereka bernama Dotu Lolong Lasut yang mendirikan Manado, dahulunya bernama Negeri Wenang.

Dengan demikian maka sampai sekarang belumlah ada kata sepakat mengenai siapa yang mula-mula mendirikan kota Manado dan kapan hal itu dilakukan. Tapi tidaklah diragukan lagi bahwa wilayah kota ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang Minahasa selama berabad-abad. Namun kita sudah memperoleh sedikit petunjuk bahwa orang Manado sekarang ini adalah keturunan dari para pemukim pertama antaranya dari Minahasa, bekas rakyat kerajaan Babon tehu dan dari Bantik.

Orang Ternate, setidak-tidaknya sampai menjelang akhir abad 16, belum menetap di Manado. Hal ini didasarkan pada perkiraan bahwa tahun 1563, Sultan Hairun berniat mengirimkan angkatan laut ke Sulawesi Utara untuk meminta penduduknya memeluk agama Islam. Jadi pastilah sebelum itu Ternate belumlah benar-benar menguasai Sulawesi Utara termasuk Manado, dan mungkin sekali belum ada orang Ternate yang berlabuh di pesisir pantai Manado, antaranya untuk menyelamatkan diri dari bahaya di lautan, serta untuk mengeringkan hasil tangkapannya.

Ketika Belanda mendirikan benteng Amsterdam di Manado, maka mereka mendatangkan tukang-tukang dan kuli-kuli

dari Ternate dan Gorontalo, dipimpin oleh tukang-tukang ahli orang Cina. Hal ini berlangsung pada akhir abad 17 sampai awal abad 18. Tidak segera terjadi percampuran darah dengan penduduk kota sebelumnya. Mereka dan keturunannya masih tetap menganggap diri sebagai **orang Manado**. Mungkin karena mereka masih mempunyai ikatan darah yang erat sekali dengan keluarga dari tempat mana mereka didatangkan oleh Belanda.

Untuk mendirikan benteng tersebut maka sesuai Kontrak Politik antara Belanda – Minahasa 10 Januari 1679, orang Minahasa wajib menyediakan bahan-bahan bangunan, antaranya batu dan kayu. Dan dengan semakin majunya perdagangan maka orang-orang Minahasa dari pedalaman semakin sering pergi ke kota Manado, terutama untuk menjual hasil bumi dan hasil hutan. Karena perjalanan darat dari pedalaman Minahasa terkadang memakan waktu berhari-hari, maka setibanya di Manado mereka harus menetap beberapa hari untuk beristirahat sambil menantikan pembeli. Sisa-sisa pemukiman mereka sampai sekarang masih ada, antaranya di tempat-tempat yang disebut **kampung Tondano, kampung Langowan, kampung Kakas, kampung Tombariri, kampung Romboken**, dan sebagainya. Bersama-sama dengan pendahulu mereka sesama orang Minahasa dari Ares dan Tonsea, mereka mulai membentuk wajah kota Manado, terutama bagian tengah, Timur dan Selatannya.

Sampai periode ini kita mulai dapat membayangkan terjadinya pergaulan sosial dan percampuran darah antara penduduk kota ini. Para penduduk waktu itu terdiri atas keturunan dari Dotu Lolong Lasut dan para pengikutnya dari Ares (Minahasa), keturunan orang Bantik, keturunan bekas rakyat kerajaan Babontehu, keturunan para nelayan dan buruh dari Ternate, keturunan para buruh dari Gorontalo, keturunan para tukang dan pedagang Cina serta para pedagang dari pedalaman Minahasa, Namun belum ada seorangpun diantara mereka yang secara sadar menyebut dirinya sebagai **orang Manado**.

Orang Minahasa memusuhi orang Spanyol yang bertindak sewenang-wenang ketika mereka berada di Minahasa. Permusuhan itu pecah mulai 10 Agustus 1643 dan dalam peperangan yang berlangsung, orang Spanyol kalah. Tapi mereka masih merupakan ancaman bagi Minahasa. Oleh karena itu, orang Minahasa mempergunakan tangan Belanda dalam menghadapi mereka. Dalam rangka inilah maka terciptalah perjanjian persahabatan antara Belanda – Minahasa yang memungkinkan Belanda mendirikan benteng di Manado, menggantikan kedudukan orang Spanyol. Untuk mempertahankan benteng tersebut, maka Be-

landa mendatangkan pasukan yang sebagian diantaranya bukanlah orang Belanda, melainkan kaum pribumi yang entah berasal dari mana. Mereka dinamakan dirinya orang Bergoyang merupakan tenaga bantuan militer dengan tugas-tugas tertentu bagi Belanda. Mungkinkah mereka berasal dari kaum **Mardijkers** di **Batavia** atau merupakan keturunan orang Portugis di sana atau di Maluku, belumlah diketahui dengan jelas. Satu-satunya petunjuk yang ada hanyalah nama-nama marga mereka yang kebanyakan berasal dari Portugis (dan Spanyol?).

Orang-orang Borgo ini kebanyakan datang tanpa membawa keluarga mereka sehingga mereka mengambil isteri di Manado, baik dari kaum pendatang lainnya yang beragama Islam, maupun dari orang Minahasa yang beragama Kristen. Karenanya sampai sekarang ini sebagian diantara mereka beragama Kristen dan sebagian lagi beragama Islam. Dengan demikian, rakyat kota Manado semakin beraneka warna. Selain di Manado, orang **Borgo** terdapat pula di Tanawangko dan Amurang, dua kota kecil di pantai Utara Minahasa. Merekapun agaknya datang bersamaan dengan orang Borgo di Manado.

Sampai awal abad 19, Sulawesi Utara dimasukkan oleh Belanda sebagai wilayah Keresidenan Ternate. Barulah pada 1824 dibentuk Keresidenan Manado yang meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah sekarang ini. Kepulauan Sangir Talaud barulah setahun kemudian (1825) dilepaskan dari Keresidenan Ternate dan digabungkan ke Keresidenan Manado. Dalam pada itu pecahlah perang Diponegoro di Jawa (1825-1830) yang menyebabkan Belanda harus bersusah payah memadamkannya, mereka mendatangkan bala bantuan yang dikerahkan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dari Keresidenan Manado dikerahkan 800 orang, semuanya orang-orang Minahasa. Sebagai bagian dari **Nederlands Oost Indische Leger**, maka pasukan itu dipimpin oleh seorang mayor dan dua kapten, ketiganya juga orang Minahasa, yang berangkat ke Jawa tahun 1829. Itulah untuk pertama kalinya orang Minahasa dikerahkan ke luar Sulawesi Utara sebagai tentara. Di sana mereka disebut **der Minahassers** atau **de Menadoneezen**. Orang Minahasa atau orang **Manado** (orang Manado). Kaum kolonial Belanda hampir tidak pernah menyebut **Manado** melainkan **Manado**. Barulah pada masa pendudukan Jepang, mereka-mereka menyebut **Manado**. Sesungguhnya yang resmi sekarang ini adalah **Manado**.

Orang Belanda sudah menyebutkan mereka sebagai orang **Manado** walaupun mereka sendiri belum menyadari hakekat yang melekat dalam sebutan tersebut. Ini merupakan kebiasaan

yang berlaku dikalangan militer Belanda untuk mengenali dari mana suatu pasukan berasal. Biasanya yang dipakai sebagai pedoman ialah kota/benteng Belanda dimana pasukan itu diterima/dibentuk. Mereka yang diterima di Ambon disebut **militer Ambon** yang datang dari seluruh Maluku. Dan mereka yang diterima di Benteng – Amsterdam di Manado, dengan demikian disebut **Militer Manado** dan dalam pergaulan diluar kedinasan disebut **orang Manado** (Menadoneezen). Disadari atau tidak sebutan ini lambat laun diambil alih oleh mereka yang berada di kota Manado. Anggapan ini mungkin merupakan salah satu alternatif, dan karenanya tetap terbuka untuk pendapat lainnya.

Dengan mulai dibukanya Manado dalam rute pelayaran kapal-kapal KPM, maka pelabuhan Manado merupakan pintu gerbang satu-satunya yang terpenting di Sulawesi Utara. Mereka yang dari Sangir Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, bahkan Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, apabila hendak ke Jawa harus lewat pelabuhan Manado. Demikian pula kaum pendatang dari daerah-daerah lainnya di Indonesia, harus melalui pelabuhan Manado bilamana hendak masuk/menetap di wilayah ini. Kaum militer dari Manado serta peranan pelabuhan Manado semakin menempa dan membentuk anggapan akan adanya **orang Manado**. Mereka yang pulang kembali ke daerah masing-masing melalui pelabuhan Manado, mulai memperkenalkan sebutan orang di daerah lain (terutama Jawa) terhadap diri mereka bahwa mereka di tempat lain dikenal sebagai **orang Manado**, karena masuk militer di benteng Amsterdam di Manado, dan karena diberangkatkan lewat pelabuhan Manado.

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda menjelang akhir abad 19 menata kembali distrik-distrik di Minahasa. Antaranya dibentuk **Distrik Manado** yang dibentuk dari sebagian distrik Ares dan distrik Kakaskasen. Kemudian pada awal abad 20, pemerintahan kolonial tahun 1911 menetapkan Manado sebagai satu **Gemeente** dengan seorang walikota sendiri. Pemerintah kota Manado mulai menetapkan batas-batas kota serta mulai mendaftarkan penduduk kota Manado. Dalam sensus tahun 1930 yang dilakukan pemerintah kolonial di seluruh Indonesia, dapatlah diketahui jumlah penduduk masing-masing kota dan daerah seluruh Indonesia. Sayangnya penulis tidak sempat memperoleh data mengenai jumlah penduduk kota Manado hasil sensus tahun 1930 itu. Masalahnya yaitu apakah penduduk kota Manado sesuai hasil sensus tersebut dapat disebut **orang Manado**? penulis berpendapat bahwa hal itu mungkin sepanjang menyangkut segi administrasi pemerintahan saja, tetapi dari segi sosiokultural masih perlu dipertanyakan lagi.

III

Dari pengamatan sepintas saja, kita segera dapat memastikan bahwa mayoritas penduduk kota Manado berasal dari daerah Minahasa. Hal ini sudah berlangsung sejak beberapa abad lalu. Ada suatu istilah pengenalan khusus dikalangan orang Minahasa untuk menyebut rekannya yang sedesa asal, sebahasa ataupun sesama orang Minahasa. Istilah tersebut ialah **Kawanua** yang biasa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit misalnya kalau mereka berada di kota Manado dan secara luas apabila berada diluar Minahasa/Manado, umpamanya berada di Jakarta. Sebagaimana diketahui, orang Minahasa setidaknya terdiri atas tujuh sub kelompok etnik yaitu **orang Tensea, orang Toulour, orang Tombulu, orang Tontembuan, orang Pasan Ratahan, orang Ponosakan, dan orang Bantik**. Masing-masing memiliki bahasa sendiri walaupun masih serumpun bahasa. Meskipun orang Minahasa dianggap atau menganggap dirinya satu suku bangsa tetapi tidak ada yang disebut **bahasa Minahasa**, karena masing-masing sub kelompok di atas aktif mempertahankan bahasanya sendiri. Satu-satunya yang mengikat mereka ialah anggapan bahwa mereka bersumber dari satu keturunan yang sama yakni keturunan **Toar Lumimuut**, yang dianggap nenek moyang orang Minahasa.

Karena masing-masing sub kelompok suku bangsa di atas memiliki bahasanya sendiri, maka tentulah sulit bagi mereka untuk berkomunikasi. Dengan demikian maka alternatif pertama dalam melakukan hubungan diantara mereka ialah menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti dan dikuasai, ialah **bahasa Melayu Manado**. Bahasa ini agaknya merupakan dialek lokal dari **bahasa Melayu** yang berasal dari Riau, yang merupakan **bahasa perdagangan** di antara kaum pedagang Nusantara sebelumnya. Bahasa Melayu ini rupanya masuk melalui Maluku ke Sulawesi Utara. Lewat transaksi dagang antara kaum pedagang Nusantara dengan orang Minahasa di pelabuhan Manado, masuklah bahasa Melayu di kalangan para pedagang orang Minahasa itu. Boleh jadi merekalah yang telah turut menghidupkan pemakaian bahasa Melayu itu, dan setelah disesuaikan dengan bahasa-bahasa di Minahasa, lahirlah apa yang dikenal sebagai **bahasa Melayu Manado** sampai sekarang ini.

Koentjaraningrat mengatakan bahwa suku bangsa ialah sekelompok manusia yang mendiami suatu lokasi tertentu yang merasa terikat oleh adanya kesamaan adat istiadat, dan sering (walaupun tidak selalu) oleh kesamaan bahasa juga. Dihubungkan dengan konsep tersebut di atas maka agaknya tidak tepat

untuk diterapkan kepada apa yang kita kenal sebagai **orang Manado**. Sampai sejauh ini **orang Manado** belum memiliki adat istiadat tertentu yang dengan jelas dapat dibedakan bila dibandingkan dengan suku bangsa yang lain. Mayoritas **orang Manado** atau lebih tepat lagi penduduk kota Manado berasal dari Minahasa atau yang asal usulnya dapat dilacak di Minahasa. Dengan demikian maka adat istiadat dari mayoritas **orang Manado** dalam banyak hal mengambil alih adat istiadat **orang Minahasa**. Hal ini tanpa bermaksud mengabaikan adat istiadat **orang Manado** yang berasal dari keturunan beberapa suku bangsa lainnya yang juga turut membentuk adanya **orang Manado**, antara lain yang berasal dari Sangir, Ternate dan Gorontalo. Juga orang-orang Cina yang didatangkan oleh Belanda sekitar abad 17.

Konsep tersebut di atas juga tidak mengabaikan ciri pengenal suatu suku bangsa berdasarkan bahasa. Kita mengenal adanya **bahasa Melayu Manado** yang merupakan bahasa pergaulan. Tapi adanya bahasa ini ditinjau dari sudut antropologi belumlah cukup meyakinkan bahwa **orang Manado** adalah satu suku bangsa. Bahasa itu sendiri selain merupakan bahasa pergaulan, sebagaimana sudah dikatakan di atas, berkembang mulai sebagai **bahasa perdagangan**.

Dalam pengertian yang sangat khusus dapatlah **bahasa Melayu Manado** itu dianggap sebagai **High language** diperhadapkan dengan bahasa-bahasa lainnya dari semua suku bangsa di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, bahkan mungkin sampai di Maluku Utara, dari mana **bahasa Melayu Manado**, itu diperkirakan masuk ke Sulawesi Utara dan berkurang di Manado. Jikalau **bahasa Melayu Manado** dapat dianggap sebagai **High Language** maka pada pihak lainnya bahasa-bahasa daerah di wilayah tersebut di atas berstatus sebagai **low language**. Dapat dikatakan demikian karena alternatif pertama dalam berkomunikasi oleh warga suatu suku bangsa lainnya di wilayah-wilayah tersebut di atas, adalah dengan menggunakan **bahasa Melayu Manado**. Dalam periode abad 19 akhir sampai menjelang pertengahan abad 20, guru-guru orang Minahasa turut berjasa menyebarluaskan **bahasa Melayu Manado** ke pedalaman Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan (Tanah Toraja). Bahkan sekarang ini ditengah semakin gencarnya ekspansi bahasa Indonesia, **bahasa Melayu Manado** terus berkembang, bukan saja oleh **orang Manado** di daerahnya sendiri tetapi juga oleh mereka yang merantau ke-tempat-tempat lainnya di Indonesia.

Kalau konsep suku bangsa di atas ternyata lebih menekankan pada kesadaran akan kesamaan adat istiadat maka akan lain-

Manado merasa bahwa satu-satunya kebanggaan yang merupakan identitas mereka ialah adanya **bahasa Melayu Manado**, yang secara aktif berperan sebagai **lingua franca** diantara sekian banyaknya suku bangsa di Sulawesi Utara. Namun dibalik itu disadari atau tidak, **orang Manado** memiliki warisan kesejarahan yang lama. Pemukim-pemukim terdahulu, kaum pendatang dari lepas pantai pesisir Minahasa, nelayan, tukang, kaum buruh dan pedagang dari daerah-daerah lain, serta kaum pedagang dari pedalaman Minahasa yang kemudian menetap di Manado, ditambah lagi kaum militer pribumi yang didatangkan Belanda secara perlahan-lahan membentuk kota Manado dan profil **orang Manado**.

Kita belum dapat mengatakan bahwa **orang Manado** yang memiliki warisan kesejarahan serta bahasa yang mempersatukan mereka, sebagai satu suku bangsa. **Orang Manado** sendiri tidak pernah menganggapnya demikian. Hanya ada semacam dorongan kultural pada semua suku bangsa di Sulawesi Utara untuk dapat saling berkomunikasi. Mereka memperoleh hal itu melalui **Bahasa Melayu Manado**, satu-satunya sumbangan yang amat berharga dari **orang Manado**, yang sadar ataupun tidak, telah memberikan sahamnya bagi persatuan dan kesatuan di Sulawesi Utara. Di pihak lain, keberhasilan **bahasa Melayu Manado** sebagai **lingua franca** di Sulawesi Utara setidaknya-tidaknyalah telah menggugah timbulnya rasa kebanggaan pada **orang Manado**. Rasa kebanggaan itu disadari atau tidak amat besar pengaruhnya pada warga setiap suku bangsa di Sulawesi Utara terutama apabila berada di luar wilayah tersebut (misalnya di Jakarta). Kemampuan mereka dalam menguasai dan menggunakan **bahasa Melayu Manado** akan serta merta dikaitkan pada rasa kebanggaan karena menganggap atau dianggap sebagai **orang Manado** yang sedang merantau.

IV

Menjelang akhir tulisan ini maka penulis mengajak kita sekalian untuk mencoba mengambil beberapa kesimpulan sehubungan dengan pengertian tentang **orang Manado**, dan peranan mereka dalam konteks pembauran demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan memperhitungkan perjalanan sejarahnya maka **orang Manado** adalah eksistensi dari keturunan **orang Minahasa**, **Sangir**, **Gorontalo**, **Ternate**, **Borgo**, termasuk keturunan asing (Cina, India, Arab dan Indo) **Bolaang Mongondow**, **Talud** serta kaum pendatang dari daerah-daerah lain, yang secara berabad-

abad dan berangsur-angsur membentuk kota Manado, sebelum bahkan sesudah kota ini dijadikan *gemeente* oleh pemerintah kolonial Belanda.

Eksistensi **orang Manado** ini mulai dikenal di daerah-daerah lainnya di Indonesia sejalan dengan politik pemerintah kolonial Belanda dalam bidang perdagangan, pemerintahan, militer dan pendidikan. Dalam bidang perdagangan dimulai ketika Minahasa sejak pertengahan kedua abad 17 mengekspor beras melalui pelabuhan Manado ke Maluku. Dalam bidang pemerintahan, ketika Manado dijadikan sebagai ibukota Keresidenan Manado yang meliputi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, dilepaskan dari keresidenan Ternate sejak 1824. Dalam bidang militer dimulai ketika 800 pemuda Minahasa pada tahun 1829 berangkat ke Jawa sebagai bagian dari *Nederlands Oost Indische Lager*. Di Jawa mereka dikenal sebagai *Der Minahassers* (**orang Minahasa**), atau *de Menadoneezen* (**orang Manado**). Dalam bidang pendidikan ketika sejumlah **orang Manado** terutama yang berasal dari Minahasa disebarkan ke Sulawesi Tengah bahkan sampai ke Sulawesi Selatan sebagai guru-guru, menjelang akhir abad 19 sampai masuknya Jepang.

Sekarang timbul pertanyaan, apakah **orang Manado** adalah satu suku bangsa? Kalau kita menjawab ya, maka kita harus segera dapat menunjuk unsur-unsur kebudayaan yang didukung oleh para warganya termasuk adat istiadat tertentu yang dapat dibedakan bila dibandingkan dengan suku bangsa lain yang menjadi tetangganya.

Tapi penulis dengan memperhatikan warisan kesejarahan dari **orang Manado** mungkin cenderung untuk menyatakan bahwa mereka belumlah dapat dikatakan satu suku bangsa tertentu.

Dengan demikian maka apabila kita berbicara tentang **orang Manado** sesungguhnya harus menyesuaikannya dengan perjalanan dan warisan kesejarahan mereka. Untuk itu penulis memberanikan diri menyusun kategori **orang Manado** ialah sebagai berikut :

1. Keturunan Dotu Lolong Lasut dan para pengikutnya yang datang dari Walak Ares.
2. Keturunan bekas kawula kerajaan Babontehu setelah mereka bermigrasi dari pulau-pulau ke bagian Utara kota Manado.
3. Keturunan orang Bantik yang pernah bermukim disekitar kota Manado terutama bagian utara, yang sejak masuknya Belanda telah menetap di Manado.

4. Keturunan para nelayan dan kemudian para tukang dan buruh orang Ternate yang didatangkan Belanda mulanya untuk mendirikan Benteng Amsterdam di Manado.
5. Keturunan para tukang dan buruh **orang Gorontalo** yang didatangkan Belanda untuk mendirikan benteng Amsterdam di Manado.
6. Keturunan orang asing (Cina, India, Arab) yang didatangkan Belanda baik sebagai tukang maupun sebagai pedagang.
7. Keturunan **orang Borgo** sejak mereka didatangkan orang Belanda sebagai tentara di benteng Amsterdam di Manado.
8. Keturunan para pedagang Minahasa yang pernah mendirikan perkampungan di bagian selatan Benteng Amsterdam di Manado.
9. Para pendatang dan keturunannya dari daerah-daerah lain yang menetap di Manado setidak-tidaknya sejak kota ini berstatus **gemeente**.
10. Keturunan orang asing lainnya termasuk kaum Indo setelah mereka memilih bernaturalisasi menjadi warga negara Indonesia sejak negara kita merdeka, dan menetap di kota Manado.
11. Mereka yang termasuk dalam kategori nomor 1 sampai dengan 9 diatas yang sekarang sedang berada atau telah telah lama menetap di luar Sulawesi Utara tapi masih dapat diusut asal usul di Sulawesi Utara.
12. **Orang Minahasa** yang dengan mudah menjadi **orang Manado** hanya karena telah lama menetap dan atau terdaftar sebagai penduduk kota ini baik sebagai kaum urbanis dari pedalaman Minahasa maupun kembali ke Manado setelah beberapa lama merantau atau menetap di kota-kota/daerah-daerah lainnya.

Orang Manado tidak memiliki bahasa daerah sendiri dalam arti kata sebagai perkembangan bahasa-bahasa dari sejumlah suku bangsa yang berangsur-angsur menghuni kota ini. **Bahasa Melayu Manado** agaknya berkembang dengan berintikan **bahasa Melayu** yang berasal dari Riau. Bahasa Melayu merupakan sarana komunikasi bagi kaum pedagang Nusantara yang juga berperan menghidupkan perdagangan di kota Manado. Secara berangsur-angsur pula **bahasa Melayu Manado** yang pada mulanya merupakan sarana komunikasi dalam perdagangan di kota itu, menjadi milik para penghuni kota Manado. Karena peranan strategis Manado sebagai kota benteng, sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat kota pelabuhan, dan pusat pendidikan, maka **bahasa Melayu Manado** berkembang menjadi

alternatif pertama dalam berkomunikasi bagi semua suku bangsa di wilayah tersebut. Hal ini dibawa pula oleh orang Manado sebagai perantau ke daerah-daerah lain dan merupakan kebanggaan tersendiri bila ditinjau dari asal usulnya maupun jika dilihat keadaannya yang sekarang, sejak semula merupakan pembauran dari berbagai kelompok sosial yang secara sukarela menggunakan bahasa Melayu Manado sebagai sarana komunikasi.

DAFTAR SUMBER

- ADAM, L., **Pemerintahan di Minahasa**, Bhratara, Jakarta, 1979.
- GODEE MOLSBERGEN, Dr. E. C. , **Geschiedenis van de Minahasa tot 1829**, Weltevreden, 1928.
- GRAAFLAND, N., **De Minahasa I en II : Haar verleden en haar tegenwoor dige teestand**, G. Kolff & Go., Batavia, 1898.
- NANULAITTA, I.O., **Timbulnya Militerisme Ambon : Sebagai suatu persoalan politik, sosial – ekonomis**, Bhratara, Jakarta, 1966.
- PARENGKUAN, Fendy E.W., dkk., **Dari Malesung Menuju Minahasa : Sebuah pendekatan etno-historis dalam menentukan Hari Jadi Minahasa**, Seminar Penentuan Hari Jadi Daerah Minahasa, Tondano 24 s/d 27 Mei 1982.
- RAHASIA John, **Rekonstruksi Sejarah Asal Mula Manado : Dalam Rangka penetapan Hari Ulang Tahunnya**, Buku pertama, Jakarta, 1978.
- RHIJN, M. Van, **Memorie Van evergave het bestuur van den aftredenden Resident van Manado**, Manado, 1941.
- SIGARLAKI, A., dkk., **Sejarah Daerah Sulawesi Utara**, P3KD Sulawesi Utara 1977/1978, Manado, 1977.
- TATIMU, E., **Kepulauan Sangihe Talaud**, KANDEP P Dan K Kabupaten Sangir Talaud, Tahuna, 1975.
- TAULU, H.M., **Sejarah Minahasa**, Penerbit Jajasan Membangun, Tomohon, 1950.
- TOAR, D.D., **Orang Cina Di Manado**, Skripsi Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1978.
- TURANG, A.N., **Tinjauan Singkat pemerintahan Kota Manado**, Skripsi sarjana sejarah, Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1979.
- WATUSEKE, F.S., **Sedjarah Minahasa**, Manado, 1968.
- WAWO-ROENTOE, A.L., "De Minahasa on het Minahasische volk 1679 – 1917", artikel dalam **De Indische Gids**, Jilid 40, hal. 651 – 665, 1918.

**WIL LUNDSTOM – BURGHOORN, minahasa Civilization ;
A tradition of change, Acta Universitas Gothobur-
gensis, Goteborg–Sweden, 1981.**

SULAWESI SELATAN & KOMUNIKASI : DALAM RANGKA PROSES INTEGRASI BANGSA

Melangkah Ke "Pemahaman Diri" Melalui Sejarah Lokal [†]

Oleh :
Anhar Gonggong

I. PENDAHULUAN.

Kahar Muzakkar bersilang pendapat dengan Panglima TT. VII (Indonesia Timur, 1951) Kolonel Alex Kawilarang dan tuntutannya untuk membentuk satu brigade Hasanuddin dari bekas gerilya, ditolak. Ia mencampakkan 1 tanda pangkat letnan-kolonelnya di atas meja panglima dan meninggalkan kota Makassar; seterusnya menuju ke Pinrang dan bersama dengan Andi Selle masuk hutan. Ia memimpin pemberontakan DI/TII dengan wilayah kegiatan utamanya di Sulawesi Selatan/Tenggara. Persilangan pendapat tak dapat diselesaikan dan keduanya menjadi "musuh" yang tak terdamaikan. Kawilarang memang pada akhirnya dipindahkan ke tempat tugas lain, tetapi Kahar Muzakkar tetap menjadi pemberontak. Berakhir di ujung pelor dalam suatu pertempuran di tepi sungai Lasalo pada 1965. Tetapi di dalam perkembangannya kemudian, Kolonel Kawilarang pun menjadi pemberontak dengan menjadi salah seorang tokoh penting dalam gerakan pemberontakan Permesta dengan lokasi kegiatan utamanya di Sulawesi Utara.

Kahar Muzakkar dan Kawilarang memang berbeda latarbelakang kehidupan, latarbelakang budaya, termasuk pendidikan. Kahar Muzakkar, sukubangsa Bugis dengan latarbelakang budaya Sulawesi Selatan (baca : Bugis Makassar) dan dengan latarbelakang pendidikan Muallimin Muhammadiyah di Solo, tetapi tanpa pendidikan formal militer. Ia pemimpin pandu Hisbulwathan di tempat kelahirannya. Palopo. Kawilarang, orang Minahasa kelahiran Jatinegara dengan pengalaman pendidikan formal militer (Belanda) di Bandung.

[†]Disampaikan di depan Seminar Sejarah Lokal yang diadakan di Bali (tanggal 1 - 4 September 1982) oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Ada penampakan yang patut disimak dari keterangan di atas, yaitu bahwa latarbelakang budaya, termasuk di dalamnya pendidikan, mempunyai tempat penting di dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang memang dibangun di atas kemajemukan² budaya suku bangsa yang memang lebih dahulu berakar dan hidup. Kemajemukan latar-belakang yang demikian merupakan kekayaan yang tak dapat diabaikan karena mempunyai arti penting dipandang dari sudut dinamika makna dari simbol-simbol yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika yang tertera pada lambang negara Kesatuan, Garuda. Memperhatikan kesatuan di dalam kemajemukan memerlukan usaha untuk saling memahami di antara para pendukung bertegaknya bangsa Indonesia, yaitu dari suku-suku bangsa. Dipandang dari sudut Sejarah Lokal penampakan lain yang cukup menarik ialah bahwa kejadian lokal yang berlatarbelakang tuntutan etnis kedaerahan memberikan dampaknya pada skala nasional. Tuntutan-tuntutan yang di dalam perkembangannya tidak jarang justru memperlengah kedua belah pihak, baik pihak etnis-daerah yang bersangkutan maupun pihak (pemerintah) nasional. Dengan demikian keadaan itu akan menyentuh pula, secara mendasar, persoalan integrasi³ bangsa yang memang masih terus dalam proses dengan segala kekuatan dan kelemahannya.

Jika kita berkehendak melestarikan makna simbol Bhinneka Tunggal Ika, maka persoalan komunikasi di antara suku-suku bangsa yang memiliki latarbelakang budayanya masing-masing agaknya makin perlu disadari kedudukannya dalam pengaturan dan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa. Komunikasi yang dimaksudkan di sini baik dalam pengertian komunikasi antar budaya⁴ maupun dalam rangka komunikasi sosial⁵. Intensitas dan efektivitas komunikasi yang dimaksud akan sangat menentukan kelangsungan hidup bangsa, tidak hanya di waktu sekarang, tetapi pasti juga untuk waktu-waktu yang akan datang. Hal ini akan makin dirasa penting jika istilah komunikasi dimaksudkan sebagai "bentuk kontak antarmanusia yang didalamnya juga terkandung soal memahami"⁶. Dan saling memahami kenyataan-kenyataan budaya yang hidup di lingkungan masyarakat etnis-daerah pasti merupakan salah satu faktor penentu dalam pelestarian makna simbol-simbol yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hubungan inilah penulis meng-

gunakan kata "memahami diri", dan kata "diri" di sini dimaksudkan sebagai bermakna "bangsa Indonesia yang satu", sedang kata "memahami" dimaksudkan sebagai "perluasan cakrawala untuk menyadari kemajemukan latarbelakang kehidupan kita", tetapi yang telah berikrar untuk tetap utuh satu.

Berangkat dari kerangka pemikiran seperti di atas, penulis akan mencoba melihat Sulawesi Selatan sebagai salah satu bagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang didiami pula oleh setidaknya 4 suku-bangsa dengan latarbelakang budaya yang dimilikinya masing-masing. Penyelusuran terhadap daerah Sulawesi Selatan beserta suku-suku bangsa yang mendiaminya terasa perlu mengingat "peranan historis" yang dimainkannya dalam rangka sejarah Indonesia Makassar dalam kedudukannya sebagai kota pelabuhan telah memegang peranannya yang penting sejak beberapa abad yang lalu, setidaknya untuk wilayah yang kini disebut Indonesia Timur. Suku-suku bangsa yang mendiaminya, setidaknya yang dikenal dalam diri suku Bugis—makassar, merupakan suku bangsa "pengarang lautan dan penguasa daratan" baik dalam pengertian yang baik maupun dalam pengertian buruk. Ia pernah memerintah salah satu wilayah di ujung Barat Republik ini, di Aceh.⁷ Tetapi ia di-Islamkan oleh orang Minangkabau. Ia adalah penakluk beberapa kerajaan-kerajaan yang terdapat di Indonesia Timur. Bahkan ia telah sampai ke Australia.⁸ Ia diberitakan pula pernah menjadi Menteri Keuangan di Muangthai dan Komandan Kapal Perancis.⁹ Lamadukkelleng, seorang raja dari Wajo pernah menjadi raja penakluk di lautan yang pernah disegani, tidak hanya di wilayah Sulawesi Selatan tetapi juga di Malaysia, pernah sampai Johor.¹⁰

Di dalam alam kemerdekaan sekarang ini, yang sudah berlangsung selama 37 tahun, Sulawesi Selatan tetap tidak sepi dari kejadian historis yang dilakukannya; juga baik dalam pengertian yang baik maupun dalam pengertian yang buruk. Ia telah menyumbangkan angka legendaris bagi penegakan Republik ini, 40.000 warganya telah menjadi korban keganasan Kapten Westerling (akhir 1946 — awal 1947).¹¹ Tetapi ia juga telah menampakkan kenyataan "pedih" melalui pelbagai bentuk pemberontakan, salah satu di antaranya yang terlama ialah gerakan pemberontakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar (1950 — 1965). Perbuatan-perbuatan buruk-emosional seperti per-

kelahian antar suku juga tidak jarang terjadi baik di kalangan pelajar-mahasiswa maupun di kalangan masyarakat luas. Suku-bangsa dari Sulawesi Selatan tidak jarang terlibat di dalamnya. Anda tentu masih mengingat peristiwa "Beji" di Yogyakarta, yaitu perkelahian antara pelajar - mahasiswa dari Sulawesi Selatan dengan penduduk setempat. Seorang mahasiswa Bugis meninggal dan peristiwa itu (1951) sempat menjadi isu politik berskala nasional; kediaman Gubernur Sulawesi Selatan, yang waktu itu dijabat oleh orang Jawa -- Sudiro --, didemonstrasi. Perbuatan seperti itu tidak berhenti sampai di situ saja; tahun-tahun selanjutnya masih juga sering diwarnai oleh perkelahian semacam itu. Perkelahian dengan tukang becak yang kemudian melahirkan penyerbuan besar-besaran terhadap asrama-asrama mahasiswa Sulawesi Selatan (dan juga Sumatera) oleh penduduk setempat pernah terjadi pada tahun 1971. Dengan peristiwa itu, Jussac Hadisubroto (Pemimpin Redaksi Mingguan **Pelopor Yogya**) memberikan umpatan emosionalnya kepada pelajar - mahasiswa luar Jawa dengan : "orang-orang Barbar yang tak beradab".¹² Di kalangan masyarakat "awam" pun pernah pula terjadi perkelahian semacam itu. Anda tentu masih teringat dengan perkelahian orang-orang Banten dengan orang Bugis di Pasar Ikan, Jakarta pada tahun 1973. Tetapi mereka tidak hanya pandai berkelahi. Jika anda ke Irian Barat, setidaknya di Jayapura, maka bahasa pengantar yang paling baik digunakan -- sebagai alat komunikasi -- ialah bahasa Bugis. Ekonomi pasar Jayapura berada di tangan mereka. Kalau anda ke Ambon dan naik beca dan kebetulan mau "ngobrol dengan tukang becanya", tentu alat komunikasi yang baik ialah bahasa Bugis dan Buton.

Berpedoman pada keterangan-keterangan di atas, penulis akan melanjutkan uraiannya seperti di bawah ini.

II. SULAWESI SELATAN : SEBUAH SKETSA.

Daerah Sulawesi Selatan merupakan daerah yang didiami oleh 4 suku-bangsa yang mempunyai pertanian historis, baik melalui hubungan perkawinan di antara keluarga raja-raja mereka maupun melalui perjanjian-perjanjian kerajaan yang terdapat di daerah ini. Ke empat suku-bangsa yang dimaksud ialah : Bugis, Makassar (sering ditulis Bugis - Makassar), Toraja dan Mandar; tetapi sering di kalangan masyarakat (demikian pula di dalam

pelbagai buku sejarah) yang lebih banyak dikenal ialah Bugis dan Makassar, sehingga ada kesan seolah-olah Sulawesi Selatan hanya didiami oleh suku Bugis dan Makassar; ke empat suku-bangsa tersebut dewasa ini diperkirakan berjumlah sekitar 6.000.000 (enam juta) jiwa yang terdiri dari suku Bugis sebanyak 66%, Makassar 18%, Toraja 8% dan Mandar 5,2% dan penghuni lainnya sebanyak 2,5%¹³ Jika kita membagi Sulawesi Selatan dalam 3 bagian, maka bagian utara didiami oleh suku-suku bangsa Toraja dan Mandar, bagian tengah didiami oleh suku Bugis dan bagian selatan didiami oleh suku Makassar; ¹⁴ ibukotanya, Ujung Pandang (sebelumnya bernama Makassar) terletak di bagian yang disebut terakhir.

Suku-suku tersebut di dalam perkembangan sejarahnya telah mendirikan kerajaan-kerajaan dengan sistemnya sendiri-sendiri. Suku Bugis misalnya, mempunyai beberapa kerajaan seperti Luwu (tetapi di dalamnya juga pernah bergabung Tana Toraja), Bone, Wajo dan Sopeng, Sawitto, Suppa dan Alitta dan lain-lain, Suku Makassar mempunyai kerajaan Gowa dan Tallo; **Pitu Babana' Binanga** (Tujuh Kerajaan di Muara Sungai Mandar). ¹⁵ Sekitar abad XIV sampai masuknya kekuasaan kolonial Belanda, kerajaan ini merupakan kerajaan lokal yang merdeka dan kerajaan-kerajaan orang-orang Bugis ini secara bersama-sama disebut **Tana Ugi**. Namun, di dalam sejarahnya **Tana Ugi** tidak pernah mengalami suatu keadaan sebagai satu negara yang mampu mempersatukan seluruh suku Bugis dalam satu pemerintahan. Kerajaan-kerajaan itu melakukan hubungan-hubungan persahabatan dan persaudaraan didasarkan atas kesadaran kesatuan etnis dan ini dikenal dengan **sempugi**; kesadaran semacam ini cukup dirasakan maknanya bagi kelangsungan persekutuan mereka dan karena itu tetap dijunjung tinggi. ¹⁶

Sementara itu suku Makassar (orang Bugis menyebutnya **Mangkasa**) berhasil menciptakan kerajaan kembar Gowa — Tallo menjadi suatu kerajaan yang kuat di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur. Ia berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan melakukan penyerangan-penyerangan menaklukkan ke kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan ini. Menurut sebuah laporan politik, sebelum tahun 1672 kerajaan ini merupakan kerajaan yang paling berkuasa di Sulawesi Selatan; kerajaan-kerajaan lain di daerah ini takluk di bawah kekuasaannya, termasuk kerajaan terkuat orang Bugis, yaitu Bone ¹⁷

Pulau Sumbawa pada abad XVII juga berada di bawah pengaruh, bahkan "diperas" oleh kerajaan Gowa. 18 Langkah penguasaan yang dilakukan oleh kerajaan Gowa tersebut tidaklah sepi dari perlawanan dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkannya sebagai usaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Gowa. 19 Di kalangan kerajaan-kerajaan Bugis telah menyebabkan adanya usaha untuk mempersatukan kekuatan mereka menghadapi kerajaan Gowa; reaksi ini pada gilirannya melahirkan suatu persekutuan di antara mereka, yaitu yang dikenal dengan **TellumpooE**. Persekutuan ini dilakukan oleh kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng pada tahun 1582 di Kampung Bunne, Bone Utara. 20 Disamping untuk mempersatukan kekuatan mereka untuk menghadapi kekuasaan Gowa, perjanjian **TellumpooE** juga bertujuan menyusun hukum adat di beberapa bidang 21 Dengan latarbelakang "perbudakan" kerajaan Gowa terhadap kerajaan Bone itulah, maka Arung Palakka, Petta MalampeE Gemmena melangkah ke usaha pelepasan diri dengan cara mencari bantuan terhadap kekuasaan Belanda pada waktu itu. Ia akhirnya berhasil, namun di dalam perkembangannya kemudian ia tidak sepi dengan pertentangan dengan penguasa VOC pada waktu itu. 22

Kebebasan kerajaan-kerajaan Bugis - Makassar yang pernah dinilikinya setelah kedatangan Belanda di daerah ini mengalami perubahan. Perjanjian Bongaya yang menjadi tempat penguasaan adanya kekuatan mengikat dari Belanda terhadap Kerajaan Gowa, tetapi juga Bone, telah memberikan perubahan besar terhadap tata kehidupan di antara kerajaan-kerajaan di daerah ini. Kekuasaan kerajaan Gowa telah dikebiri oleh Belanda, dan Bone pun --dengan rajanya Arung Palakka - tidaklah dapat mengembangkan diri menjadi penguasa yang dapat melepaskan diri dari kekangan Belanda; Arung Palakka tentu saja mempunyai ambisi untuk mengambil peranannya yang besar bahkan berkehendak untuk menjadi pemersatu dari **Tana Ugi**, namun tak dapat diwujudkan sampai saat kewafatannya. 23

Informasi tentang adanya perubahan itu dapat kita ketahui dari salah satu sumber Arsip Nasional 24 yang menyebutkan adanya 3 bentuk pemerintahan yang diterapkan di daerah Sulawesi (Celebes), yaitu : 1) daerah-daerah Gubernur Gubernur langsung di bawah kekuasaan dan pemerintahan Gubernur. 2) daerah-daerah yang tidak

langsung dikuasai atau diurus oleh Gubernur. 3) daerah-daerah yang dijadikan sekutu dari Gubernur: yang disebut dengan **Bondgenootschappelijke landen**. Daerah-daerah yang termasuk pada jenis yang pertama ialah distrik Makassar, distrik-distrik sebelah utara; Bantaeng dan Bulukumba dan lain-lain.

Pada jenis kedua termasuk Kalli, Pare-Pare, Tanete, Tallo, Wajo dan Laiwui. Yang termasuk di dalam jenis ketiga ialah Mandar, Toraja, Massenrempulu, Luwu, Soppeng, Bone dan lain-lain. Kemudian dilakukan lagi perubahan (1846)) seluruh Sulawesi berada di bawah keaulatan Kerajaan Belanda dan sejak itu **Gouverneur van Makassar** disebut **Gouverneur van Celebes an Onderhorigheden**. Semua kedudukan dalam bidang pemerintahan, sampai dengan Assistent Resident dipegang oleh orang Belanda. Sedang penguasa-penguasa Bumiputera tetap dipertahankan sebagai alat perantara antara pejabat-pejabat Belanda dengan rakyat Bumiputera dan kedudukan mereka adalah **Regent**, tetapi dengan tetap menggunakan nama-nama kedudukan yang digunakan sebelumnya, misalnya : Karaeng, Daeng, Arung, Sulewatang, Gallarang dan sebagainya. Kepala-kepala desa/kampung dipergunakan panggilan **gallarang**, dan lain-lain. 25

Perubahan terus terjadi dan setelah kemerdekaan keadaan itu demikian pula adanya. Di dalam periode pemerintahan Federal, Sulawesi Selatan juga tergabung di dalamnya dan Makassar merupakan Ibukota dari Negara Indonesia Timur. Ketika itu sistem pemerintahan lokal tetap dipertahankan, dan dilaksanakan sistem pemerintahan **Swapraja**. Di daerah ini ketika itu terdapat 28 buah Swapraja, dan pada tahun 1946 Swapraja Luwu dipecah menjadi dua yaitu : Luwu dan Toraja. Susunan pemerintahan di Sulawesi sampai dengan permulaan tahun 1950 tidak mengalami perubahan; ia berdiri atas kepala swapraja dan beberapa orang besar yang secara bersama-sama merupakan dewan pemerintahan. Kepala swapraja bergelar sebagaimana yang lazim digunakan di daerahnya masing-masing misalnya **Sombayya ri Gowa**, **Payungge ri Luwu**, **MangkauE ri Bone** (biasa disebut : **Arung**) dan lain sebagainya. 26

Dalam proses selanjutnya, sistem-sistem itu pun secara berangsur dihapuskan sesuai dengan perubahan-perubahan pemerintahan yang dilakukan. Propinsi Sulawesi yang tadinya hanya merupakan satu, telah dimekar-

kan menjadi dua dan akhirnya sekarang menjadi empat buah dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu propinsi; ia terdiri atas 26 Daerah Tingkat Dua, dengan ibukotanya Ujung Pandang.

Di dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pengaturan kehidupan masyarakat didasarkan atas stratifikasi sosial dengan 3 jenis strata di dalamnya, yakni **Anakarung/Ana'Karaeng**, **To-Maradeka** (yang masih dikategorikan dua jenis, yaitu : **Tu-baji/To-deceng** dan **Tu-samara/To-sama** = orang baik-baik dan orang kebanyakan) dan **Ata**, yang juga dikategorikan dalam dua jenis yaitu **Ata-sossorang/Ata-mana'** dan **Ata-nibuang/Ata-Mabuang** (hamba sahaya warisan dan hamba sahaya baru). Di samping itu di kalangan masyarakat juga terdapat lapisan khusus yang lahir oleh "kemampuan" yang dimiliki oleh yang bersangkutan jenis yang dimaksud ialah '**To-Panrita**'; ia diberikan penghargaan tinggi di masyarakat karena keahliannya dalam bidang agama. **To-Sugi'**; dipandang berkedudukan khusus karena kekayaan yang dimilikinya. **To-Warani**; ia dihargai karena keberanian yang dimilikinya, khususnya dalam pengertian untuk membela Raja dan kerajaan dan kebenaran, dan yang lainnya **To-Sulesana**; ia dipandang berkedudukan khusus karena mempunyai keahlian tehnokratis untuk kepentingan masyarakat luas dan Negara.²⁷ Keempat jenjang kedudukan khusus di atas terbuka untuk diraih oleh mereka yang termaksud di dalam strata **Anakarung**, maupun **To-Maradeka**, bahkan juga mereka yang berasal dari strata — walaupun ini sangat sulit karena keterikatannya pada "tuannya" — **Ata** atau hamba sahaya.

Stratifikasi yang disebutkan itu dapat dikatakan tertutup, walaupun dalam batas-batas tertentu dan sangat sulit terbuka juga jarak yang memungkinkan terjadinya pergeseran di antara mereka. Adanya pelanggaran terhadap aturan yang diatur di antara mereka dapat berakibat lahirnya **siri'**. **Siri'** mempunyai kaitan erat dengan adat masyarakat Sulawesi Selatan, karena ia merupakan perbuatan pembalasan yang dilandasi oleh kewajiban moral untuk membunuh pihak yang melanggar adat, tetapi adat pun tidaklah dapat mengabaikan makna yang terkandung di dalam **siri'**. Ini terungkap dari **paseng** yang mengungkapkan : "**utettong ri ade'e, najagain nami siri'ku**"²⁸ Ungkapan itu bermakna "saya mentaati adat karena dijaganya **siri'ku**. **Siri'** dapat dijabarkan dalam makna kata

"malu", dan **siri'** bagi orang Bugis (baca : suku-bangsa di Sulawesi Selatan, pen.) mempunyai banyak segi-seginya dan karenanya sering ditanggapi sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang dapat emosional. Tetapi Mattulada²⁹ melihatnya dari segi yang lebih luas, yaitu dari segi aspek nilai **pannganderreng** sebagai wujud kebudayaan yang menyangkut martabat dan harga diri manusia dalam lingkungan hidup kemasyarakatan.³⁰ Nilai-nilai **Pannganderreng** yang sangat dijunjung tinggi dan yang dapat melahirkan persoalan **siri'** adalah pada hal-hal yang menyangkut :

1. soal-soal kepercayaan keagamaan;
2. berpegang pada amanat (**paseng**) atau janji (**ulu ada**) yang telah dibuatnya;
3. kesetiaan pada persahabatan;
4. kemudahan untuk melibatkan diri kepada persoalan orang lain;
5. pemeliharaan akan ketertiban adat kawin-mawin.³¹

Dikaitkan dengan pelanggaran **siri'** maka seorang **anakarung** sangat tercela untuk kawin dengan seorang dari lingkungan golongan lainnya. Pembatasan itu terutama sekali pada jenis **mangkunrai**, wanita. Perkawinan antara wanita **anakarung** akan dianggap "merusak" kemurnian darah dari lingkungan mereka; dan ini dianggap sebagai sesuatu yang melanggar kehormatan dirinya. Itulah sebabnya tidak jarang terjadi apa yang disebut **silariang** dan **nilariang**. Istilah yang pertama bermakna lari bersama karena kehendak bersama, sedang yang kedua bermakna dilarikan secara paksa. Dua-duanya mempunyai makna **siri'**.

Agama dan **siri'** tidak juga dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya, karena di dalam **panngaderreng** terkandung pula aspek **sara'** (hukum) Islam. Karena sebagaimana diketahui sebagian terbesar penduduk Sulawesi Selatan, terkecuali Toraja, adalah penganut agama Islam. Dalam hubungan adanya perkaitan antara **siri'** dengan Agama (Islam) menarik sekali percakapan Pak Laside dengan Ayahnya, dan ini diungkapkan di depan seminar **siri'** di Ujungpandang. Pak Laside menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan **siri'**. Jawaban ayahnya: "Perasaan, yaitu kita merasakan diri kita sebagai manusia dan bukan hewan. Pada siapa kita akan merasa malu, dan dijawab dengan "Pada Tuhan Allah Taala, pada Nabi kita dan pada diri kita sendiri serta pada sesama manusia".

Dilanjutkan dengan menanyakan tentang perbuatan apa yang membawa malu, yang dijawab dengan "Berlaku sebagai hewan dan tidak bersifat manusia". Dilanjutknn dengan perbuatan mana yang dimaksud dengan perbuatan hewan dan tak bersifat manusia, yang dijawab "Adapun yang dimaksud dengan berlaku hewan dan tak berlaku manusia ialah tidak mengetahui adanya Allah Taala, maka tak tahu pula akan perintah dan larangannya serta tak tahu apa yang baik dan apa yang buruk".³²

Sulawesi Selatan akan sulit dikenal dengan tidak melihat aspek-aspek yang dikemukakan seperti di atas.

III. KOMUNIKASI DALAM MASYARAKAT MAJEMUK.

Wertheim setelah menulis sebuah buku yang memaparkan situasi Indonesia melalui suatu studi dengan penyorotan terhadap perubahan sosial. Di dalam bab I dari bukunya itu diberinya judul : "Bhinneka Tunggal Ika,"³³ Ketika melihat faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan di Indonesia disebutnya faktor geografis, etnis dan tehnologis.³⁴ Adanya perbedaan yang dimaksud maka telah melahirkan pelbagai persekutuan hukum di antara penduduknya dan Van Vollenhoven membagi seluruh Indonesia dalam 19 lingkaran hukum dan jika kita melihat wilayah itu sekarang maka di Sulawesi Selatan ini terdapat 2 lingkaran hukum yaitu Sulawesi Selatan dan Tana Toraja.³⁵

Di dalam masyarakat yang majemuk itu kedudukan komunikasi di antara penduduknya harus berjalan se-serasi mungkin, agar dapat melangsungkan kehidupannya tanpa prasangka di antara mereka. Interaksi sosial di antara mereka harus berlangsung seintensif mungkin karena proses interaksi akan dapat melahirkan komunikasi melalui proses persepsi, proses belajar, proses pengalaman dan frame of refrence. Di dalam komunikasi, interaksi sosial mengikut sertakan pengaruh dua arah yang saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi.³⁶ Untuk maksud ini tentu diperlukan landasan-landasan pengaturan.

Sehubungan dengan itu di Sulawesi Selatan, sedikit-tidaknya di lingkungan suku Bugis-Makassar, landasan itu didasarkan pada apa yang disebut : **panngaderreng**. Saya menyebut demikian karena **Panngaderreng** mencakup

semua aturan-aturan kehidupan baik secara individual maupun dalam hubungannya kerajaan yang dibentuk oleh mereka. Untuk memperoleh gambaran tentang ini, maka perlu dijelaskan kandungan **Panngaderreng** seperti di bawah ini :

"Ada kalanya orang memahami konsep **panngaderreng** sama dengan aturan-aturan adat dan sistem norma saja. **Panngaderreng** selain meliputi aspek-aspek yang disebut norma dan aturan-aturan adat, yaitu hal-hal yang ideal yang mengandung nilai normatif, juga meliputi hal-hal di mana seseorang dalam tingkah lakunya dan dalam memperlakukan diri dalam kegiatan sosial, bukan saja merasa harus melakukannya, melainkan lebih jauh dari pada itu, ialah adanya semacam "laturan perasaan" bahwa seseorang itu adalah bahagian integral dari **panngaderreng**. **Panngaderreng** adalah bahagian dari pada dirinya sendiri dalam perlibatan dengan keseluruhan pranata-pranata masyarakatnya.

Panngaderreng dengan demikian dapat dikatakan adalah wujud kebudayaan yang selain mencakup pengertian sistem norma aturan-aturan adat serta tata tertib, juga mengandung unsur-unsur yang meliputi seluruh kegiatan hidup manusia bertingkah laku dan mengatur prasarana kehidupan berupa peralatan-peralatan materiil dan non-materiil.

Sistem norma dan aturan adat dalam kehidupan orang Bugis disebut **ade'**. **Ade'** dengan demikian adalah salah satu aspek **panngaderreng** yang mendinamisasi kehidupan masyarakat, karena **ade'** meliputi segala keharusan tingkah laku dalam kegiatan-kegiatan orang Bugis. **Ade'** berarti tata tertib yang bersifat normatif, yang memberikan pedoman kepada sikap hidup dalam menghadapi, menanggapi dan menciptakan hidup kebudayaan, baik ideologis, mental spirituil maupun fisik.³⁷

Berdasarkan keterangan di atas, maka **panngaderreng** merupakan landasan untuk pengaturan diri di dalam berinteraksi sosial dengan sesamanya, yang saling mempengaruhi. Dari proses ini mereka menemukan aturan-aturan yang ditetapkannya dalam bentuk **panngaderreng**. **Panngaderreng** dengan demikian merupakan pula alat integrasi yang mampu mengikat para penduduknya dalam satu kesatuan hidup bermasyarakat, yaitu suku Bu-

gis - Makassar.

Di dalam perkembangannya kita melihat bahwa suku Bugis-Makasar menciptakan sekian banyak kerajaan yang diperintah oleh raja mereka masing-masing dengan sistem pemerintahannya masing-masing pula. Akan tetapi walaupun demikian, keterikatan mereka terhadap unsur-unsur **panngaderreng** tetap dipegang dan mendasari perhubungan (komunikasi) di antara kerajaan mereka. Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah diadakan di antara mereka, tidaklah dapat dilanggarnya sejauh tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung di dalam **panngaderreng**. Dalam rangka itu pula maka ketika La Ma'dukkeleng kembali ke Bone (1736) di dalam suasana permusuhannya dengan VOC, ia tidak melakukan penyerangan langsung terhadap Bone yang waktu itu diperintah oleh seorang wanita; ia mengurungkan maksudnya untuk berlayar melalui sungai Walennae ke Wajo, sebab menurut adat seorang Raja perempuan harus dihormati.³⁸ Ketika La Ma'dukkeleng melihat bahwa Raja Wajo tidak membantunya dalam menghadapi Bone, maka Arung Mattoa Wajo memintanya untuk bersabar karena ia melakukan itu berdasarkan atas keterikatannya dalam perjanjian TellumpoccoE antara Bone, Wajo dan Soppeng.³⁹ perjanjian ini tak dapat dilanggar karena merupakan tata hubungan antar ketiga kerajaan tersebut, bahkan juga pengaturan hukum adat yang berlaku di ketiga kerajaan itu.⁴⁰

Panngaderreng sebagai landasan-pegangan hidup baik secara kolektif maupun secara pribadi; dengan demikian ia telah menyatu di dalam diri mereka. Panngaderreng melekat pada hakekat martabat manusia. Ia menunjang tinggi persamaan dan kebijaksanaan; oleh karena itu maka **panngaderreng** mendapatkan kekuatannya dari **siri'**, sebagai nilai esensial dari manusia. **Siri'** tidak lain dari pada martabat dan harga diri manusia.⁴¹ Dengan demikian ke manapun orang Bugis-Makassar berada dan ke manapun ia pergi, **panngaderreng** akan selalu menjadi pegangan dan pedoman dirinya yang dilandaskan pada **siri'**. Mereka yang hidup di rantau juga akan berpegang pada **panngaderreng** dalam berkomunikasi dan hidup bersama dengan masyarakat setempat.

Ketika La Ma'dukelleng akan meninggalkan Wajo untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar setelah ia melakukan pembunuhan terhadap orang-orang Bone, karena merasa dilanggar **siri'na**, maka ia ditanya

oleh Arung Mattoa Wajo perihal bekal yang akan dibawanya serta keperantauannya. La Ma'dukelleng menjawab :

"Adapun bekalku cukup bagiku, Tuanku. Bekalku ialah kemujuran dan berkat Pemerintahan Wajo. Modalku tiga macam : pertama, kelemahan lidahku; kedua, ketajaman ujung badikku; dan ketiga, ujung laso-ku."⁴²

Dari keterangan di atas kita dapat mengatakan bahwa seorang Bugis-Makassar ke manapun ia pergi, ia akan tetap merasa terikat dengan tempat kelahirannya.

Ia dilambangkan oleh perkataan La Ma'dukelleng yang menyebutkan sebagai bekalnya ke perantauan tidak lain dari kemujuran di sini ialah tetap bertegak dan berkembang kuatnya tanah kelahirannya Wajo. Bekalnya yang akan digunakan untuk melanjutkan hidupnya di tanah perantauan ialah lidahnya yang mengucapkan kemauannya dalam ketegasan tetapi disertai dengan rasa hormat terhadap sesamanya, kelemah-lembutannya di dalam pembicaraan. Bekal keduanya ialah ketajaman ujung badiknya. Bagi seorang laki-laki Bugis-Makassar, badik adalah bagian dari dirinya yang tak dapat dipisahkan. Badik adalah lambang untuk menjaga keamanan hidup dirinya. Dalam bahasa Bugis-Makassar terdapat banyak ungkapan yang menunjukkan betapa badik merupakan alat pengamanan diri bagi mereka. Misalnya :

"Taniya Ugi narekko de' nampunnai kawali (Orang Bugis yang benar-benar orang Bugis jika ia memiliki kawali, keris).

"Naiyya kawali-e' sellaonnai tauwe' (adapun badik adalah sahabat manusia, tauwe').

"Salewangeng nyawae' narekko tiwiki' kawali" (perasaan akan merasa aman jika kita membawa keris)⁴³

Sedang ujung laso di sini dilambangkan sebagai "melakukan perkawinan" di tempat mereka berada.

Ketiga bekal yang disebutkan oleh La Ma'dukelleng tidak dapat dilepaskan dari **panngaderreng** orang Bugis-Makassar. Itulah sebabnya ketika mereka berada jauh dari negeri tempat kelahirannya, mereka akan tetap mencintai tata kehidupannya dan berpegang pada, setidak-tidaknya siri' sebagai bagian integral dari **panngaderreng**, nilai-nilai yang terkandung di dalam **panngaderreng**. Dalam hubungan ini Andi Zainal Abidin⁴⁴ telah meng-

ungkapkan bahwa masyarakat Sulawesi Selatan (Bugis, Makassar, Mandar, Enrekang) di Johor telah membentuk suatu organisasi "Perlembagaan Persatuan Kebajikan Masyarakat Bugis Daerah Pantian" yang antara lain bertujuan untuk melahirkan masyarakat Bugis yang modern"; dan ternyata bahwa siri' hendak dijadikan sebagai alat perekat untuk menghubungkan para anggota mereka.

Apa yang dikemukakan di atas merupakan suatu bentuk pegangan pengaturan di dalam suatu masyarakat yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Tentu di daerah lainnya juga terdapat bentuk-bentuk pengaturan masyarakatnya dalam rangka kelangsungan hidupnya. Melalui penelitian sejarah dan hukum adat kenyataan kemajemukan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Justru agaknya memerlukan suatu "pengembangan" yang akan tetap menciptakan keserasian hidup kita. Pemerintah "Orde Baru," secara formal", telah melanjutkan pemikiran itu melalui GBHN, sebagaimana yang banyak diungkapkan oleh Astrid Susanto.⁴⁵

IV. PENUTUP : SEJARAH LOKAL ALAT PEMAHAMAN DIRI.

Jika kita menyadari bahwa kita membangun diri dalam suatu Negara Bangsa yang bersifat majemuk, maka dengan sendirinya pula di dalamnya telah berkembang "fakta-fakta" sejarah yang dapat memperkuat tetapi yang sekaligus juga dapat memperlemah kelangsungan hidup Negara-Bangsa tersebut. Dalam hubungan inilah saya melihat fungsi strategis **Sejarah Lokal** dan pendidikan dalam rangka proses integrasi bangsa. Dipandang dari segi komunikasi, maka sejarah lokal akan dapat memberikan informasi kepada masyarakat (bagi mereka yang membacanya) tentang kejadian-kejadian yang diungkapkannya. Dalam kaitan ini pendidikan, baik dalam pengertian lembaga maupun dalam pengertian proses ajar-mengajar, akan sangat besar peranannya untuk menciptakan suasana saling memahami, karena lembaga pendidikan telah menampung sekian banyak warganya yang berasal dari pelbagai suku bangsa, dari seluruh Indonesia. Di lain pihak pengajaran sejarah pada lembaga itu akan memperluas cakrawala pemahaman mereka terhadap Indonesia.

Dalam rangka ini A.B. Lopian telah menyatakan penda-

pat secara tepat ketika ia berkata bahwa,

"penelitian dan penulisan sejarah lokal tidak hanya dirasakan penting bagi orang yang berasal dari daerah bersangkutan saja. Ada peristiwa yang tetap akan mempunyai arti lokal⁴⁶ saja. Tetapi ada pula yang mengandung makna yang lebih luas.

Sejarah lokal diharapkan akan menjadi bahan yang berguna untuk mampu saling memahami diri, sebagai bangsa Indonesia, dengan "memperluas cakrawala"⁴⁷

Perluasan cakrawala dalam rangka memahami diri melalui sejarah lokal ini, diharapkan pula akan mampu memancing kreativitas kita di dalam memandang kebudayaan suku-suku bangsa lainnya. Dalam rangka kita dapat memberikan sumbangan-sumbangan berharga - dan di sini sebenarnya peranan penting lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi) - terhadap pertumbuhan kebudayaan bangsa Indonesia. Apalagi kita telah memberikan suatu pengakuan bahwa kebudayaan Indonesia terdiri atas tiga kategori yaitu :

1. Kebudayaan Nasional;
2. Kebudayaan Suku Bangsa (Daerah); dan
3. Kebudayaan Umum Lokal.⁴⁸

Ketiga kategori di atas, dan ini merupakan rumusan dari suatu lembaga resmi pemerintah, diakui eksistensinya di dalam rangka kebudayaan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian perluasan cakrawala kita terhadap pemahaman pada pertumbuhan kebudayaan bangsa, akan membuka peluang bagi lahirnya interpretasi yang kreatif terhadap ketiga bentuk kebudayaan tersebut. Dipandang dari sudut ini, maka kata-kata "puncak-puncak kebudayaan di daerah di seluruh Indonesia" sebagaimana yang terkandung di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, tidaklah melambangkan suatu pertanda bahwa ada kebudayaan yang lebih rendah nilainya di bawah puncak itu. Ia akan menghilangkan adanya interpretasi bahwa kebudayaan lain lebih rendah dari yang lainnya. Istilah "puncak-puncak" harus diinterpretasikan sebagai bentuk kreativitas bangsa kita pada suatu kurun waktu. Dan kreativitas itu seharusnya akan dapat dilanjutkan di waktu-waktu yang akan datang.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, saya memandang bahwa setiap suku bangsa (termasuk mereka yang mendiami Sulawesi Selatan) di Indonesia akan dapat berperan penting dalam rangka proses integrasi

untuk menciptakan suatu masyarakat Bhineka Tunggal Ika. Dalam rangka ini saya memandang sejarah lokal sebagai alat komunikasi yang mempunyai -- sekali lagi -- fungsi strategis.

CACATAN

1) Bahar Mattaliu, Kahar Muzakkar dengan Petualangannya, Delegasi, Djakarta, 1975, hal. 34. Untuk pelbagai keterangan tentang lahirnya pertentangan yang melahirkan pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan itu, Lihat Barbara Sillars Harvey, *Tradition, Islam, And Rebellion : South Sulawesi 1950 - 1965*. A Thesis Presented to the Faculty for Graduate School of Cornell University for the Degree of Doctor of Philosophy, 1974; lihat juga Cornelis Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam The Darul Islam In Indonesia*. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Sociale Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, 1981.

2) Tentang masalah ini lihat antara lain Hildred Geertz, *Aneka Budaya Dan Komunitas Indonesia*, (diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin), Seri Bacaan Wajib, No. 42, FIS-UI, Jakarta, 1982. Di dalam buku ini pengarang telah membahas tentang sekian banyak kebudayaan dan komunitas di Indonesia, termasuk orang Makassar, lihat hal. 42 - 58. Sedang untuk keanekaan sistem budaya di Indonesia, lihat Harsya W. Bachtiar, "Bhineka Tunggal Ika Dan Masalah Kesatuan Bangsa Indonesia." *Analisis Kebudayaan*, Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal. 20 - 24. Juga pengarang yang sama. *Bureaucracy And Nasion Formation Indonesia*, Leknas. Jakarta, tanpa angka tahun.

3) Untuk pembahasan persoalan integrasi bangsa, lihat Yahya Muamin & Colin Mac Andrews, *Masalah-Masalah Pembangunan Politik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1979, hal. 40 - 60. Untuk persoalan integrasi di Indonesia, antara lain lihat Alfian, *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia Kumpulan Karangan*, Gramedia, Jakarta, 1978, khususnya bagian III, halaman 185 - 206.

4) Apa yang dimaksud dengan "Komunikasi Antar Budaya," lihat Astrid S. Soesanto, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jilid I), Bina-cipta, Bandung, hal. 9 - 10.

5) Apa yang dimaksud dengan "Komunikasi Sosial, Lihat Astrid S. Soesanto, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 16 - 41.

6) P.J. Bouman, *Sosiologi Fundamental*, (Terjemahan Ratmoko) Djambatan, hal. 63.

7) Menurut informasi dari Drs. Zakaria Ahmad (Kepala Bidang PSK pada Kantor Wilayah Dep. P & K, Propinsi Aceh) kuburan dinasti Bugis yang pernah memerintah di Aceh terletak di halaman Museum Daerah Aceh.

8) Untuk keterangan lebih lanjut tentang hal ini, lihat A.A. Cence dan H.J Heeren, *Pelajaran dan Pengaruh Kebudayaan Makassar - Bugis di Pantai Utara Australia*, Bhartara, Djakarta, 1972.

9) *Suara Karya Minggu*, 15 - 7 - 1973.

10) A.Z. Abidin, "La Madukelleng Penggalang Persatuan Sulawesi Selatan Mengusir Voc," *Prisma*, No. 8, Agustus, 1980, hal. 38 - 57.

11) Tentang benarnya jumlah rakyat Sulawesi Selatan, sebanyak 40.000 orang, memang belum dapat dibuktikan; bahkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tim PUSJARAH ABRI meragukan kebenaran jumlah itu. Dalam kata-kata Nugroho Notosusanto, "kini diragukan kebenarannya oleh generasi muda." Untuk keterangan ini, lihat Nugroho Notosusanto, "Wawancara Simultan Suatu Experimen Sejarah Lisan," Makalah pada Seminar Sejarah Nasional ke III, 1981.

12) *Mingguan Pelopor Jogja*, 1971.

13) *Monografi Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Dep. P & K, Jakarta 13 - 14.

14) *Ibid.*, hal 1 - 2.

15) Untuk keterangan lebih lanjut tentang kerajaan Mandar ini, lihat H. Saharuddin, "Pertalian Kekerabatan Raja Balanipa Dengan Raja-Raja Lainnya di Mandar," *Bingkisan Budaya Sulawesi Selatan*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, No. 4, 1978, 97 - 119.

16) Mattulada, "Latoa," Disertasi Doktor pada UI, 1975, hal. 6.

17) *Laporan Politik Tahun 1837 (Staatkundig Overzicht van Nederlandsch Indie, 1837)*, Arsip Nasional, No. 4, hal. 33.

18) Hildred Geerts, *op. cit.*, hal. 45.

19) *Ibid.*

20) Abd. Razak Daeng Patunru, *Sedjarah Gowa*, Jajasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar, 1969, hal. 17.

21) Andi Zainal Abidin, *Lontara' Sebagai Sumber Sedjarah Terpendam Masa 1500 - 1800*, Seminar Sejarah Nasional ke II, 1970, hal. 16.

22) Gambaran tentang adanya pertentangan dan ketegangan antara Arung Palapa dengan VOC di dalam perkembangannya kemudian, setelah saling membantu di dalam mengakhiri kekuasaan Kerajaan Gowa pimpinan Sultan Hasanuddin dapat diketahui, misalnya, di dalam "La Side" Suatu pembunuhan di Makassar Pada Awal Abad ke 18 Yang Sangat menggemparkan," *Bingkisan*, No. 6, Februari 1969, hal. 43.

23) Mattulada, *op.cit.*, hal. 77.

24) *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839 - 1848*. Arsip Nasional, Jakarta, 1973, hal. 263.

25) Gambaran lebih lengkap tentang perubahan-perubahan yang dimaksud, lihat *ibid.*, hal. 236 - 326. Lihat juga A. Arthur Schiller,

The formation of Federal Indoensia 1945 – 1949, W. Van Hove, The Hague & Bandung, 1955, khususnya Bab III Local Government,” hal. 80 – 197. Lihat juga Usep Ranawidjaja, Swapradja Sekarang dan dihari Kemudian, Djambatan, Djakarta, hal. 42 – 43.

26) Untuk keterangan yang lebih luas, lihat *ibid.* hal. 42 dst.

27) Untuk keterangan lengkap tentang stratifikasi sosial di Sulawesi Selatan, lihat Mattulada, *op.cit.* hal. 25 – 39.

28) *Ibid.*

29) *Ibid.*

30) *Ibid.*

31) *Ibid.* Untuk memperoleh gambaran tentang siri beserta akibat pelanggarannya, terutama pada persoalan pelanggaran terhadap perkawinan dari ketiga jenis stratifikasi di dalam masyarakat Sulawesi Selatan, lihat M. Natzir Said, **Siri' dan hubungannya dengan perkawinan di masyarakat Mangkasara Sulawesi Selatan**, Makassar, 1962.

32) Lihat La Side, "Referensi Tentang Pengertian, Perkembangan Siri' pada Suku Bugis." di dalam **Materi Dan Kesimpulan Seminar Masalah Siri di Sulawesi Selatan 11 s/d 13 Juli 1977** (stensilan), hal. 1 – 13.

33) W.F. Wertheim, **Indonesia Society In Transition A Study of Social Change**, Sumur Bandung, 1956, hal. 1 dst.

34) *Ibid.*

35) Untuk keterangan tentang ini lihat R. Soepomo, **Bab-bab tentang Hukum Adat**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, khususnya bab IV, 49 – 80.

36) Mar'at, **Sikap Manusia Perubahan Serta Pengukurannya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 108.

37) Mattulada, *op.cit.*, hal. 306.

38) Andi Zainal Abidin, (**Prisma**), hal. 34.

39) *Ibid.*

40) Andi Zainal Abidin, (Seminar Sejarah ke II), hal. 16.

41) Mattulada, *op. cit.*, hal. 308.

42) Andi Zainal Abidin, (**Prisma**), hal. 39.

43) Abu Hamid, "Catatan Tentang Beberapa Aspek Kebudayaan Sulawesi Selatan," di dalam **bingkisan Budaya Sulawesi Selatan, No. 4**, hal. 45.

44) Andi Zainal Abidin Farid, "Siri" dan Kriminalitas Serta Pembinaan Hukum, **Seminar Siri**, Ujung Pandang, 1977, hal. 9.

45) Keterangan lebih lanjut, lihat "Komunikasi Sosial di Indoensia," **Passim**.

46) A.B. Lopian, Memperluas Cakrawala Melalui Sejarah Lokal, "Prisma, No. 8, Agustus, 1980, hal. 6 - 7.

47) *Ibid.*, hal. 3.

48) Pengkategorian yang demikian ini merupakan hasil **Seminar Pengkajian Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengembangan Kebudayaan Nasional** yang diadakan oleh Ditsenitra, Ditjen, Kebudayaan, Dep. P & K., pada tanggal 26 - 28 Maret 1981, di Yogyakarta.

LATAR BELAKANG SEJARAH DAN INTERAKSI SOSIAL PERANTAU MANDAILING DAN MINANGKABAU DENGAN SUKU BANGSA MELAYU DI MEDAN

oleh :
Nazier Chatib & Z. Pangaduan Lubis

1.1 Kerangka Masalah

Sebenarnya, sampai pada waktu menulis makalah ini, saya belum mengetahui mengapa Panitia Seminar meminta atau menunjuk saya untuk membicarakan masalah yang menyangkut "komunikasi antar suku dan antar daerah serta pembauran".

Kebetulan di daerah tempat tinggal saya, yaitu kota Medan bertempat tinggal berbagai suku bangsa yang berasal dari beberapa daerah di Sumatera maupun dari luarnya. Keadaan yang demikian ini kiranya kena-mengena dengan pokok permasalahan yang diminta kepada saya untuk membicarakannya. Dan sekaligus saya harapkan akan membuka jalan bagi saya untuk mengemukakan beberapa hal yang mempunyai kaitan dengan pokok permasalahan tadi.

Untuk menyesuaikan diri dengan pokok permasalahan, yaitu "Komunikasi antar suku dan antar daerah serta pembauran", maka saya pilih judul pembicaraan "Latar Belakang Sejarah dan Interaksi Sosial Perantau Mandailing dan Minangkabau dengan Suku Bangsa Melayu di Medan". Dengan pokok pembicaraan yang demikian ini, kiranya akan dapat dibicarakan, meskipun secara selintas, hal-hal yang menyangkut komunikasi antar suku bangsa dan antar daerah serta pembauran. Dalam hubungan ini tentu saja komunikasi antar suku bangsa Mandailing, Minangkabau dan melayu yang menjadi obyek pembicaraan ini dan komunikasi antar daerah asal mereka, serta pembauran antar mereka. Sebab interaksi sosial di antara suku-suku bangsa Mandailing dan Minangkabau sebagai perantau di Medan dengan suku bangsa Melayu sebagai penduduk "aslinya", "merupakan hubungan-hubungan sosial" (Soerjono Soekanto, hal: 192) yang di dalamnya terkait atau berkomunikasi antar suku-suku bangsa yang bersangkutan.

Dalam masalah ini akan saya kemukakan hal yang berkaitan dengan komunikasi dan pembauran antar suku bangsa Mandailing dengan suku bangsa Minangkabau sesama perantau di Medan dan antara kedua suku bangsa tersebut dengan suku bangsa Melayu, serta perbauran antara mereka pada periode menjelang akhir abad ke 19 sampai dasa warsa empat puluhan. Juga akan saya coba mengemukakan beberapa hal mengenai

komunikasi antara suku bangsa Mandailing dan Minangkabau sebagai perantau di Medan dengan daerah asal mereka masing-masing, dalam periode yang sama. Sebagai pelengkap akan saya coba pula mengemukakan secara sepintas, latar belakang sejarah kedatangan kedua suku bangsa tersebut ke Medan, atau Tanah Deli umumnya.

1.2. Latar Belakang Sejarah

1.2.1 Perantau Mandailing

Dahulu Tanah Deli atau kota Medan khususnya terkenal sebagai tempat merantau bagi berbagai suku bangsa di Sumatera. Dan sampai sekarang di kota Medan banyak bertempat tinggal suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera, bahkan dari daerah-daerah lain di Indonesia. Untuk pembicaraan ini, saya sengaja memilih suku bangsa Mandailing dan Minangkabau serta suku bangsa Melayu.

Alasan saya memilih ketiga suku bangsa ini sebagai obyek pembicaraan adalah karena suku bangsa Mandailing sudah cukup lama tinggal sebagai perantau di Medan, sebelum suku-suku bangsa lain datang, dan suku bangsa Minangkabau sudah terkenal sebagai orang perantau, sementara suku bangsa Melayu merupakan penduduk "asli" di kota Medan.

Latar belakang atau alasan yang demikian itu, kiranya cukup penting kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan dibicarakan.

Suku bangsa Mandailing termasuk di antara orang-orang perantau yang mula-mula datang ke Medan menjelang akhir abad yang lalu. Lama sebelum suku bangsa lainnya bertempat tinggal di Medan, seperti Toba, Karo, Simalungun, Pakpak Dairi dan lain-lain, Orang-orang Mandailing sudah datang merantau ke Tanah Deli atau Medan khususnya.

"Kira-kira dalam tahun 1875, disitulah mulai terbuka Tanah Deli, sebagai tanah perantauan bagi (suku) bangsa Mandailing, karena waktu itulah mulai orang-orang Mandailing datang satu, datang dua ke Deli, merantau mencari kehidupan" (Mangaraja Ihoetan, 1926 : 5), dalam hubungan ini perlu diingat bahwa, perkebunan (tembakau) yang pertama di Tanah Deli, dibuka oleh Nienhuys tahun 1863.

Kepergian orang-orang Mandailing merantau ke Tanah Deli disebabkan oleh berbagai motivasi. Antara lain yang penting adalah tekanan rodi dan belasting oleh penguasa Belanda, karena terjadinya konflik keluarga, dan juga karena di Tanah Deli banyak dibuka tanah perkebunan, sehingga "mata pencaha-

rian banyak, sedang uang mudah di negeri ini" (Mangaraja Hoe-tan, 1926: 5).

Oleh karena "perbedaan menyolok antara besar rodi yang harus dibayar oleh rakyat Sumatera Timur (f. 6,- setahun) dengan di Tapanuli (f. 20,-) dan di tempat lain di Tapanuli ada yang mencapai f. 40,- menyebabkan banyak orang-orang Mandailing "melarikan diri" ke Tanah Deli (H.M. Said, 1976: 69).

Gambaran tentang kejamnya penguasa Belanda memperlakukan orang-orang yang tidak mampu membayar belasting di Mandailing, dapat dilihat dari kenyataan bahwa pernah "50 orang yang tidak mampu membayar belasting diikat dengan tali di Penyabungan di muka kantor kontrolir sendiri, waktu malam hari dan orang itu disuruh jongkok di tanah". Dalam keadaan demikian, "orang-orang yang malang itu ada yang kelihatan kurus sebagai kurang makan atau sakit, ada yang tidak berkain selain dari pada celana katok yang robek-robek". Kemudian "tiap sebentar kontrolir datang dengan opas, jaksa dan mantri membawa satu lampu saja seraya bertanya: Bayar apa tidak!" (H.M. Said, 1976: 70).

Bagaimana idealnya Tanah Deli sebagai tempat "melarikan diri" bagi orang-orang Mandailing dari tekanan belasting dan rodi, terungkap pula dari salah satu pantun rakyat yang sangat populer di masa yang lalu dalam masyarakat Mandailing. Pantun tersebut berbunyi sebagai berikut :

Hasonangan di Tano Deli

Marjagal sanga jadi karam

Angan-angan somba-somba mi tondi

Ngada maniap pacul, lopeh muse rodi

Terjemahannya secara bebas :

Kesenangan di Tanah Deli

Berdagang atau jadi kerani

Angan-angan kehendak hati

Tidak memegang cangkul, lepas pula dari rodi

Pada waktu pertama sekali orang-orang Mandailing merantau atau "melarikan diri" ke Tanah Deli, belum ada transportasi dengan mobil yang menghubungkan daerah asal mereka dengan daerah Sumatera Timur. Oleh sebab itu perjalanan ditempuh dengan jalan kaki dari Mandailing ke daerah Padang Lawas. Kemudian dari sana perjalanan diteruskan kearah pantai timur di daerah Labuhan Batu. Selanjutnya naik perahu dari daerah

Batu Bara ke Percut yang tidak begitu jauh letaknya dari Medan.

Dalam perkembangan selanjutnya banyak pula orang-orang Mandailing yang berjalan kaki melintasi daerah Angkola sampai ke Sipirok. Kemudian perjalanan diteruskan ke daerah Toba (Tapanuli Utara), dan dari Porsea yang terletak di tepi Danau Toba, mereka naik "steem.ergas" (kapal api kecil) melintasi danau sampai ke Tiga Ras. Dari Tiga Ras ada yang meneruskan perjalanan melintasi Tanah Karo menuju Medan dan ada pula yang berjalan lewat Pematang Siantar.

Banyak di antara "pelarian Mandailing" itu orang-orang yang sudah tamat "Sikola Dua" (sekolah di zaman Belanda yang hanya sampai pada tingkat kelas dua saja) dan juga yang sudah tamat "Sikola Desa" (sekolah desa). Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa, pada pertengahan abad ke 19 penyair Willem Iskander telah membuka sekolah guru (kweek school) di Mandailing. Sebagai hasilnya pendidikan cepat berkembang di Tapanuli Selatan pada abad yang lalu.

Selain itu biasanya para "pelarian" itu sudah menguasai serba sedikit ketrampilan bela diri (silat). Dan mereka berangkat menuju Tanah Deli secara berombongan yang dipimpin oleh beberapa orang jago silat, bersama-sama dengan "malim" (orang yang punya keahlian dalam bidang Agama Islam), dan kadang-kadang disertai pula oleh "datu" (dukun sakti).

Migran-migran Mandailing terus mengalir ke Tanah Deli sejak menjelang akhir abad ke 19, sampai tahun tigapuluhan. Sehingga menurut "Perhitungan orang Batak Tapanuli dan Pesisir Timur tahun 1930 dari seluruh orang Mandailing yang berjumlah 134.783 orang 33,6% berada di Pesisir Timur, yaitu sebanyak 45.308 orang. (Dr. Moechtar Naim, 1979: 49).

Masuknya perantau-perantau Mandailing ke Tanah Deli, atau khususnya ke Medan, tidak pernah mendapat halangan apa-apa dari suku bangsa Melayu. Karena mereka biasanya mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat yang mereka datang, dan juga karena mereka menganut agama yang serupa dengan agama yang dianut oleh masyarakat Melayu di Sumatera Timur (agama Islam).

Pada mulanya para perantau Mandailing yang menetap di Medan hidup berkelompok, sehingga tempat tinggal mereka menjadi satu tempat di Medan yang dikenal dengan nama Kampung Mandailing. Tempat ini kemudian dinamakan Kampung Pando. Tanah perkampungan itu sebagian diberikan oleh Sultan

kepada orang-orang Mandailing sebagai "grant", dan sebahagian mereka beli sendiri.

Karena jumlah orang Mandailing makin lama bertambah banyak yang bertempat tinggal di Medan, maka mereka membuka pula sebuah perkampungan lain, juga bernama Kampung Mandailing yang terletak di sekitar Padang Bulan. Perkembangan selanjutnya membuat makin banyak tempat-tempat di kota Medan yang dikenal sebagai perkampungan orang-orang Mandailing, seperti di Gelugur, Petisah, Sungai Mati dan sekitar Jalan Serdang. Sampai sekarang di tempat-tempat tersebut masih banyak bertempat tinggal suku bangsa Mandailing.

Pada mulanya mata pencaharian mereka di Medan adalah berdagang (saudagar) dan bekerja sebagai pekerja dan guru. Para pedagang Mandailing banyak melakukan kegiatan di pusat perdagangan yang dinamakan "Pajak Ikan Lama". Di situ mereka lama kelamaan berkembang menjadi pedagang-pedagang kain (batik). Sampai Perang Dunia Kedua, di pusat perdagangan tersebut banyak orang-orang Mandailing sebagai pedagang-pedagang kain (batik) yang terkenal di Medan. Dan sisa-sisanya masih dapat ditemukan sampai sekarang.

Selain mendapat kedudukan sebagai saudagar dan pegawai serta guru, banyak pula orang-orang Mandailing yang menjadi pemuka agama (Islam) atau ulama yang terkenal di Medan. Kedudukan yang demikian itu banyak menimbulkan rasa simpati suku-suku bangsa lain yang beragama Islam terhadap para perantau Mandailing di Medan.

Dapat pula dikemukakan bahwa, dalam perkembangan pers atau persuratkabaran di Medan pada awal abad ini, banyak orang-orang Mandailing yang tampil sebagai pelopor dan hal ini membuat mereka makin terpendang di tengah masyarakat. (Lihat: Sejarah Pers di Sumatera Utara oleh H.M. Said).

1.2.2 Perantau Minangkabau

Untuk mengetahui awal datangnya para perantau Minangkabau ke Medan kita dapat membaca apa yang dikemukakan oleh Dr. Mochtar Naim, (1979: 97).

"Walaupun migrasi orang Minangkabau ke sepanjang pantai barat Sumatera sampai Tapak Tuan terus ke Meulaboh di Aceh telah berlangsung sampai berabad-abad, namun migrasi ke Sumatera Timur, ke Medan khususnya, baru bermula pada akhir abad yang lalu tatkala perkebunan-perkebunan besar mulai dibuka".

Faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang Minangkabau merantau pada periode 1900 s/d periode 1939, adalah tekanan geografi, tekanan ekonomi, dan dorongan pendidikan serta pelebagaan sosial dari kegiatan itu sendiri. (Lihat Dr. Mochtar Naim, halaman 293).

Selanjutnya Dr. Mochtar Naim (1979: 97) mengungkapkan pula: "Orang-orang Minangkabau berdatangan ke sana bukanlah untuk memburuh di perkebunan tetapi untuk berdagang. Malah kenyataannya memang mereka menghindari kerja berkuli seperti yang dilakukan oleh orang-orang Jawa yang dibawa ke sana dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai kuli kontrak. Banyak dari mereka yang menjajakan barang dagangannya dari perkebunan yang satu ke perkebunan yang lain atau menetap di kota untuk berdagang".

Dari apa yang diungkapkan oleh Dr. Mochtar Naim tersebut, dapatlah kita ketahui, bahwa masa awal kedatangan perantau-perantau Mandailing dan Minangkabau ke Medan tidak jauh berbeda. Selain itu, profesi yang mereka kerjakan dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Yaitu sama-sama berdagang. Tetapi orang-orang Mandailing umumnya tidak dikenal sebagai pedagang penjaja seperti orang-orang Minangkabau. Dan jumlah orang-orang Mandailing yang menjadi pegawai atau guru, umumnya jauh lebih besar dari orang Minangkabau. Sebab pada masa yang lalu jarang perantau Minangkabau di Medan yang memilih profesi sebagai pegawai atau guru. Sebab selain menjadi pedagang, mereka lebih suka menjadi "tukang", seperti tukang pangkas, tukang jahit, tukang dobi, tukang patri dan lain-lain, daripada menjadi pegawai.

Kalau perantau Minangkabau di Sumatera Timur "menghindari kerja berkuli seperti yang dilakukan orang-orang Jawa", (Dr. Mochtar Naim, 1979: 97), maka orang-orang Mandailing juga melakukan hal yang sama. Sebab mereka menganggap pekerjaan berkuli itu sebagai pekerjaan "yang hina", apalagi menjadi kuli orang-orang kulit putih atau Belanda. Jumlah perantau Minangkabau yang berada di Sumatera Timur pada tahun 1930 ialah 50.677, dan sebagian besar dari jumlah ini berada di Medan dan sekitarnya. (Lihat Dr. Mochtar Naim Hal. 31).

Sebagaimana perantau Mandailing, orang-orang Minangkabau yang merantau ke Medan juga bertempat tinggal secara berkelompok. Perkampungan orang Minangkabau yang terkenal di Medan ialah daerah Kota Maksum. Tempat tersebut terletak tidak jauh dari daerah tempat tinggal kaum bangsawan Melayu

di Medan dan juga tidak jauh dari istana Sultan.

Untuk perantau Minangkabau di Medan, tersedia "tanah wakaf" atau tempat perkuburan yang khusus, yang letaknya berdekatan dengan tanah perkuburan bagi orang-orang Mandailing, yaitu di Sungai Mati. Tetapi sebelumnya, orang-orang Mandailing yang bertempat tinggal di Kampung Pando (Kampung Mandailing) sudah mempunyai sendiri tanah perkuburan khusus, yang terletak di Jalan Mabar.

Tentang lokasi perkampungan perantau Minangkabau di Medan, kiranya perlu dicatat, bahwa letaknya berjauhan dari tempat-tempat perkampungan orang Mandailing.

1.2.3 Suku Bangsa Melayu

Sebenarnya suku bangsa Melayu di Sumatera Timur mempunyai latar belakang yang cukup panjang, dan mempunyai kaitan yang tersendiri dengan Islam. Dalam hal ini T. Luckman Sinar S.H. (1980: 2) mengemukakan sebagai berikut :

"Sejak Islamnya Haru di abad ke 13, proses pengislaman ke arah pedalaman di antara suku-suku Batak (disini Karo, Simalungun, Padang Lawas dan Perdamaian) agak lambat tetapi berkembang. Proses pengislaman itu dikenal dengan proses MASUK MELAYU. Memeluk agama Islam disebut "Masuk Melayu". Jadi makin lambat laun suku bangsa Melayu yang tinggal di pesisir pantai dan kuala-kuala sungai besar di Sumatera Timur itu, makin bertambah jumlahnya. Jadi penduduk Melayu di Sumatera Timur ini adalah percampuran darah berbagai suku-suku bangsa, yang ciri-cirinya ialah beragama Islam, dan adanya satu kebudayaan, tingkah laku dan cara berpikir".

Selanjutnya dikatakan pula,

"Kita telah maklum bahwa "Melayu" bukanlah semata-mata didasarkan pada persamaan darah, keturunan, tetapi lebih dari suatu kumpulan nama suatu bentuk kebudayaan yang tinggi nilainya " (T. Luckman Sinar S.H., 1980: 18).

Orang-orang Melayu yang bertempat tinggal di Medan sejak dahulu mempunyai kedudukan sebagai "penduduk asli". Namun demikian dalam kenyataannya, ..di dalam kehidupan kota Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Timur, orang-orang Melayu telah terdesak kepinggiran-pinggiran kota sehingga lazimlah dikenal sebutan untuk orang-orang Melayu ini sebagai "Orang Kampong" (T. Luckman Sinar S.H., 1980: 15).

Dengan keadaan yang demikian itu orang-orang Melayu yang masih banyak berdiam di kota Medan, umumnya kaum bangsawan yang masih punya hubungan kekeluargaan dengan Sultan. Mereka bertempat tinggal secara berkelompok di sekitar lokasi istana Sultan. Dan seperti telah dikemukakan terdahulu, perkampungan perantau Minangkabau di Medan berdekatan letaknya dengan lokasi tempat tinggal kaum bangsawan Melayu di Medan.

Karena orang-orang Melayu yang bertempat tinggal di kota Medan umumnya terdiri dari kaum bangsawan, maka tak banyak di antara mereka yang mengambil bahagian dalam kehidupan kota sebagai yang dilakukan orang-orang lain (pendatang), misalnya menjadi pedagang. Sebagai kaum bangsawan yang dekat dengan Sultan boleh dikatakan kehidupan mereka selalu terjamin "tanpa bekerja" seperti perantau Mandailing atau Minangkabau. Tetapi ada juga diantara mereka yang menjadi pegawai Belanda.

Menurut sensus tahun 1930, dari keseluruhan penduduk di Sumatera Timur, hanya 23% saja orang Melayu (Lihat T. Luckman Sinar S.H. hal. 13).

2.1. Komunikasi Antar Suku Bangsa.

Di dalam interaksi sosial yang terjadi di antara suku-suku bangsa yang hidup dan bertempat tinggal di Medan tentu saja terjadi komunikasi. Dan dalam melakukan kegiatan komunikasi itu orang-orang yang terlibat di dalamnya sebegitu jauh masih dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing maupun oleh agama yang mereka anut.

Pada masa yang lalu, "kota Medan ditandai dimana setiap bangsa dan suku bangsa pendatang memakai adat dan bahasa sendiri, dan tinggal di wijk-wijk sendiri (Kampung Keling, Kampung Mandailing dan lain-lain) dan hanya waktu di dalam pekerjaan sehari-hari baru dipakai bahasa Melayu sebagai media komunikasi" (T. Luckman Sinar S.H., 1980: 11).

Dalam hal penggunaan bahasa sebagai media komunikasi antara perantau Mandailing dan perantau Minangkabau serta suku bangsa Melayu, kiranya perlu diberi sedikit catatan. Bahasa perantara yang dipergunakan oleh semua penduduk kota Medan yang terdiri dari berbagai suku bangsa pada masa yang lalu adalah bahasa Melayu. Dalam hal ini, karena perantau Minangkabau mempunyai bahasa ibunya sendiri, yaitu bahasa Minang yang banyak persamaannya dengan bahasa Melayu (atau dapat dika-

takan sebagai salah satu dialek dari bahasa Melayu), maka perantau-perantau Minangkabau boleh dikatakan tidak banyak mengalami kesulitan dalam penggunaan media bahasa untuk melakukan komunikasi dengan orang-orang lain di Medan.

Bagaimana halnya dengan perantau Mandailing? Bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Mandailing, jelas sama sekali tidak punya persamaan dengan bahasa Melayu ataupun dengan bahasa Minang. Tetapi karena umumnya perantau-perantau Mandailing yang datang ke Medan adalah orang-orang yang sudah pernah duduk di bangku sekolah, maka sedikit banyaknya mereka telah menguasai bahasa Melayu. Sebab dalam perkembangan pendidikan di daerah Mandailing yang dipelopori oleh penyair Willem Iskander, bahasa Melayu telah banyak di digunakan.

Selain dari pada itu sejak dahulu orang-orang Mandailing di negerinya banyak berhubungan dengan orang-orang Minangkabau. Sehingga sebahagian dari orang-orang Mandailing (yang merantau ke Deli) sedikit banyaknya sudah bisa menggunakan bahasa Minang yang tidak banyak bedanya dari bahasa Melayu. Hal itu sangat membantu bagi perantau-perantau Mandailing di Medan dalam hal menggunakan bahasa Melayu sebagai alat berkomunikasi. Pada masa itu orang-orang Mandailing sudah terbiasa menggunakan bahasa yang dinamakan oleh orang-orang Mandailing sebagai "bahasa Melayu selebang", yaitu bahasa Melayu sepotong. "Selebang" berasal dari perkataan "selobong" dalam bahasa Mandailing yang berarti "sepotong". Bahasa Melayu selebang yang dipergunakan oleh orang-orang Mandailing itu merupakan campuran antara bahasa Melayu dengan sedikit bahasa Minang dan bahasa Mandailing.

Dalam perkembangan selanjutnya sekarang perantau-perantau Mandailing yang sejak lama hidup di Medan dan bertempat tinggal di perkampungan-perkampungan lama orang-orang Mandailing, dikenal sebagai orang-orang yang punya bahasa (baca dialek) sendiri yaitu bahasa yang populer disebut sebagai "bahasa Petisah". Petisah adalah salah satu perkampungan lama orang-orang Mandailing perantau di Medan. "Bahasa Petisah" itu merupakan bahasa Melayu (Indonesia) yang digunakan perantau-perantau Mandailing dengan dialek tersendiri dan dicampur dengan istilah-istilah bahasa Mandailing. Sampai sekarang kalau orang-orang tertentu, terutama orang-orang tua di Medan mendengar seseorang mem pergunakan "bahasa Petisah" mereka akan mengetahui bahwa orang yang mempergunakannya adalah orang Mandailing keturunan para perantau.

2.1.1 Komunikasi Antara Perantau Mandailing dan Perantau Minangkabau.

Dalam membicarakan masalah komunikasi antara perantau Mandailing dengan perantau Minangkabau dan suku bangsa Melayu di Medan, saya tidak memberi penekanan terhadap aspek-aspek yang menyangkut peraktek komunikasi antara mereka. Juga tidak terhadap tehnik berkomunikasi antara mereka. Tetapi akan saya coba mengemukakan beberapa hal yang terdapat dalam kehidupan mereka di Medan, sebagai produk interaksi sosial yang dapat dipergunakan sebagai indikasi ataupun bukti, bahwa sesungguhnya komunikasi yang mereka lakukan telah berjalan dengan baik. Maksudnya melalui komunikasi yang terjadi antar suku bangsa Mandailing dan Minangkabau sebagai sesama perantau di Medan, "kesadaran bermasyarakat dipupuk, dibina, diperluas. Melalui komunikasi sosial masalah-masalah sosial dipecahkan melalui konsensus" oleh perantau-perantau Mandailing dan Minangkabau (Dr. Phil, Astrid S. Susanto, 1980: 1- 2).

Sebagai bukti tambahan mengenai lancarnya komunikasi antara mereka sejak dahulu sampai sekarang antara perantau-perantau Mandailing dan Minangkabau di Medan tidak pernah menjadi konflik terbuka. Mungkin di antara perantau kedua suku bangsa tersebut yang masing-masing banyak terlihat dalam kegiatan dagang di Medan ada terdapat persaingan, namun persaingan itu (kalaupun memang ada) tidak pernah menjelma menjadi konflik terbuka di antara mereka. Dan dalam kegiatan kehidupan lainnya sebagai sesama perantau, di antara suku bangsa Mandailing dan Minangkabau boleh dikatakan sedikit sekali kemungkinan adanya persaingan. Sebab selain dalam bidang perdagangan umumnya mereka mempunyai profesi yang berbeda. Oleh sebab itu dapat dikatakan persaingan tidak akan banyak membawa mereka kepada konflik. Dengan demikian komunikasi antara mereka selalu merupakan kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian situasi integrasi sosial" (Dr. Phil. Astrid S. Susanto 1980 : 1).

Kegiatan komunikasi yang paling banyak terjadi di antara perantau Mandailing dan Minangkabau di Medan pada masa yang lalu, adalah dalam kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Namun demikian perlu diingat bahwa pedagang-pedagang Minangkabau umumnya adalah pedagang penjaja. Sebaliknya pedagang-pedagang Mandailing di Medan di masa lalu, berkedudukan sebagai saudagar kain (batik) ataupun barang-barang lainnya. Sehingga dalam kedudukan yang demi-

kian ini, saudagar-saudagar kain orang Mandailing punya posisi sebagai penjual terhadap pedagang penjaja orang Minangkabau yang memerlukan bahan-bahan kain untuk mereka jual lagi. Untuk melancarkan bisnis antara mereka sudah dapat diperhitungkan bahwa, kedua belah pihak sebagai "komunikator dan komunikan perlu seia dan sependapat" (Dr. Phil. Astrid S. Susanto, 1980: 1).

Dalam hidup bersama sebagai perantau di Medan orang-orang Mandailing dan Minangkabau hidup secara berkelompok dengan masing-masing lokasi perkampungan yang cukup jauh terpisah. Sehingga dengan demikian terjadinya komunikasi antara mereka umumnya hanya dalam urusan kehidupan yang penting-penting saja. Oleh sebab itu frekwensi komunikasi antara mereka tidak begitu besar.

Meskipun latar belakang kultural para perantau Mandailing dan Minangkabau berbeda, terutama dalam garis keturunan (Mandailing : patrilineal - Minangkabau : matrilineal). Tetapi kedua suku bangsa tersebut ketika masih hidup di negerinya masing-masing sudah cukup saling mengenal dan punya saling pengertian. Karena sejak dahulu kala antara suku bangsa Mandailing dan Minangkabau yang hidup dalam negeri yang sangat berdekatan letaknya sudah terjadi berbagai hubungan.

Meskipun demikian barangkali perlu juga diingat bahwa, pada awal abad yang lalu pernah terjadi konflik antara suku bangsa Mandailing dan Minangkabau. Yaitu ketika terjadi penyerangan Kaum Paderi ke Mandailing. Tetapi persamaan agama yang dianut kedua suku bangsa tersebut telah mempererat hubungan antara mereka di kemudian hari. Dan faktor persamaan agama ini, kiranya menjadi faktor yang cukup menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan komunikasi antara para perantau Mandailing dan Minangkabau pada saat mereka hidup bersama di kota Medan sejak menjelang akhir abad yang lalu.

Selain dari itu, kedudukan dan peranan para perantau Mandailing sebagai guru dan tokoh-tokoh agama Islam terkemuka di Medan pada masa yang lalu (dan juga sampai sekarang), tentu saja memberi motivasi untuk baiknya hubungan antara perantau Mandailing dan Minangkabau di Medan. Sebab di masa yang lalu kedudukan guru dan tokoh agama cukup berharga dan terhormat di tengah masyarakat. Dan kedudukan yang demikian itu, dengan sendirinya banyak memberikan nama baik bagi suku bangsa Mandailing sebagai perantau di Medan.

Faktor bahasa sebagai media komunikasi antara perantau Mandailing dan Minangkabau boleh dikatakan tidak mengandung hambatan. Sebab seperti telah diuraikan di atas, banyak orang-orang Mandailing yang merantau ke Medan sejak berada di kampung halamannya telah memahami, malahan dapat mempergunakan bahasa Minangkabau. Dalam hal ini perlu pula diketahui bahwa mayoritas dari perantau-perantau Mandailing di Medan pada masa yang lalu adalah yang berasal dari daerah Mandailing Julu (Kotanopan dan sekitarnya) yang berdekatan sekali letaknya dengan daerah Minangkabau.

Jadi bukan suatu hal yang aneh, apabila dalam berkomunikasi, selain mempergunakan bahasa Melayu, tak jarang perantau Mandailing dan Minangkabau mempergunakan bahasa Minangkabau, dan ada pula yang mempergunakan bahasa Mandailing. Sebab banyak juga orang Minangkabau yang bisa berbahasa Mandailing.

2.1.2. Komunikasi Antara Perantau Mandailing dan Suku Bangsa Melayu.

Adanya semacam rumusan bahwa, "Memeluk agama Islam disebut "Masuk Melayu" (T. Luckman Sinar S.H, 1980: 2) cukup menguntungkan bagi perantau-perantau Mandailing di Sumatera Timur, dan khususnya di Medan sebagai salah satu pusat kekuasaan suku bangsa Melayu pada masa yang lalu. Karena dengan "rumusan" yang demikian itu, perantau-perantau Mandailing yang sudah sejak lama menganut agama Islam, dapat diterima sebagai orang sudah "Masuk Melayu" (T. Luckman Sinar, S.H., 1980: 2). Dengan demikian perantau-perantau Mandailing selalu mendapat pintu terbuka dan uluran tangan dari suku bangsa Melayu. Yang berarti pula sangat memperlancar komunikasi antara Perantau Mandailing dengan suku bangsa Melayu di Medan.

Mengingat bahwa jumlah suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Medan relatif hanya sedikit,*) dan umumnya terdiri dari kaum bangsawan saja, maka kegiatan komunikasi yang terjadi antara perantau Mandailing dengan mereka tidak begitu banyak. Dan boleh dikatakan komunikasi antara mereka kebanyakan merupakan komunikasi formal. Sebab kebanyakan kaum bangsawan Melayu yang bertempat tinggal di Medan, mempunyai jabatan-jabatan (penting) dalam pemerintahan Sultan.

Bagaimana lancar dan berhasilnya komunikasi antara perantau Mandailing dengan suku bangsa Melayu di Medan pada masa yang lalu, karena adanya latar belakang agama Islam sebagai salah satu faktor pendukung yang sangat penting dapat dilihat dalam berbagai kenyataan.

Sejak munculnya perantau-perantau Mandailing di Sumatera Timur dan Medan menjelang akhir abad yang lalu, sampai pada masa sekarang ini, belum pernah terjadi konflik antara mereka dengan suku bangsa Melayu. Malahan Sultan yang berkuasa di Medan, tak jarang memberi kesempatan bagi perantau Mandailing untuk masuk dalam kalangan istana. Terutama ulama-ulama orang Mandailing. Malahan ada yang diangkat menjadi mufti Sultan, seperti Tuan Syekh Hasan Maksum, yang namanya kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perkampungan di Medan, yaitu "Kota Maksum" yang menjadi tempat pemukiman perantau-perantau Minangkabau di Medan. Selain itu, jago-jago silat, ahli pelaga ayam dan burung balam yang berasal dari kalangan perantau Mandailing banyak yang diberi pekerjaan oleh Sultan, dan diberi tanah di Sungai Mati, yaitu satu daerah perkampungan yang dekat sekali dengan istana Sultan.

Selain itu banyak pula perantau-perantau Mandailing yang diberi kedudukan sebagai penghulu di beberapa daerah pemukiman yang terdapat di Medan. Dan pernah pula terjadi, Sultan mengizinkan atau memberi prioritas bagi keluarga-keluarga raja Mandailing yang kebetulan meninggal dunia di Medan untuk dimakamkan di tempat pekuburan suku bangsa Melayu yang terletak tidak jauh dari istana Sultan.

Untuk mendapatkan gambaran, bagaimana perantau Mandailing berkomunikasi dengan suku bangsa Melayu di Medan, khususnya dengan Sultan yang berkuasa di Medan dapat dilihat dari kejadian ketika seorang tuan syekh orang Mandailing, yaitu syekh Moehammad Jacob melakukan dialek dengan Sultan untuk menyelesaikan sesuatu urusan.

Pada tahun 1926, para perantau Mandailing terlibat dalam satu konflik yang menyangkut tanah wakaf (tanah pekuburan) orang-orang Mandailing yang terletak di Sungai Mati. Tak jauh dari istana Sultan. Sebagai seorang ulama di kalangan perantau Mandailing. Syekh Moehammad Jacob ikut terlibat dalam konflik tersebut. Tentang Tuan Syekh tersebut Mangaraja Hoetan (1926: 120) mengatakan :

"Adapun Tuan Syekh Moehammad Jacobe sebagaimana sudah sama dimaklumi, bukan saja beliau sebagai seorang guru agama yang tertua dan dituakan, tetapi juga beliau terkenal jadi kepala pergerakan bangsa Mandailing. Dalam pergerakan mempertahankan kebangsaan Mandailing itu, yang di dalamnya sebagian besar bertaut dengan perkara tanah wakaf, beliau jugalah yang terkemuka buat menghadapi orang-orang yang berkuasa

Tindakan Syekh Moehammad Jacobe yang berani itu ialah dengan mengirim rekes (surat) kepada Gubernur Jenderal di Betawi, dalam usahanya mencari penyelesaian untuk masalah tanah wakaf orang-orang Mandailing di Sungai Mati, Medan maka Syekh Jacobe diberhentikan dari kedudukannya sebagai Lid Kerapatan Medan. Tentang hal ini Mangaraja Ihoetan menulis (1926: 121).

"Akan perhentianya, meskipun telah beberapa puluh tahun menjadi Lid Kerapatan dengan selamat dan senantiasa memberi pertimbangan yang baik dalam pengadilan yang sangat dihargakan oleh Sultan atau Tengku Besar yang jadi Voorzitter Kerapatan, tetapi tidaklah dinyatakan kelepasan itu dengan hormat dan tidak diucapkan terima kasih atas jasanya selama turut berduduk dalam Kerapatan, melainkan kelepasan itu dinyatakan pula sebab mendurhaka

Oleh karena itu, selesai mendapat chabar yang pasti akan kelepasan yang demikian, pada suatu hari Tuan Syekh Moehammad Jacobe pergi menghadap Sultan ke istana. Di sana beliau bertanya apakah sebab beliau dilepas dengan dikatan sebab durhaka? Siapakah yang melepaskan beliau, apakah Gouverneur atautkah tuanku Sultan? Beliau menerangkan lagi amat sedih hatinya sebab dikatakan durhaka itu, pada hal sepanjang ingatannya, selama ini belum pernah ia berbuat sesuatu pendurhakaan kepada tuanku Sultan, melainkan sebarang apa titah, selamanya beliau junjung. Di sini mula-mula tuanku Sultan menerangkan, bahwayang melepaskan dia itu, ialah Gouverneur, dan yang mengatakan durhaka Gouverneur juga.

Tetapi tuanku Sultan meminta supaya tuan Syekh Moehammad Jacobe janganlah banyak susahkan pasal itu, sebab kalau buat Sultan sendiri tetaplah memandang tuan Syekh Moehammad Jacobe ada seorang yang baik dan setia padanya"

Dari apa yang diungkapkan oleh Mangaraja Iheetan ini, bukan saja dapat gambaran mengenai adanya hubungan yang baik antara perantau Mandailing dengan suku bangsa Melayu di Medan, khususnya dengan Sultan. Tetapi kita mendapat petunjuk pula bahwa Sultan menaruh kepercayaan kepada tokoh ulama orang Mandailing untuk menduduki jabatan penting (sebagai unsur pimpinan Kerapatan Sultan).

Demikianlah gambaran sepintas tentang komunikasi antara perantau Mandailing dengan suku bangsa Melayu di Medan pada waktu yang lalu yang ternyata banyak membawa hasil-hasil yang positif bagi kedua belah pihak.

2.1.3. Komunikasi Antara Perantau Minangkabau dengan Suku Bangsa Melayu.

Sebagaimana halnya dengan komunikasi antara perantau Mandailing dan suku bangsa Melayu di Medan pada masa yang lampau, komunikasi antara perantau-perantau Minangkabau dengan suku bangsa tersebut umumnya merupakan komunikasi formal. Hal itu sesuai dengan keadaan suku bangsa Melayu yang kebanyakan mempunyai status tersendiri dalam pemerintahan Sultan dan kelas mereka sebagai kaum bangsawan. Sesuai dengan kedudukan perantau Minangkabau yang kebanyakan sebagai pedagang penjaja, sementara kaum bangsawan Melayu yang bertempat tinggal di Medan tidak mempunyai profesi yang menyebabkan mereka harus banyak berhubungan dengan perantau Minangkabau, maka komunikasi antara mereka tidak begitu banyak terjadi. Dan meskipun daerah tempat tinggal perantau Minangkabau, yaitu Kota Maksu berdekatan letaknya dengan daerah tempat tinggal suku bangsa Melayu, komunikasi antara mereka hanya terbatas dalam keperluan yang penting-penting saja. Sebab pergaulan di antara mereka yang boleh dikatakan "bertetangga" itu tidak banyak terjadi.

Para perantau Minangkabau selalu sibuk dengan urusan dagangnya sehari-hari, sementara itu suku bangsa Melayu yang kebanyakan bangsawan lebih suka bergaul sesama mereka saja. Namun demikian tidak pernah terjadi konflik terbuka antara kedua belah pihak.

Satu hal perlu dicatat bahwa, perantau Minangkabau di Medan banyak yang menjadi penganjur dan anggota organisasi agama Islam Muhammadiyah. Hal ini juga menyebabkan terjadinya pembatasan komunikasi antara mereka dengan suku bangsa Melayu. Karena dalam kenyataannya Sultan atau suku bangsa Melayu umumnya tidak menaruh simpati terhadap organisasi

tersebut. Hal ini terbukti bahwa, "Di dalam wilayah kekuasaan Gubernemen mesjid-mesjid "Muhammadiyah" dibenarkan untuk didirikan, tetapi di dalam wilayah kerajaan Deli dilarang" (T. Luckman Sinar S.H, 1980: 12).

Namun demikian adanya persamaan anutan agama antara perantau Minangkabau dan suku bangsa Melayu, menyebabkan di antara mereka tetap terpelihara suasana saling menghargai dan saling tidak mengganggu.

Diberikannya kesempatan bagi perantau Minangkabau oleh Sultan untuk membangun daerah tempat tinggal mereka dalam jarak yang tidak begitu jauh dari tempat kediaman kaum bangsawan Melayu sudah cukup menunjukkan bukti bahwa perantau Minangkabau diterima kehadirannya secara baik oleh Sultan dan suku bangsa Melayu umumnya di Medan. Bukti lain tentang hal ini ialah diberikannya tanah pekuburan khusus untuk orang-orang Minangkabau di Sungai Mati yang tidak begitu jauh letaknya dari kompleks istana Sultan.

Kalau sekiranya dibandingkan frekwensi komunikasi yang terjadi antara perantau Minangkabau dengan suku-suku bangsa Melayu, dengan frekwensi komunikasi antara perantau Minangkabau dan perantaru Mandailing di Medan pada masa yang lalu, dapat diperhitungkan bahwa frekwensi komunikasi yang terakhir ini akan lebih besar. Sebab lebih banyak faktor-faktor sosial dalam hubungan perantau Minangkabau dengan perantau Mandailing yang menyebabkan mereka harus lebih banyak berkomunikasi.

Misalnya saja adanya persamaan profesi sebagai pedagang, dan juga banyaknya perantau Mandailing yang bekerja sebagai pegawai dan guru yang menyebabkan orang-orang Minangkabau dalam hal-hal tertentu harus berhubungan dengan mereka. Dan juga karena banyaknya perantau Minangkabau yang menjadi tukang jahit, tukang pangkas, tukang patri dan lain-lain. Hal demikian itu tidak terdapat di antara hubungan perantau Minangkabau dengan suku bangsa Melayu di Medan, yang mayoritas berkedudukan sebagai kaum bangsawan.

2. KOMUNIKASI ANTAR DAERAH

Membicarakan masalah komunikasi antar daerah, dalam hubungannya dengan perantau Mandailing dan Minangkabau yang dahulu bertempat tinggal di Medan, tentu tidak terlepas dari kondisi sarana transportasi yang tersedia pada masa itu. Seperti yang telah diuraikan terdahulu banyak di antara orang-

orang Mandailing yang datang merantau ke Deli atau Medan dengan berjalan kaki. Sebab pada waktu itu memang belum ada transportasi yang menghubungkan daerah Mandailing dengan Sumatera Timur. Baru pada tahun 1910 Deli Auto Mobil Club pertama kali tersedia pengangkutan dengan mobil yang menghubungkan daerah Sumatera Timur (Medan) dengan daerah Sumatera Barat (Padang). Karena daerah Mandailing berada dalam jalur lintasan pengangkutan dengan mobil itu maka dengan sendirinya perantau Mandailing mendapat kesempatan untuk memanfaatkan sarana transportasi mobil itu untuk mengadakan komunikasi dengan daerah asal mereka. Tetapi karena keadaan sarana transportasi dengan mobil pada mulanya masih sangat terbatas, maka komunikasi yang dilakukan oleh perantau Mandailing dan perantau Minangkabau dengan daerah asal mereka masing-masing masih sangat terbatas. Tetapi sarana yang masih terbatas itu cukup bermanfaat bagi para perantau Minangkabau untuk mengirimkan sebahagian hasil pencaharian mereka ke kampung asalnya. Dalam hal ini perlu diingat bahwa, pada masa yang lalu, dan mungkin juga sampai pada waktu ini, perantau Minangkabau mempunyai kebiasaan untuk mempergunakan sebahagian hasil pencaharian mereka dirantau orang untuk dimanfaatkan di kampung halaman.

Misalnya untuk membangun rumah tempat tinggal. Perantau Mandailing sendiri tidak mempunyai kebiasaan yang demikian itu. Mereka lebih senang mempergunakan hasil pencaharian mereka di tempat mereka merantau. Misalnya untuk membeli tanah dan memperbesar modal dalam kegiatan perdagangan. Orang-orang Mandailing yang datang ke Medan untuk menuntut ilmu, biasanya melakukan komunikasi yang teratur dengan keluarganya di kampung halaman, terutama untuk keperluan pengiriman uang belanja dari kampung.

Disamping adanya kebiasaan perantau Minangkabau untuk mengirimkan sebahagian hasil pencaharian mereka ke kampung, yang menyebabkan komunikasi dengan daerah asal mereka tidak atau jarang terputus sama sekali, mereka mempunyai kebiasaan pula untuk pulang kekampung sekali dalam setahun. Yaitu pada waktu menjelang hari raya Idulfitri. Oleh sebab itu setelah adanya transportasi mobil yang menghubungkan Medan dengan Padang, maka menjelang hari raya Idulfitri setiap tahunnya banyak perantau Minangkabau yang pulang kampung untuk berhari raya dengan sanak keluarga. Dan beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi ke Medan. Dan beberapa di antara perantau Mandailing ada juga melakukan hal yang sama. Tapi jumlahnya tidak sebanyak perantau Minangkabau.

Menjelang tahun 1930-an, beberapa orang saudagar kaya di Mandailing telah mempunyai mobil yang mereka pergunakan untuk pengangkutan barang maupun penumpang dari Mandailing ke Medan dan sebaliknya. Beberapa di antara mobil pengangkutan milik saudagar dari Mandailing itu ada pula yang melakukakan perjalanan untuk mengangkut barang dan penumpang dari Medan sampai ke Bukittinggi dan Padang. Munculnya mobil transport milik saudagar-saudagar Mandailing itu dengan sendirinya banyak memberikan kemudahan bagi perantau Mandailing maupun Minangkabau untuk berkomunikasi dengan kampung halaman atau daerah asal mereka masing-masing. Dan jumlah perantau Minangkabau yang pulang kampung diwaktu hari raya Idulfitri semakin bertambah. Demikian juga pengiriman sebahagian hasil pencaharian mereka ke kampung halaman semakin mudah.

Meningkatnya fasilitas transportasi yang dapat menghubungkan daerah Sumatera Timur dengan Mandailing, menyebabkan bertambahnya jumlah orang-orang Mandailing yang datang ke Medan untuk mencari nafkah ataupun untuk belajar. Arus penumpang yang melakukan perjalanan antara Medan dan Mandailing serta sebaliknya, ternyata dimanfaatkan oleh perantau Mandailing untuk menjadi sarana komunikasi, dengan daerah asal mereka. Sehingga pada masa itu hampir setiap orang Mandailing yang datang ke Medan selalu membawa berita ataupun surat dan barang kiriman untuk disampaikan kepada perantau-perantau Mandailing yang ada di Medan. Dan orang-orang Mandailing yang kebetulan pulang ke daerahnya dimanfaatkan pula untuk sarana komunikasi, yaitu untuk menyampaikan pesan atau surat dan barang kiriman kepada sanak saudara di kampung halaman. Hal serupa ini dilakukan pula oleh perantau Minangkabau.

Di sekitar tahun 1930-an, di Medan sudah terdapat beberapa hotel atau losmen kepunyaan orang Mandailing, seperti Hotel Muslim dan Hotel Islamiyah di jalan Ismailiyah. Biasanya saudagar-saudagar yang datang dari Mandailing ke Medan, kalau tidak menginap di tempat keluarga, akan menginap di hotel-hotel tersebut. Pada kesempatan yang demikian, para perantau Mandailing di Medan akan datang mengunjungi mereka untuk menanyakan kabar dari daerah asalnya. Dan melalui saudagar-saudagar itu pula disampaikan pesan lisan ataupun surat dan barang kiriman kepada sanak keluarga mereka di kampung. Dan pada masa yang lalu, sudah lumrah kalau ada orang Mandailing yang datang dari kampung ke Medan, untuk beberapa waktu akan sibuk menyampaikan pesan dari kampung kepada perantau

Mandailing yang bertempat tinggal di Medan. Sistem komunikasi yang demikian ini masih saja berlangsung sampai tahun 1940-an, meskipun hubungan pos dan telegraph sudah tersedia. Sebab komunikasi dengan kampung halaman, yang dilakukan melalui perantara kenalan ataupun sanak keluarga dirasakan oleh para perantau Mandailing lebih memuaskan dan lebih menimbulkan keakraban, dengan orang-orang atau sanak keluarga di daerah asal mereka. Sebab umumnya yang dilakukan mereka dalam berkomunikasi dengan daerah asalnya ialah urusan keluarga. Demikian juga halnya dengan perantau-perantau Minangkabau.

3. PEMBAURAN

Hal utama yang akan diungkapkan dalam membicarakan masalah pembauran antara perantau-perantau Mandailing dan Minangkabau serta suku bangsa Melayu, ialah yang menyangkut perkawinan dan hal-hal yang timbul dari padanya. Sebagai latar belakang dapat dikemukakan bahwa, di masa itu umumnya perantau-perantau Mandailing dan Minangkabau yang menetap di Medan masih tetap terikat dengan nilai-nilai budaya maupun adat istiadat tradisional mereka masing-masing.

Hal itu tentu saja menimbulkan pengaruh terhadap pembauran antara perantau Mandailing dengan perantau Minangkabau ataupun dengan suku bangsa Melayu. Dalam kenyataannya pembauran antara mereka yang terjelma dalam bentuk perkawinan tidak begitu banyak terjadi. Kemungkinan sekali hal ini disebabkan adanya latar belakang adat istiadat yang berbeda dan yang masih mengikat erat masing-masing suku bangsa itu. Sampai pada tahun tigapuluhan orang-orang Mandailing di negerinya maupun di rantau masih terikat kepada adat perkawinan tradisional mereka. Oleh sebab itu umumnya mereka lebih banyak melakukan perkawinan di antara sesama mereka, malahan masih sangat terikat oleh prefensi tradisional dalam memilih jodoh. Yaitu mengambil anak perempuan saudara laki-laki dari ibu, yang disebut "boru tulan" untuk menjadi isteri. Dan bagi perantau Mandailing yang mampu, lebih senang mengambil isteri dari kampung halaman sendiri, sesuai dengan prefensi tradisional dalam memilih jodoh.

Jarangnya terjadi perkawinan antara perantau Mandailing dengan perantau Minangkabau dan suku bangsa Melayu di Medan pada masa yang lalu terutama disebabkan oleh faktor adat. Orang Mandailing yang menurut adatnya menganut garis keturunan patrilineal, merasa kurang serasi untuk mengadakan

hubungan perkawinan dengan orang Minangkabau yang matri-lineal. Demikian juga dengan suku bangsa Melayu yang parental. Hal serupa terjadi pula sebaliknya.

Suku bangsa Melayu yang bertempat tinggal di Medan, dalam kedudukan mereka yang kebanyakan tergolong kaum bangsawan, mempunyai rasa enggan untuk mengadakan hubungan perkawinan dengan para perantau. Secara implisit di antara mereka tergantung sikap "Menganggap rendah" para perantau, yang menyebabkan orang-orang Melayu yang bertempat tinggal di Medan enggan mengadakan hubungan perkawinan dengan orang-orang pendatang dari Mandailing dan Minangkabau itu.

Sebaliknya dikalangan perantau Mandailing dan Minangkabau terdapat pula sikap yang serupa. Sebab bagi perantau Mandailing ataupun Minangkabau, suku bangsa Melayu di Medan dan sekitarnya adalah "orang kampung" atau "Orang Maya-maya" yang dipandang kurang serasi untuk dijadikan isteri ataupun suami.

Dalam hubungan ini dapat dicatat bahwa, di kalangan perantau Mandailing ada juga yang melakukan hubungan perkawinan dengan orang-orang Melayu atau "orang kampung-maya-maya". Tetapi yang bertempat tinggal di luar Medan, seperti di Percut, Batang Kuis dan lain-lain. Biasanya perantau Mandailing yang telah melakukan hubungan perkawinan dengan mereka, dengan sendirinya menghindarkan diri dari kelompok perantau Mandailing dan menetap di tempat isteri atau suaminya, sehingga mereka dipandang oleh para perantau Mandailing telah menjadi "orang kampung - maya-maya".

Jumlah perantau Mandailing yang melakukan hubungan perkawinan dengan orang-orang Melayu (di luar kota Medan biasanya) lebih banyak daripada jumlah perkawinan perantau Minangkabau. Dan dalam perkawinan antara perantau Minangkabau dan Mandailing, walaupun ada, biasanya pria Minangkabaulah yang mengawini perempuan Mandailing. Hal sebaliknya sangat jarang terjadi. Dari sudut pandangan orang Mandailing, terjadinya perkawinan antara orang Minangkabau dengan orang Mandailing atau sebaliknya, adalah merupakan hal yang luar biasa dan ganjil, sebab adanya perbedaan adat di antara mereka.

Kiranya perlu juga dikemukakan bahwa, meskipun pembauran antara perantau Mandailing dan Minangkabau serta suku bangsa Melayu dalam bentuk perkawinan amat jarang terjadi pada masa yang lalu, di Medan.

Hubungan di antara ketiga suku bangsa tersebut tetap baik. Dalam arti tidak pernah terjadi konflik di antara mereka, dan mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis dan saling isi mengisi dalam berbagai kepentingan hidup bersama. Diperkirakan persamaan agama yang dianut oleh ketiga suku bangsa inilah yang menjadi faktor pendukung utama untuk selalu terjaminnya komunikasi dan hubungan yang harmonis di antara sesama mereka. Dan khususnya antara orang-orang Mandailing dan Minangkabau, secara kultur mereka sejak dahulu kala sudah saling kenal dan punya hubungan sampai batas-batas tertentu sebagai dua suku bangsa yang hidup bertetangga di daerah Mandailing dan Minangkabau. Dan latar belakang yang demikian itu tentu saja menguntungkan bagi hubungan di antara mereka sebagai sesama perantau di Medan pada masa yang lalu, dan juga sampai masa sekarang ini.

4. KESIMPULAN.

Dari semua uraian tadi dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Komunukasi antar suku bangsa Mandailing dan Minangkabau serta Melayu masing-masing sebagai perantau dan "penduduk asli" di Medan sejak menjelang akhir abad ke 19 sampai pada dasa warsa empat puluhan senantiasa berjalan dengan baik. Dalam arti tidak banyak mengalami hambatan, dan tanpa konflik. Diperkirakan faktor utama yang menjamin lancar dan terpeliharanya komunikasi antara sesama mereka. Faktor agama menumbuhkan semacam integrasi antara sesama mereka dalam kehidupan masyarakat di Medan yang ditempati oleh bermacam bangsa dan suku bangsa.
- b. Sesuai dengan fasilitas yang dapat dipergunakan, perantau Mandailing maupun Minangkabau yang bertempat tinggal di Medan pada masa yang lalu senantiasa memelihara komunikasi dengan daerahnya masing-masing. Sebab komunikasi dengan daerah asal mereka merupakan kebutuhan untuk tetap dapat memelihara nilai-nilai budaya tradisional yang mereka bawa dari daerah asal masing-masing ke perantauan di Medan.
- c. Pembauran dalam bentuk hubungan perkawinan jarang terjadi antara para perantau Mandailing dan Minangkabau maupun antara mereka dengan suku bangsa Melayu sebagai "penduduk asli" di Medan. Hal ini diperkirakan dilatar belakangi oleh perbedaan nilai budaya dan adat istiadat tradisional masing-masing dan juga oleh sikap mereka dalam memandang

tidak menilai kedudukan mereka sebagai suku bangsa, terhadap
 suku bangsa yang lain. Namun demikian, dalam hidup bersa-
 merta di Medan, para perantau Mandailing dan Minangkabau
 serta suku bangsa Melayu, tidak sampai terlibat ke dalam si-
 ikap eksklusif yang ekstrim, karena faktor kesamaan agama di-
 antara mereka tetap menjadi motivasi yang kuat untuk
 menyebarkan dan memelihara integrasi kaum Okhawah di
 antara sesama mereka sebagai tiga suku bangsa yang berbeda-
 beda latar belakang budaya serta adat istiadatnya; tetapi sama-
 sama bertanah di Medan.

A. KESIMPULAN

Dari semua uraian tadi dapat diambil beberapa kesimpulan
 sebagai berikut :

a. Komunikasi antar suku bangsa Mandailing dan Minangkabau
 serta Melayu masing-masing sebagai perantau dan "penduduk
 asli" di Medan sejak menjelang akhir abad ke 19 sampai pada
 masa warsa empat puluhan senantiasa berjalan dengan baik.
 Dalam arti tidak banyak mengalami hambatan dan banyak
 konflik. Diperkirakan faktor utama yang menjamin tercapai
 dan terpeliharanya komunikasi antara sesama mereka faktor
 agama memendahkan semacam integrasi antara sesama
 mereka dalam kehidupan masyarakat di Medan yang ditem-
 pati oleh bermacam bangsa dan suku bangsa.

b. Sama dengan fasilitas yang dapat dipergunakan, perantau
 Mandailing maupun Minangkabau yang bertempat tinggal di
 Medan pada masa yang lalu senantiasa memelihara komuni-
 kasi dengan daerahnya masing-masing. Sebab komunikasi
 dengan daerah asal mereka merupakan kebutuhan untuk
 tetap dapat memelihara nilai-nilai budaya tradisional yang
 mereka bawa dari daerah asal masing-masing ke perantauan di
 Medan.

c. Tempuran dalam bentuk bentuk hubungan perkawinan jarang terjadi
 antara para perantau Mandailing dan Minangkabau maupun
 antara mereka dengan suku bangsa Melayu sebagai "pendu-
 duk asli" di Medan. Hal ini diperkirakan dilatar belakangi
 oleh perbedaan nilai budaya dan adat istiadat tradisional
 masing-masing dan juga oleh sikap mereka dalam memelihara

DAFTAR BACAAN

1. Ihoetan, Mangaraja. 1926. **Riwayat Tanah Wakaf Bangsa Mandailing di Sungai Mati Medan**, Medan : N.V.H. MIH & Drukkerij "Syarikat Tapanoeli."
2. Naim, Dr. Mochtar, 1979. **Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau**, Yogyakarta : Gajahmada University Pres.
3. Said, H. Mohammad. 1976 **Sejarah Pers di Sumatera dengan Masyarakat yang Dicerminkannya**, Medan : (1885 - Maret - 1942), Medan : Penerbit Percetakan Waspada.
4. Sinar S.H. T. Lucjman. 1980. **Perkembangan Kebudayaan Melayu di Sumatera Timur dan di Kota Medan Khususnya**, Medan : Makalah.
5. Soekarto, Soerjono. **Sosiologi, Suatu Pengantar**, Jakarta : Yayasan Penerbit Universitas, kutipan dari Kimball Young – Raymond W, Mack: *Sociology and Social Life*, New York 1959: American Book Company.
6. Susanto, Dr. Phil, Astrid S. 1980 **Komunikasi Sosial di Indonesia**, Bandung : Penerbit Binacipta.
7. **Gids voorde Oostkust van Sumatra (Deli)**, Medan : Commanditaire Venusascap Kohler & Co.

Nara Sumber :

A. Rahman Lubis, 58 tahun, pendidikan HIS, bekas anggota pergerakan.

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 611/F I. IV/T 82

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SEMINAR SEJARAH LOKAL**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa salah satu kegiatan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 1982/1983 adalah mengadakan Seminar Sejarah Lokal di Denpasar Bali.

b. bahwa untuk dapat tercapainya tertib kerja yang berdaya guna dalam penyelenggaraan Seminar tersebut, maka dipandang perlu membentuk "Panitia Seminar Sejarah Lokal".

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1982;
- c. Nomor 237/M Tahun 1978;
- d. Nomor 14 A Tahun 1980 beserta penyempurnaannya;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. Nomor 0222 e/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- b. Nomor 0110/P/1982 tanggal 29 Maret 1982;

3. Surat Pengesahan DIP Tahun Anggaran 1982/1983 Nomor 472/XXIII/3/1982 tanggal 11 Maret 1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : a. Membentuk "Panitia Seminar Sejarah Lokal" yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut "Panitia Seminar" dengan tugas mempersiapkan, melaksanakan serta menyelesaikan Seminar Sejarah Lokal di Denpasar Bali;
b. Panitia Seminar terdiri dari :
1. Panitia Pengarah;
2. Panitia Penyelenggara.
- KEDUA** : Susunan/keanggotaan serta kedudukan dalam kepanitiaan "Panitia Seminar" tersebut pada pasal "Pertama" seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : "Panitia Seminar" harus telah menyelesaikan tugasnya pada akhir bulan Agustus 1982, dan mewajibkan Ketua Panitia menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan seminar, hasil seminar serta pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan;
- KEEMPAT** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan keputusan ini dalam rangka penyelenggaraan seminar dibebankan pada anggaran yang disediakan dalam Daftar Isian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional tanggal 11 Maret 1982 nomor 472/XXIII/3/1982;
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1982.

DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL: 12 AGUSTUS 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

NIP. : 130 119 123

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 12 Agustus 1982
NOMOR 611/F.IV/T 82

Daftar Susunan/Keanggotaan Panitia Seminar

Pelindung : Prof. Dr. Haryati Soebadio

**Penasehat (teknis/
administratif)** : – Drs. Bastomi Ervan
– Dr. S. Budhisantoso

Panitia Pengarah

K e t u a : Dr. T. Ibrahim Alfian

Sekretaris : Drs. A.B. Lapian

Anggota : – Dr. Taufik Abdullah
– Dr. Kuntowijoyo
– Drs. F.A. Sutjipto
– Drs. Abdurrachman Surjomihardjo
– Drs. R.Z. Leirissa. MA
– Drs. Bambang Sumadio

**Panitia Penyeleng-
gara** : Drs. M. Soenjata Kartadarmadja

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDUYAAN
A.n.b.
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

PROF. DR. HARYATI SOEBADIO

NIP. : 130 119 123

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretariat Negara
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator
4. Semua Menteri Negara
5. Semua Menteri
6. Semua Menteri Muda
7. Sekjen Dep P dan K.
8. Inspektur Jenderal Dep P. dan K.
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K.
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K.
11. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
12. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K.
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Dep P dan K.
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi
15. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
16. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep P dan K.
17. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara
19. Ditjen Anggaran
20. Ditjen Pajak
21. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep. Keuangan
22. BAPPENAS
23. Ketua DPR-RI
24. Komisi IX DPR-RI
25. Pengurus Pusat KORPRI
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DAFTAR PESERTA / PEMBAWA MAKALAH.

No.	Nama	Judul Makalah
1.	Dr. S. Budhisantoso	Arti Pentingnya Sejarah Lokal dalam Pembangunan Nasional.
2.	Dr. Taufik Abdullah	Sejarah Lokal, Kesadaran Sejarah dan Integrasi Nasional
3.	Dr. Kuntowijoyo, MA.	Kota Sebagai Bidang Kajian Sejarah
4.	Drs. Muchlis	Sejarah Lokal (Tantangan dan Harapan)
5.	Dr. Onghokham	Stratifikasi Sosial dan Kepemimpinan.
6.	Dr. T. Ibrahim Alfian	Sejarah Lokal dalam Kurikulum Universitas, Sebuah Catatan Ringkas
7.	Drs. Munandjar Widiyatmiko	Kepemimpinan dalam Struktur Masyarakat Lio di Nusa Tenggara Timur.
8.	Drs. Frans Hitipeuw	Kerajaan Ternate dan Tidore di Abad ke XIV
9.	Dr. F.A. Sutjipto	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan di Daerah Surabaya. Suatu Studi Perbandingan antara Masa Sebelum dan Sesudah Pertengahan Abad ke-18.
10.	Dra. Mona Lohanda	"Tuan Bek" dan "Inlandsche Kommandant Batavia"
11.	Drs. Mardanas Safwan	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal di Sumatera Barat
12.	Prof. Dr. Ngurah Bagus	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinannya.
13.	Drs. Suyatno	Stratifikasi Sosial dan Pola Kepemimpinan Lokal di Surakarta.
14.	Drs. H. Ramli Nawawi	Peranan Madrasah pada Masa Penjajahan Belanda di Kalimantan Selatan.
15.	Drs. A.A. Gde Putra Agung	Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Bali.

-
16. Drs. Ishaq Thaher Pendidikan dan Perkembangan Sosial Ekonomi di Bukittinggi Periode 1900 – 1942.
 17. Drs. Rusdi Sufi Pendidikan Barat dan Modernisasi Pendidikan Agama di Aceh.
 18. Dra. Marleily Asmuni Pendidikan sebagai Faktor Dinamisasi Sosial di Daerah Riau pada Awal Abad XX.
 19. Drs. Muhammad Ibrahim Gerakan Protes Masyarakat Pedesaan di Aceh terhadap Militerisme Jepang. Kasus Bayu dan Pandrah.
 20. Drs. Soegijanto Padmo Aspek Historis dari Pembangunan Pedesaan di Jawa Tengah.
 21. Drs. R.Z. Leirissa, M.A. Pergolakan di Paulohy (Teluk Eldaputih) 1836 – 1837.
 22. Drs. Suhartono "Wong Cilik" Problema dan Dinamika Surakarta Abad 19.
 23. Drs. Sediono M.P. Tjondronegoro Membangun Prasarana untuk Merangsang Penulisan Sejarah Lokal demi Integrasi Nasional.
 24. Dra. A.M. Djuliati Surojo Dari Subsistensi ke Perdagangan Desa Pantai Maribaya : 1950–1978
 25. Drs. Ma'moen Abdullah Stratifikasi dan Pola Kepemimpinan Lokal di Daerah Sumatera Selatan.
 26. Drs. Anhar Gonggong Sulawesi Selatan dan Komunikasi; Dalam Rangka Proses Integrasi Bangsa Melangkah ke pemahaman diri melalui Sejarah.
 27. Dr. Nico S. Kalangie Masalah Komunikasi Antar budaya
 28. Drs. J.R. Chaniago Penduduk Bukittinggi sebelum Perang Sebuah Kerangka Studi.
 29. Drs. F.E.W. Parengkuan Orang Manado Sebuah Gambaran Singkat.
 30. Drs. Suwardi M.S. Komunikasi antar Daerah antar Suku Bangsa dan Pembauran di Daerah Riau.
 31. Drs. Helius Syamsuddin Sumbawa Hubungan antar Pulau dan Interaksi antar Suku Bangsa.

32. Drs. Nazief Chatib dan Ir. Pangaduan Lubis Latar Belakang Sejarah dan Interaksi Sosial Peranan Mandailing dan Minangkabau dengan Suku Bangsa Melayu di Medan.
33. Dr. Sriwulan Rujati Mulyati Sastra dan Sejarah Lokal.
34. Dr. Ayatrohaedi Karya Sastra sebagai Sumber Sejarah.
35. Dr. Edi S. Ekadjati Sumbangan Karya Sastra Sejarah terhadap sejarah Lokal di Indonesia
36. Drs. Suripan Sadi Hutomo Sastra Sejarah dan Penulisan Sejarah Lokal.

DAFTAR PENINJAU SEMINAR SEJARAH LOKAL

1. Dr. Astrid S. Susanto – B A P P E N A S.
2. Dr. R. P. Suyono – Kepala Pusat Peninggalan Arkeologi Nasional.
3. Drs. Uka Tjandarasmita – Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
4. F. X. Sutopo – Direktur Kesenian,
5. Drs. Amir Sutaarga – Direktur Permuseuman,
6. Arimurthi, SE. – Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
7. Dra. Sumartini – Kepala Arsip Nasional RI,
8. Dr. S u k m o n o – Proyek Pemugaran Candi Borobudur.
9. Drs. Djoko Sukiman – Universitas Gajah Mada,
10. Drs. I. Made Sutaba – Kepala Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Kanwil Departemen P dan K Propinsi Bali.
11. Drs. A. Adaby Darban – Universitas Gajah Mada,
12. Drs. H. Bambang Suwondo – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional.
13. Drs. Djenen M.Sc. – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
14. Drs. Sugiarto Dakung – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
15. Sutrisno Kutoyo – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional.
16. Zainuddin Ayub – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
17. Drs. S u l o s o – Dit. Sejarah dan Nilai Tradisional,
18. Drs. R. Sukamto – B A P P E N A S,
19. Drs. Tashadi – Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,
20. Sudiardjo, SH. – Kepala Bagian Perencanaan Ditjen. Kebudayaan,
21. Sunartik Sukotjo – Bendaharawan Direktorat Jenderal Kebudayaan,
22. Firdaus Burhan – Swasta,
23. Drs. Suwadji Syafei – Universitas Indonesia.

LAPORAN PANITIA PENGARAH SEMINAR SEJARAH LOKAL DI DENPASAR

IV

31 Agustus – 4 September 1982

Setelah mengikuti pembicaraan-pembicaraan selama 4 hari, kami menyatakan kegembiraan karena partisipasi yang penuh dari semua peserta seminar. Kegembiraan ini bertambah karena walau pun waktu persiapan relatif terbatas, dan sidang-sidang berjalan dari pagi sampai jauh malam, kegairahan dalam berdiskusi tetap tinggi.

Disamping itu selama seminar, terjalin hubungan profesi dan persahabatan yang lebih akrab antara tenaga-tenaga sejawan dari berbagai daerah. Barangkalai tak perlu kami tegaskan lagi bahwa salah satu suasana yang akan dapat meningkatkan kemajuan dalam lapangan ilmu pengetahuan ialah terjalinnya komunikasi yang baik antara para pendukungnya.

Seminar ini selanjutnya ternyata dapat memperkenalkan tenaga-tenaga baru yang selama ini belum tampil ke dalam pertemuan yang bertaraf nasional. Disamping itu yang lebih mengembirakan lagi ialah bahwa seminar ini sesuai dengan yang diharapkan, telah menjadi forum bagi dikemukakannya pengetahuan yang lebih mendalam dan akrab tentang berbagai aspek dari dinamika masyarakat di beberapa daerah di tanah air kita.

Pokoknya seminar ini bukan saja kami rasakan telah mencapai sasaran yang dikehendaki oleh proyek, tetapi juga nampaknya memperkaya cakrawala intelektual para peserta.

U M U M

1. Studi sejarah lokal merupakan pengenalan yang lebih intim dengan dinamika masyarakat setempat, sehingga memungkinkan kita untuk mempertemukan secara strategis hasrat dan rencana pembangunan nasional dengan realitas setempat.
2. Dalam rangka integrasi nasional, studi sejarah lokal dapat mengidentifikasi potensi-potensi nasional yang terbaik yang memungkinkan pemanfaatan secara optimal, potensi masyarakat lokal dalam konteks pembangunan nasional secara keseluruhan.

3. Dilihat dari segi akademis, studi sejarah lokal bisa mempercepat pengindonesiaan (indigenization) dari pada ilmu-ilmu sosial. Dengan demikian teori-teori dari ilmu-ilmu sosial berdasarkan generalisasinya atas realitas Indonesia, sehingga dapat membantu penyusunan konsep-konsep ilmu sosial dengan masyarakat kita. Dalam usaha "indigenization" dari pada konsep-konsep ilmu sosial, maka sejarah adalah disiplin yang sangat strategis, karena sejarah sangat peka tidak hanya terhadap pola perilaku manusia, tetapi juga terhadap interaksi antara manusia dengan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kekuasaannya.

KESAN—KESAN

1. Seminar sudah lebih terarah bila dibandingkan dengan seminar-seminar sejarah sebelumnya.
2. Walaupun membicarakan sejarah lokal, permasalahan seminar didasari wawasan integrasi nasional.
3. Seminar ini memberikan kemungkinan kepada Proyek IDSN untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan penelitian dan penulisan sejarah di daerah-daerah, sekaligus memberi kemungkinan kepada sejarawan lokal menguji hasil penelitiannya dengan rekan-rekannya sebelum diterbitkan dan disebarluaskan.
4. Memberi gagasan-gagasan baru kepada para pengajar sejarah pada waktu menyusun silabus.
5. Merupakan langkah permulaan yang menggembirakan karena makalah-makalah yang disampaikan tidak lagi terbatas pada deskripsi saja.
6. Merupakan sarana untuk talent scouting dari potensi penulisan sejarah di daerah.

BEBERAPA KELEMAHAN

Dengan menyadari bahwa masa persiapan sangat singkat, panitia pengarah mencatat beberapa kelemahan dalam pembuatan makalah :

1. Ketajaman dalam perumusan permasalahan masih kurang.
2. Karena kurang tajam dalam perumusan permasalahan ini, maka seleksi dari fakta-fakta yang relevan belum memuaskan.
3. Konsep-konsep ilmu sosial belum dikuasai dengan baik.
4. Adanya kelemahan dalam metodologi penelitian dan penulisan.

5. Kekurangan imajinasi dalam menanggapi TOR, yang dicerminkan pada pemilihan judul makalah yang harus mengikuti judul-judul TOR.
6. Sistematik dalam penyusunan argumen dengan fakta-fakta relevan perlu ditingkatkan.
7. Akibat dari kekurangan waktu maka **exhaustiveness** dari penggunaan sumber sangat minim.
8. Penggunaan sumber primer masih sangat terbatas.

SARAN

Berhubung dengan hal-hal yang disebut tadi, maka diusulkan untuk mengadakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut :

1. Agar supaya makalah-makalah diperbaiki dan dilengkapi untuk diterbitkan kemudian. Untuk melaksanakan maksud ini perlu ditunjuk dewan redaksi yang akan mengadakan seleksi daripada makalah yang dapat diterbitkan.
2. Usaha yang dirintis ini perlu dilanjutkan dengan memberi perhatian kepada daerah-daerah yang belum dijangkau dalam seminar pertama ini.
3. Disamping penyelenggaraan seminar sejarah lokal seperti ini perlu diadakan seminar yang khusus membicarakan metodologi untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan sejarah.

